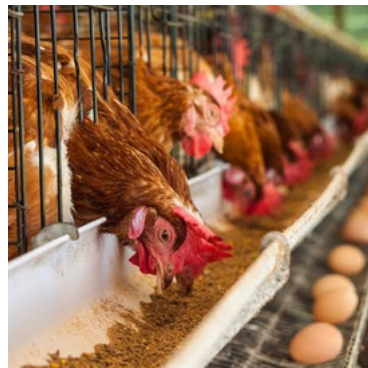




RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK

KABUPATEN TANAH LAUT
2024-2026



TIM PENYUSUN

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK KABUPATEN TANAH LAUT 2024-2026

Dr. Jaka Darma Jaya, M.P

Dr. Mufrida Zein, S.Ag., M.Pd

Veri Julianto, S.Si., M.Si

Dr. Fatimah, S.Si., M.P

Dr. Meldayanoor, S.Hut, M.S

Ir. Nuryati, S.T., M.Eng

Ika Kusuma Nugraheni, S.Si., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan InayahNya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJP IPTEK) Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan dengan baik. Laporan RIPJP IPTEK ini memuat Pendahuluan, Gambaran Umum Inovasi dan Riset di Daerah, Tantangan dan Peluang, Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi, Strategi Riset dan Invoasi, Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah dan Rencana Aksi Tahun Riset dan Inovasi di Daerah.

Dokumen RIPJP IPTEK Kabupaten Tanah Laut disusun dengan mengacu pada rencana induk riset nasional 2017-2045, dokumen perencanaan daerah, sumber daya dan keunggulan daerah, serta tantangan dan peluang masa depan yang dihadapi Kabupaten Tanah Laut. Data dan laporan RIPJP IPTEK ini disusun melalui Diskusi Terpumpun dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama dengan Tim Penyusun dari Politeknik Negeri Tanah Laut.

Terima kasih yang mendalam disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan ide, masukan dan saran dalam penyusuna Dokumen RIPJP IPTEK Kabupaten Tanah Laut ini. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan riset dan inovasi yang mendukung percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 13 Desember 2023

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR TABEL.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	3
2.1 Gambaran Umum Daerah.....	3
2.2 Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah	25
2.3 Ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut.....	29
2.4 Penentuan Tema Prioritas Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK	45
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH	48
3.1 Tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang	48
3.2 Kondisi Ekosistem Riset yang Diharapkan	54
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	62
4.1 Analisis Kesenjangan <i>Evidence-Based Policy</i>	62
4.2 Analisis Kesenjangan Unggulan Daerah.....	66
BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	106
5.1 Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (<i>evidence- based policy</i>).....	106
5.2 Strategi pengembangan produk unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah dalam kurun waktu 2024-2026	108
BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH	115
6.1 Sasaran Strategis dan Fokus Kebijakan Berbasis Bukti (<i>Evidence-based Policy</i>).....	115

6.2 Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut	116
BAB VII RENCANA AKSI TAHUNAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH	124
BAB VIII PENUTUP	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut	4
Gambar 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022 (BPS Kab. Tanah Laut, 2023)	10
Gambar 2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2022 (BPS Kab. Tanah Laut, 2023)	11
Gambar 2.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2018-2022	14
Gambar 2.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2022	17
Gambar 2.6	Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	18
Gambar 2.7	Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2022	19
Gambar 2.8	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	20
Gambar 2.9	Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2022	21
Gambar 2.10	Grafik Bidang Keterserapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Laut 2022 ...	26
Gambar 2.11	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDBR ADHB Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	27
Gambar 2.12	Gedung Dekranasda Kabupaten Tanah Laut	41
Gambar 2.13	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developments Goals.....	44
Gambar 2.14	Pendekatan Top Down dan Bottom Up Penentuan Tema Prioritas.....	46
Gambar 2.15	Tema Prioritas Riset Nasional 2017-2045	46
Gambar 6. 1	Sasaran Strategis Riset dan Inovasi Kabupaten Tanah Laut 2024-2026.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan	3
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut.....	5
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut 2018-2022.....	6
Tabel 2.4	Kependudukan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	7
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022	8
Tabel 2.6	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	11
Tabel 2.7	Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut 2018-2022	12
Tabel 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022.....	13
Tabel 2.9	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut (%), 2018-2022	16
Tabel 2.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022	22
Tabel 2.11	Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut.....	24
Tabel 2.12	Kondisi Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022.....	27
Tabel 2.13	Daftar Inovasi Daerah yang Terkirim Melalui Aplikasi Inovation Government Award (IGA) Tahun 2022	34
Tabel 3.1	Kondisi dan Ekosistem Riset yang Diharapkan	54
Tabel 4.1	Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti	63
Tabel 4.2	Analisis Kesenjangan Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Laut	68
Tabel 4.3	Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Laut.....	71
Tabel 4.4	Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut.....	75
Tabel 4.5	Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut.....	81
Tabel 4.6	Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Laut	92

Tabel 4. 7	Analisis Kesenjangan Penyelarasan dengan Perkembangan Global di Kabupaten Tanah Laut	99
Tabel 6.1	Sasaran Strategis Bidang Pertanian dan Perkebunan pada 2024-2026	117
Tabel 6.2	Sasaran Strategis Bidang Peternakan kabupaten Tanah Laut pada 2024-2026.....	118
Tabel 6.3	Sasaran Strategis Bidang Perikanan kabupaten Tanah Laut pada 2024-2026.....	121
Tabel 7.1	Rencana Aksi Tahunan Riset dan Inovasi di Daerah	125

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tanah Laut, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, memiliki beragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, jasa dan sektor lainnya. Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk melakukan pemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dengan sumber daya alam yang melimpah, masyarakat yang berpotensi, dan dukungan pemerintah yang kuat, Kabupaten Tanah Laut memiliki peluang yang besar untuk menjadi pusat inovasi dan pengembangan IPTEK di tingkat lokal.

Pemajuan IPTEK dan inovasi di daerah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. IPTEK memiliki peran krusial dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Penerapan teknologi dan inovasi dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan daya saing. Selain itu, kemajuan IPTEK juga dapat mendorong peningkatan Kualitas Hidup. IPTEK berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan solusi untuk masalah-masalah sosial, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kemajuan IPTEK dapat meningkatkan daya saing daerah. Dalam era globalisasi, daya saing suatu daerah atau negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengadopsi dan mengembangkan teknologi terkini. Dengan fokus pada IPTEK, Kabupaten Tanah Laut dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional.

Kemajuan IPTEK akan membawa pada meningkatnya inovasi-inovasi pembangunan di daerah yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Inovasi membawa perubahan positif dalam proses dan sistem, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi pemborosan sumber daya. Inovasi mendorong pengembangan SDM dengan mendorong kreativitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, menjadikan masyarakat lebih siap menghadapi tantangan global. Pengembangan inovasi juga akan berdampak pada tersedianya alternatif solusi terhadap permasalahan dan tantangan pembangunan di daerah.

Diperlukan langkah yang sistematis dan terintegrasi dalam upaya pemajuan IPTEK dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut, salah satunya adalah dengan menyusun RIPJP IPTEK Kabupaten Tanah Laut. Dalam RIPJP IPTEK ini akan dilakukan identifikasi sumberdaya, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasis SDM, peningkatan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan masyarakat, serta penguatan dukungan inovasi dalam bentuk pemberian insentif dan kompetisi. Dengan merancang rencana induk dan peta jalan ini, diharapkan Kabupaten Tanah Laut dapat mengoptimalkan potensinya dalam pengembangan IPTEK, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjadi kontributor yang signifikan dalam kemajuan bangsa.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RIPJP IPTEK di Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
2. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 -2039
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 212 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan di Kabupaten Tanah Laut
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RIPJP IPTEK di Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen resmi sebagai rujukan dalam upaya pemajuan IPTEK yang lebih sistematis dan terintegrasi di Kabupaten Tanah Laut.
2. Diacunya dokumen RIPJP IPTEK sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan di daerah.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.
4. Meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

A. Aspek Geografi

Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di titik koordinat 114°30'54,663"-115°22'38,535" Bujur Timur dan 3°30'37,586"-4°10'41,134" Lintang Selatan. Berdasarkan RT/RW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036, luas wilayah daratan Kabupaten Tanah Laut adalah 384.852 ha dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Pelaihari. Ruang lingkup wilayah administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 kecamatan dan 130 desa dan 5 kelurahan. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

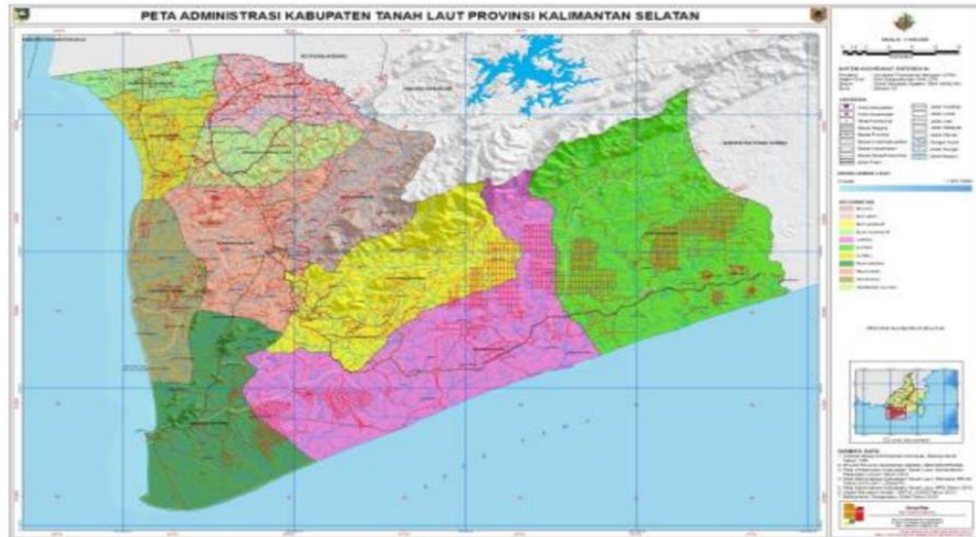
Adapun batas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Kabupaten Tanah Laut Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Jorong	628,00	17,29
2.	Batu Ampar	548,10	15,09
3.	Kintap	537,00	14,79
4.	Pelaihari	379,45	10,45
5.	Takisung	343,00	9,45
6.	Panyipatan	336,00	9,25
7.	Bati-bati	234,75	6,46
8.	Bajuin	196,30	5,41
9.	Tambang Ulang	160,75	4,43
10.	Bumi Makmur	141,00	3,88
11.	Kurau	127,00	3,50
Kabupaten Tanah Laut		3.631,35	100,0%

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023



Sumber: PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 – 2036

Gambar 2.1 Wilayah Administratif Kabupaten Tanah Laut

Dari 11 kecamatan yang ada, secara keseluruhan Kabupaten Tanah Laut memiliki 135 desa dan kelurahan. Wilayah yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pelaihari (15 desa dan 5 kelurahan), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa sedikit adalah Kecamatan Bajuin dengan 9 desa. Rincian jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Tanah Laut ditampilkan pada Tabel 2.2.

Berdasarkan karakteristik geografis, kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Kecamatan yang berada di tepi laut yakni Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Kurau, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
2. Kecamatan yang tidak memiliki wilayah laut yakni Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bajuin dan Kecamatan Batu Ampar.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Tanah Laut

No	Kecamatan	Ibukota	Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Jorong	Jorong	11	-
2.	Batu Ampar	Batu Ampar	14	-
3.	Kintap	Kintapura	14	-
4.	Pelaihari	Pelaihari	15	5
5.	Takisung	Gunung Makmur	12	-
6.	Panyipatan	Panyipatan	10	-
7.	Bati-bati	Padang	14	-
8.	Bajuin	Bajuin	9	-
9.	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	-
10.	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	-
11.	Kurau	Padang Luas	11	-
			130	5

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

B. Kependudukan

Penduduk sebagai faktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek Pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah sebanyak 361.044 jiwa. Jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanah Laut, tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

No	Tahun	Penduduk				Sex Ratio
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)	
1.	2018	174.019	165.176	339.195	1,46	105,35
2.	2019	176.319	167.571	343.890	1,38	105,22
3.	2020	179.012	169.954	348.966	1,59	105,30
4.	2021	181.706	172.634	354.340	1,15	105,30
5.	2022	185.076	175.968	361.044	1,42	105,18

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Tanah Laut adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebanyak 80.323 jiwa (22,25%) dan memiliki pertumbuhan penduduk sebesar 2,26% sepanjang tahun 2020-2022, sedangkan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kintap merupakan yang terendah yaitu sebesar 1,49%. Wilayah yang memiliki penduduk tertinggi kedua adalah Kecamatan Bati-Bati yaitu sebanyak 46.130 jiwa (12,78%), disusul Kecamatan Kintap sebanyak 44.201 jiwa (12,24%), dan Kecamatan Jorong sebanyak 35.827 jiwa (9,92%). Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kurau yaitu 14.038 jiwa (3,89%). Jika dilihat dari kepadatan penduduk, wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar 212 jiwa per km², disusul oleh Kecamatan Bati-Bati sebesar 197 jiwa per km², dan Kecamatan Tambang Ulang sebesar 115 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah diurutkan dari yang paling kecil adalah Kecamatan Batu Ampar yaitu sebesar 52 jiwa per km², Kecamatan Jorong sebesar 57 jiwa per km², dan Kecamatan Panyipatan sebesar 78 jiwa per km².

Tabel 2.4 Kependudukan Penduduk Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jorong	628,00	64,68	65,7	55	56	57
2.	Batu Ampar	548,10	49,83	46,56	50	51	52
3.	Kintap	537,00	96,44	99,2	80	81	82
4.	Pelaihari	379,45	173,2 2	178,3 6	204	207	212
5.	Takisung	343,00	85,75	87,29	94	96	97
6.	Panyipatan	336,00	68,6	63,91	75	76	78
7.	Bati-bati	234,75	169,9 2	173,3	191	193	197
8.	Bajuin	196,30	91,82	94,2	98	99	101
9.	Tambang Ulang	160,75	106,1 6	107,5 3	111	113	115
10.	Bumi Makmur	141,00	100,81	100,56	98	99	101
11.	Kurau	127,00	95,25	96,78	107	109	111
Kabupaten Tanah Laut		3.631,3 5	93,4 1	94,7	96	98	99

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah sebanyak 185.076 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 175.968 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020 adalah sebesar 105,2 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tanah Laut terdapat 105 penduduk laki-laki.

Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur pada tahun 2022, dilihat bahwa penduduk usia muda lebih dominan yaitu usia dari 0-4 dan 0-9 tahun. Indikasi dari fenomena ini adalah bahwa fertilitas cukup tinggi di Kabupaten Tanah Laut dan/atau terdapat migrasi masuk yang menyebabkan tingginya angka kelompok termuda tersebut. Meskipun jumlah penduduk umur 0-9 tahun adalah kelompok terbanyak di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022, tren kelompok yang menjadi tanggungan usia produktif untuk di bawah 14 tahun menunjukkan persentase terendah selama 5 tahun terakhir. Sebaliknya kelompok umur di atas 65 tahun menunjukkan angka tertinggi.

Hal ini dapat menjadi sebuah peringatan untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut bahwa fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi beberapa tahun lagi, ternyata sudah mulai berjalan di tahun-tahun ini. Bonus demografi merupakan momentum yang jika dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan Angkatan kerja, menurunkan kemiskinan, dan lainnya.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	16.235	15.646	31.881
5-9	17.114	16.613	33.727
10-14	15.993	15.071	31.064
15-19	14.693	13.428	28.121
20-24	14.463	13.974	28.437
25-29	14.848	14.194	29.042
30-34	14.784	14.416	29.200
35-39	14.870	14.366	29.236
40-44	14.132	13.255	27.387
45-49	12.564	11.713	24.277
50-54	10.472	9.869	20.341
55-59	8.626	8.165	16.791
60-64	6.672	5.990	12.662
65-69	4.826	4.319	9.145
70-74	2.630	2.565	5.195
75+	2.154	2.384	4.538
Tanah Laut	185.076	175.968	361.044

Sumber: Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 menurut kelompok umur terbanyak ada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 33.727 jiwa dan disusul oleh kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 31.881 jiwa kemudian kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 31.064 jiwa.

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (economically active population) dan besarnya rasio ketergantungan (dependency ratio). Kondisi ini juga sering disebut sebagai population boom. Kondisi tersebut pada masa yang akan datang akan memiliki dua implikasi, jika dapat penduduk dikelola dengan baik sehingga menjadi SDM produktif akan

sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah dan sebaliknya jika tidak dapat terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab berbagai problem ekonomi dan sosial wilayah.

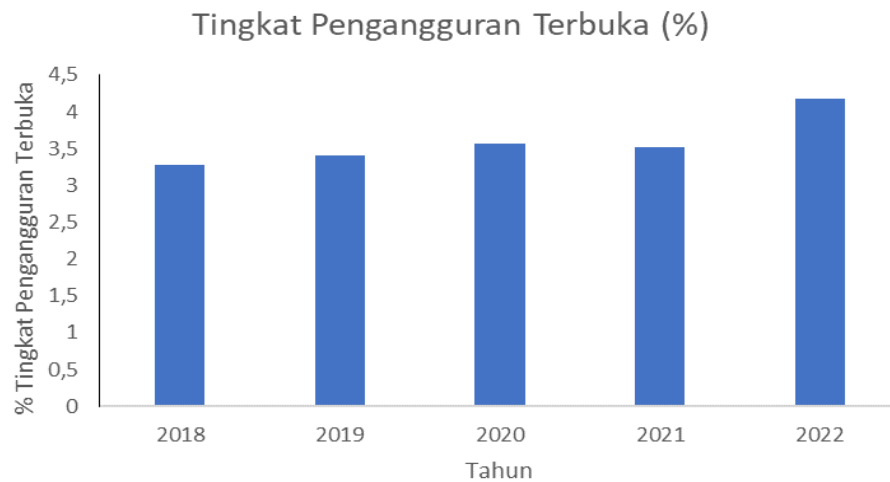
Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (unemployment). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam Angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.

C. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam menjalankan segala urusan pemerintah daerah dan untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat maka sangat diperlukan serapan dan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan menjadi sangat penting dalam menjalankan proses pemerintahan.

Pengangguran terbuka (open unemployment) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Jika melihat data TPT pada tahun 2018 sebesar 3,28% kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,41%, dan pada tahun 2020 terjadi kenaikan persentase pengangguran hingga TPT menjadi sebesar 3,57%, namun pada tahun 2021 turun menjadi 3,52%, dan Kembali naik menjadi 4,17% pada tahun 2022.



Gambar 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022
(BPS Kab. Tanah Laut, 2023)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (supply) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK Kabupaten Tanah Laut selama periode Tahun 2018–2022 seperti terlihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2022 (BPS Kab. Tanah Laut, 2023)

Terlihat dari Gambar 2.3 selama periode 2018-2021 TPAK Kabupaten Tanah Laut terus meningkat hingga 72,27%, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 70,92%. Penurunan TPAK salah satunya disebabkan terjadinya peningkatan penduduk bukan angkatan kerja pada saluran "sekolah" karena pandemi yang sudah mereda dan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah.

Tabel 2.6 Data Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penduduk Bekerja (jiwa)	158.596	166.334	175.337	178.543	176.458
2.	Angkatan Kerja (jiwa)	163.969	172.161	181.827	185.049	184.133
3.	Penganggur/ Mencari Kerja (jiwa)	5.373	5.827	6.490	6.506	7.675

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

D. Aspek Kesejahteraan masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui gambaran kondisi

ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yakni menggunakan perhitungan tahun dasar 2010. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Selama periode 2018-2022, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp 13.241.237,45 juta pada tahun 2018 kemudian meningkat menjadi Rp 13.902.297,08 juta pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp. 13.786,685,56 juta, namun pada tahun 2021 naik Kembali menjadi 15.326.244,74 juta, dan kembali naik pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 19.019.178,93 juta. Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp 9.995,214,72 juta pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp 10.366,648,31 juta, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 10.164,061, 96 juta, namun kembali meningkat menjadi Rp. 10.515.159,53 juta pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi Rp. 11.053.374,62 juta pada tahun 2022.

Tabel 2.7 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Kabupaten Tanah Laut 2018-2022

Tahun	ADHB (Juta Rupiah)	ADHK (Juta Rupiah)
2018	13.241.237,45	9.995.214,72
2019	13.902.297,08	10.366.648,31
2020	13.786.685,56	10.164.061,96
2021	15.326.244,74	10.515.159,53
2022	19.019.178,93	11.053.374,62

Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

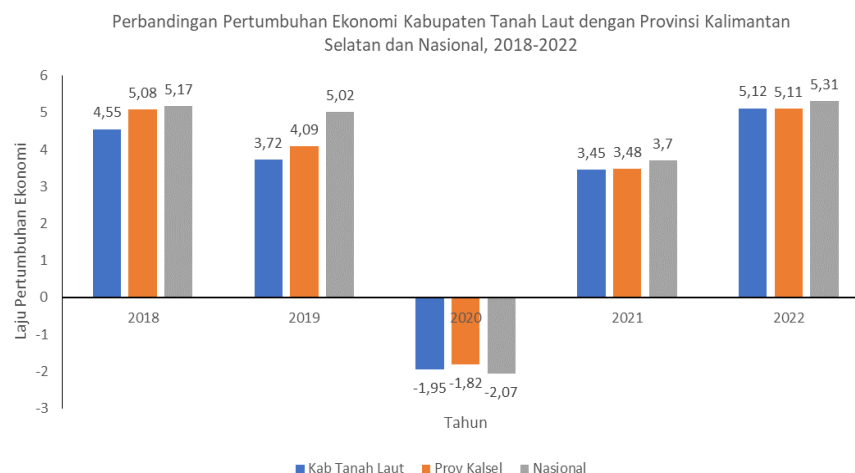
Tabel 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha (%), 2018-2022

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	3,42	-0,30	1,73	2,70
Pertambangan dan Penggalan	2,36	0,73	-4,96	4,45	6,22
Industri Pengolahan	5,79	2,51	-4,27	5,01	3,86
Pengadaan Listrik dan Gas	7,5	4,07	5,02	4,78	7,79
Pengadaan Air	6,66	3,45	3,45	3,91	4,96
Konstruksi	6,95	6,26	-0,98	3,84	4,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,21	6,57	-2,89	2,48	7,10
Transportasi dan Pergudangan	6,92	5,93	-1,87	1,59	13,64
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,73	6,18	-1,23	2,29	6,54
Informasi dan Komunikasi	7,19	6,33	6,34	6,57	6,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	4,3	2,29	-1,44	0,54
Real Estate	4,93	4,72	1,90	5,10	4,59
4,59Jasa Perusahaan	7,25	7,16	-1,74	3,49	6,89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	8,33	1,14	4,71	-0,54
Jasa Pendidikan	7,22	6,02	2,64	0,83	3,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,18	4,78-	7,52	8,20	4,59
Jasa lainnya	7,02	6,78	-0,86	0,84	6,29
PDRB	4,46	3,72	-1,95	3,45	5,12

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Dilihat dari tabel di atas, secara agregat perekonomian Tanah Laut mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen di tahun 2022 setelah pada tahun 2020 mencapai angka negatif. Pertumbuhan positif ini artinya pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

yaitu -0,54 persen. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi pada tahun sebelumnya pertumbuhannya paling rendah yaitu -1,44 persen pada tahun 2022 naik menjadi 0,54 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan tumbuh paling besar pada tahun 2022 yaitu 13,64 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Gambar 2.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, 2018-2022

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade. Gambar 2.5 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berkontraksi cukup dalam di angka -1,95 yang merupakan salah satu dampak dari pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut mampu bangkit ke angka 3,45 dan pada tahun 2022 menjadi 5,12 %.

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di atasnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2022 mencapai 3,11%. Dan jika dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya, dimana pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 mencapai 5,31%

b. Struktur Ekonomi

Beragamnya potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di suatu wilayah memberikan warna pada struktur ekonomi pada wilayah tersebut. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi wilayah tersebut. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Dilihat dari tabel di atas, perekonomian Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 34,30% pada tahun 2022. Kemudian sektor andalan kedua di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, distribusi sektor ini mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 sebesar 15,58%, menurun dari tahun 2021 yang mana distribusinya sebesar 18,03%. Industri lainnya yang perlu diperhitungkan karena distribusinya terhadap PDRB adalah sektor industri pengolahan. Distribusi sektor ini juga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pada tahun 2022, kontribusi mencapai 10,50%, meenurun dari 2021 distribusinya sebesar 12,10%. Kekayaan sumber daya alam pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang mendorong tumbuhnya sektor industri, baik formal maupun non formal.

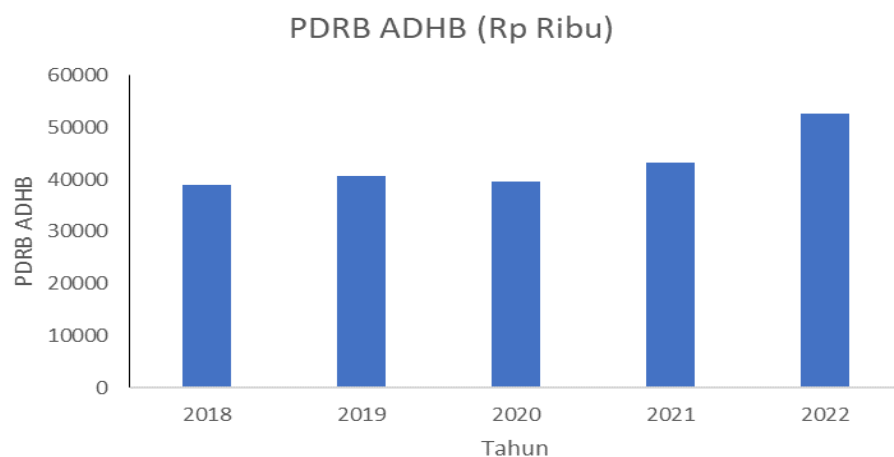
Tabel 2.9 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tanah Laut (%), 2018-2022

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) atas Dasar Harga Berlaku (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,92	19,01	19,28	18,03	15,58
Pertambangan dan Penggalian	23,85	22,59	21,67	25,18	34,30
Industri Pengolahan	12,79	12,52	12,29	12,10	10,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09
Pengadaan Air	0,18	0,19	0,20	0,19	0,16
Konstruksi	7,26	7,50	7,52	7,28	6,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,2	11,53	11,49	11,29	10,45
Transportasi dan Pergudangan	6,08	6,27	6,25	5,78	5,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,54	1,59	1,61	1,52	1,34
Informasi dan Komunikasi	2,96	3,03	3,23	3,11	2,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	1,52	1,56	1,45	1,24
Real Estate	1,97	2,02	2,09	2,02	1,72
Jasa Perusahaan	0,34	0,36	0,37	0,35	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,44	5,73	5,95	5,68	4,64
Jasa Pendidikan	4,06	4,16	4,37	4,01	3,38
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1,06	1,19	1,18	1,01
Jasa lainnya	0,78	0,81	0,82	0,75	0,67
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

c. Pendapatan Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau per capita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan Tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.



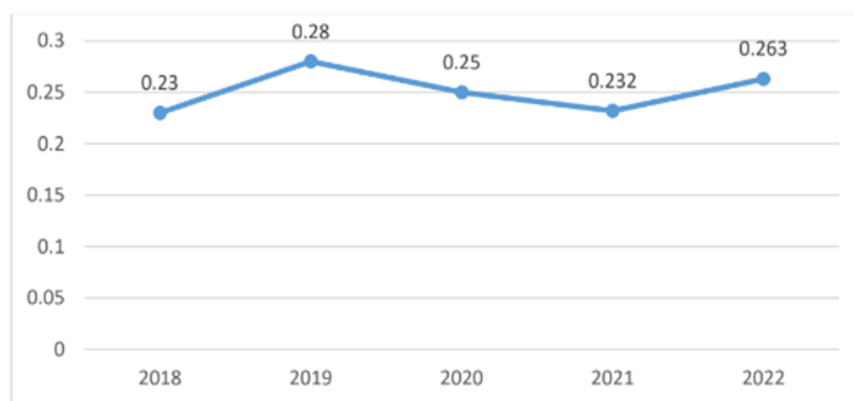
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2023

Gambar 2.5 PDRB Per Kapita Kabupaten Tanah Laut Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2022

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung meningkat setiap tahunnya, baik untuk PDRB ADHB. Pada tahun 2018 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp 36,037 juta dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp 52,678 juta. Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Namun PDRB Per Kapita Kab. Tanah Laut masih berada di bawah PDRB Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rp. 60,08 juta dan PDRB Per Kapita Nasional yaitu Rp 71 juta pada tahun 2022.

d. Indeks Gini

Pengukuran tingkat pemerataan dapat dilakukan dengan pendekatan koefisien gini. Koefisien gini atau rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran akumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan kumulatif penduduk. Nilai rasio gini antara 0 hingga 1. Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio Gini dibagi dalam tiga kategori: (a) Gini Ratio $>0,5$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, (b) Gini Ratio $0,3-0,5$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan (c) Gini Ratio $<0,3$ yang menggambarkan distribusi pendapatan dengan Tingkat ketidakmerataan rendah.

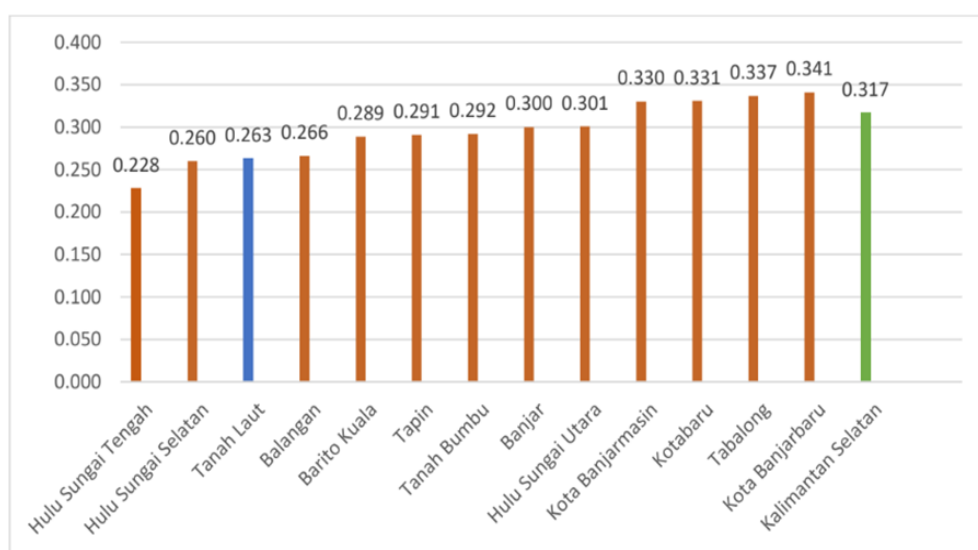


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.6 Angka Gini Rasio Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Berdasarkan Gambar 2.7, terlihat bahwa sepanjang periode 2018-2022, nilai gini rasio Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, nilai gini rasio adalah sebesar 0,23, kemudian nilai gini rasio naik menjadi 0,28 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,25 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 0,232, dan naik Kembali menjadi 0,263 pada tahun 2022. Selama periode 2018-2022, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio gini di Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori rendah yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tanah Laut

Tingkat ketidak merataannya rendah. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut menjadi Kabupaten terendah ketiga wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang distribusi pendapatannya dengan ketidakmerataan yang rendah pada tahun 2022. Wilayah dengan nilai rasio gini tertinggi adalah Kota Banjarbaru sebesar 0,341, kemudian Kabupaten Tabalong yaitu sebesar 0,337, disusul Kabupaten Kotabaru sebesar 0,331.

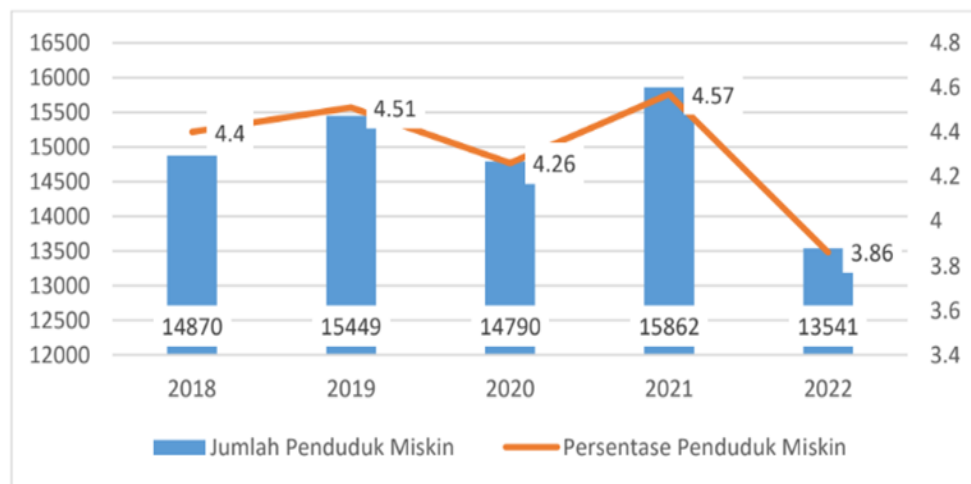


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.7 Indeks Gini di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2022

e. Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur Tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kabupaten Tanah Laut, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan termasuk dalam kategori miskin jika rata-rata pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Pada periode 2018-2022, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut cukup fluktuatif.

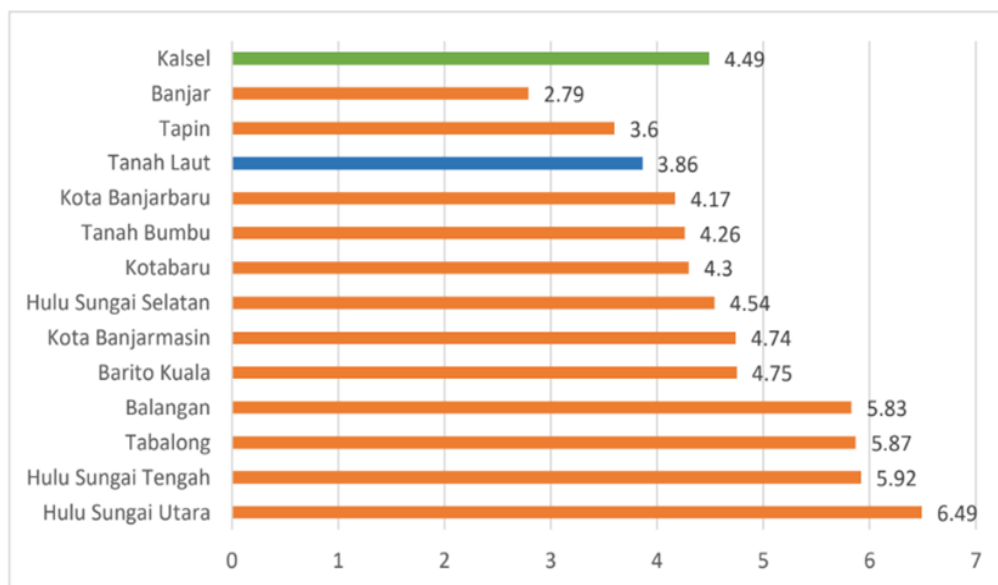


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.8 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Pada tahun 2018 ke tahun 2019, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut dari 4,4 persen menjadi 4,51 persen. Umumnya, dinamika jumlah penduduk miskin sejalan dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah yang dicerminkan dari persentase penduduk miskin. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2020 kondisi tersebut dapat teratasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan yang cukup signifikan pada persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2020. Penanganan kemiskinan pada tahun 2020 memang menjadi perhatian besar bagi pemerintah mengingat kondisi pandemi yang tengah berlangsung. Namun pada tahun 2021, persentase kembali meningkat menjadi 4,57 persen. Seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, aktivitas ekonomi

masyarakat kembali normal sehingga persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 menurun kembali menjadi sebesar 3,86%.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Gambar 2.9 Persentase Angka Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Prov. Kalimantan Selatan, 2022

Gambar 2.9 menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 berada pada urutan terendah ke 3 dari 13 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan. Persentase angka kemiskinan terendah dimiliki oleh Kabupaten Banjar, dan persentase tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi kemiskinan yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, yang diukur dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap-P1) dan Indeks Keparahannya (Poverty Severity Index-P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin Tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin

parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2018-2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan dari 0,71 menjadi 0,55, kemudian naik menjadi 0,58 pada tahun 2019 dan 2020. Dan Kembali naik pada tahun 2021 menjadi 0,68. Hal ini menandakan bahwa rata- rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin jauh pada garis kemiskinan. Hasil yang berbeda ditunjukkan pada indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2018-2022 terjadi penurunan indeks dari 0,14 menjadi 0,061, yang menandakan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Tanah Laut memiliki kecenderungan untuk menurun dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.10 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,55	0,58	0,58	0,679	0,374
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,14	0,11	0,12	0,142	0,061

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2022

f. Produk Unggulan Daerah

Produk Unggulan Daerah (PUD) merujuk pada jenis produk atau sektor ekonomi tertentu yang menjadi keunggulan atau spesialisasi dari suatu wilayah atau daerah. Produk ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari produk serupa dari daerah lain. Konsep Produk Unggulan Daerah (PUD) sangat penting dalam pengembangan ekonomi regional karena dapat memberikan keunggulan kompetitif, meningkatkan daya saing daerah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa ciri produk unggulan daerah memiliki 6 (enam) ciri, yaitu 1). Keunikan atau keistimewaan, produk unggulan daerah biasanya memiliki karakteristik khusus yang membuatnya unik atau istimewa dibandingkan dengan produk serupa dari daerah lain. Hal ini dapat

mencakup kualitas, rasa, desain, atau faktor lain yang membuatnya berbeda. Ciri yang ke 2). Sumber daya alam atau manusia, yaitu produk unggulan daerah dapat berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam atau keahlian khusus dari masyarakat setempat. 3). Tradisi dan Budaya, produk unggulan daerah sering kali terkait dengan tradisi dan budaya lokal. Keahlian tradisional atau cara pembuatan yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjadi faktor penentu dalam menghasilkan produk yang unggul. 4). Daya Saing, produk unggulan daerah harus mampu bersaing di pasar. Ini dapat melibatkan peningkatan kualitas, inovasi produk, atau strategi pemasaran yang efektif. Yang ke 5, Memiliki kontribusi terhadap Ekonomi Lokal, produk unggulan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi terkait. Selain itu, Dukungan Pemerintah dan Masyarakat, keberhasilan produk unggulan daerah seringkali memerlukan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat setempat. Ini termasuk regulasi yang mendukung, pelatihan bagi pelaku usaha, dan promosi produk.

Berdasarkan data Tanah Laut dalam angka Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Tanah Laut terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu, (1) sektor pertambangan sebesar 34,30%, (2) Pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan sebesar 15,58%, (3) Industri Pengolahan sebanyak 10,51%. Dari ketiga sektor tersebut menjadi dasar dalam menentukan dan memfokuskan untuk pengembangan produk unggulan daerah Tanah Laut.

Walaupun sektor pertambangan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi untuk Kabupaten Tanah Laut akan tetapi tidak seimbang dengan keberlanjutan usaha dan keterserapan tenaga kerja berdasarkan Data BPS 2022 hanya menyumbang 4%. Jika dibandingkan dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan yang hanya menyumbang 15,58% tetapi jika dilihat dari keterserapan tenaga kerja paling tinggi yaitu sebesar 49%, sehingga sektor pertanian menjadi sektor yang diunggulkan dalam menentukan pengembangan produk unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Beberapa produk unggulan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Produk Unggulan Kabupaten Tanah Laut.

No	Bidang Unggulan	Produk/Komoditas Unggulan	Jumlah per Tahun
1.	Pertanian (Pangan)	Padi	134.995,786 ton
		Jagung	38.940 ton
		Ubi jalar	4.476 ton
		Kedelai	1.670 ton
		Ubi kayu	824 ton
		Bawang Merah	11,03 ton
		Bawang Daun	1.689 kwintal
		Bayam	2.540,5 kwintal
		Sawi	1.624,5 kwintal
		Semangka	14.143 kwintal
		Cabe Besar	5.840 kwintal
		Kacang Panjang	5.110,6 kwintal
		Ketimun	3.811,6 kwintal
		Terong	5.211,4 kwintal
		Alpukat	225 kwintal
		Sawo	3.336 kwintal
		Sirsak	6.600 kwintal
		Sukun	10.317 kwintal
		Petai	18.466 kwintal
		Pisang	35.063 kwintal
		Pepaya	19.801 kwintal
		Kencur	48.680 kwintal
		Jahe	1.101 kwintal
		Kunyit	865 kwintal
		Laos	639 kwintal
		Temulawak	12 kwintal
2.	Perkebunan	Sawit	28.237,6 ton
		Karet	7.556,6 ton
		Kelapa	840 ha
3.	Perikanan	Perikanan Tangkap	65031 ton
		Perikanan Budidaya (Nila, Patin)	1415 ton
4.	Peternakan	Sapi Potong	82.463 ekor
		Sapi perah	22 ekor
		Unggas Ayam Ras Pedaging	48.342.321 ekor
		Unggas Ayam Petelur	7 394 025 ekor

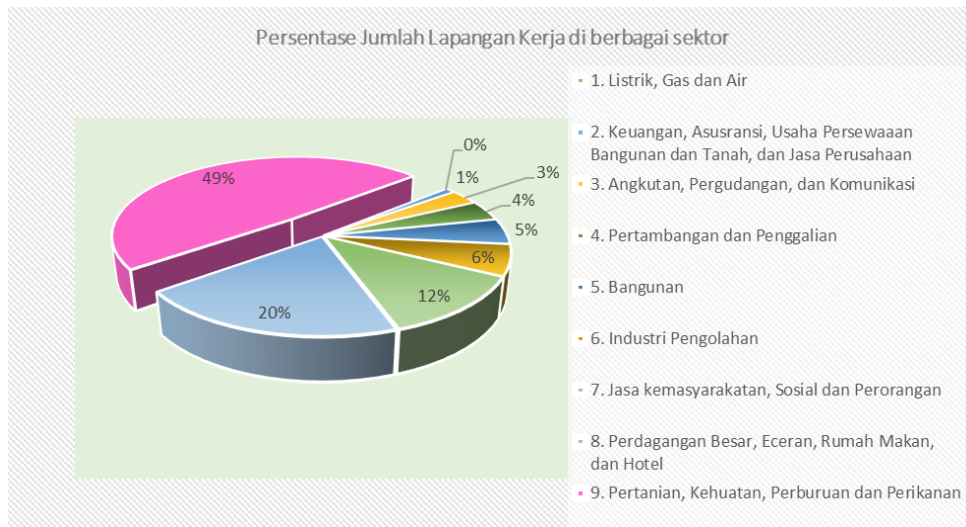
	Unggas Ayam Kampung	2.584.795 ekor
	Itik	198 668 ekor
	Kambing	20 335 ekor

2.2 Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah

Berdasarkan 3 (tiga) sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, yaitu (1) sektor pertambangan, (2) Pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan (3) Industri Pengolahan maka dapat diidentifikasi terkait dengan kebijakan yang dapat diterapkan dalam menentukan permasalahan yang dihadapi dan analisis evaluasi implementasi dari kebijakan yang diterapkan. Berdasarkan tiga sektor tersebut, analisis dilakukan dan digunakan sebagai panduan untuk Menyusun kebijakan berbasis bukti adanya riset dan inovasi yang dikembangkan di Kabupaten Tanah Laut.

a. Sektor Pertambangan

Kabupaten Tanah Laut memiliki sumber daya alam berupa tambang batu bara yang menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi untuk Kabupaten Tanah Laut sebesar 34,30%, dan tercatat di 9 (Sembilan) kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, namun demikian sektor pertambangan seringkali dihadapkan pada berbagai masalah dan peluang yang memerlukan perhatian riset dan inovasi. Permasalahan yang pertama berkaitan dengan dampak lingkungan dan keselamatan dan Kesehatan pekerja serta ketergantungan pada sumber daya Fosil. Pertambangan seringkali berkontribusi pada degradasi lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Risiko ini mengharuskan identifikasi solusi inovatif untuk mengelola dampak lingkungan secara berkelanjutan. Pertambangan melibatkan risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja dan masalah kesehatan terkait pekerjaan, sehingga kegiatan riset dan inovasi dapat difokuskan pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan keselamatan pekerja dan mengurangi risiko terkait. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan keterserapan tenaga kerja dari penduduk lokal di Kabupaten Tanah Laut masih rendah, hanya sebesar 4% dari jumlah lapangan kerja utama berdasarkan Data BPS 2022, seperti yang terlihat pada grafik berikut ini.

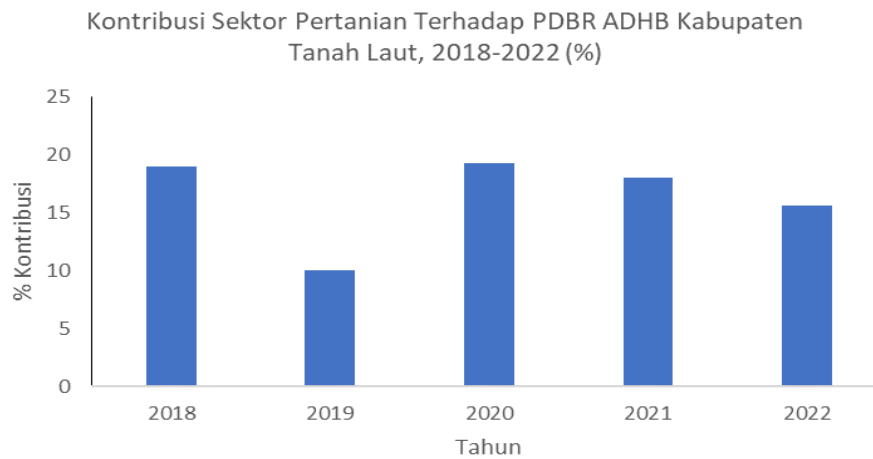


Gambar 2.10 Grafik Bidang Keterserapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Laut 2022

Struktur Ekonomi di Kabupaten Pada Tahun 2022 masih di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini akan menjadi permasalahan serius di masa mendatang, mengingat pertambangan merupakan sumber daya yang bersifat *non renewable resources*.

b. Pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan

Pertanian menjadi salah satu fokus yang penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai Petani. Dalam hal ini maka diperlukan penyelenggaraan khusus oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut bidang pertanian, karena selain menjadi ikon, pertanian juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ketersediaan sandang dan pangan. Demi mewujudkan hal tersebut maka melalui kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan jasa perkebunan, serta perikanan.



Sumber: BPS Kab. Tanah Laut, 2023

Gambar 2.11 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDBR ADHB Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

PDRB sektor pertanian dipengaruhi fluktuasi produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan serta perikanan) pada setiap tahunnya. Terlihat pada tabel di atas, selama kurun waktu 2018-2022, distribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tanah Laut mengalami fluktuasi. Distribusi tertinggi dicapai pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,58. Penurunan ini tentu memerlukan kebijakan dan tindakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sehingga nantinya sektor Pertanian dapat menjadi sektor dominan untuk menyumbang distribusi PDRB.

Tabel 2.12 Kondisi Produksi Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Tanah Laut, 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Padi (ton)	293.608	271.941	289.645	145.890	143.962
Produksi Jagung (ton)	212.903	238.792	225.084	124.267	122.835
Produksi Kedelai (ton)	-	61	5,7	32	1.670
Produksi Ubi Jalar (ton)	1.535	1.666	1.684	1.707	824
Produksi Ubi Kayu (ton)	600	654	10.501	5.330	4.476
Produksi Kacang Hijau (ton)	66	80	190,3	132	100,3

Produksi Kacang Tanah (ton)	292	477	534	569	252
Produksi Bawang Merah (ton)	77,7	71,4	17,3	36,6	11,00
Produksi Cabe (ton)	1.468,8	1.893	2.128	2.135,5	2.350,90
Produksi Karet (ton)	7.619	8.117	6.920,3	14.324,3	14.601,70
Produksi Sawit (ton)	19.140	21.975	21.192	49.473,7	50.865,7
Populasi Ternak Besar (ekor)	89.757	94.311	106.215	78.769	84.055
Populasi Ternak Kecil (ekor)	25.942	27.548	29.446	29.849	20.451
Populasi Unggas (ekor)	58.656.559	81.990.650	57.320.961	54.989.206	75.680.611
Produksi Daging Ternak (kg)	351.879	287.156	375.665	442.246	603.851
Produksi Telur (kg)	-	85.383.851	99.592.650	116.784.447	75.638.230

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut; BPS Kab.

Tanah Laut, 2023

c. Industri Pengolahan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 kawasan industri atau pusat kawasan ekonomi khusus di Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Kecamatan Jorong. Selain berfungsi sebagai kawasan industri, Kecamatan Jorong juga berfungsi sebagai pusat kawasan industri berat dan pusat kawasan pertambangan. Kawasan ekonomi khusus ini dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor, dan perdagangan dalam rangka mendorong perekonomian suatu wilayah. Lebih dari itu kawasan ekonomi khusus juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, dan juga membangun daya saing dengan memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki. Sedangkan kawasan industri bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Komoditi unggulan industri pengolahan adalah industri pengolahan makanan yang

memiliki jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi terbanyak di Kabupaten Tanah Laut. Walaupun jumlah investasi dan nilai produksi terbesar berada di Kecamatan Bati-Bati lalu setelah itu disusul oleh kecamatan Jorong. Namun demikian, dengan adanya penetapan Kecamatan Jorong sebagai kawasan industri diharapkan kedepannya mampu bersaing dengan Kecamatan Bati- Bati.

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 10.878,50 ha yang terdiri atas kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri menengah, dan kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga. Rencana Kawasan peruntukan industri besar meliputi industri pertambangan dan perkebunan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap. Rencana kawasan peruntukan industri menengah terdiri dari pengembangan industri pengolahan dan industri pertanian di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang dan pengembangan industri pengolahan hasil laut sebagai penunjang minapolitan di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Tambang Ulang. Rencana kawasan peruntukan industri kecil atau industri rumah tangga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut.

Di dalam Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten Tanah Laut 2016-2036 pada rencana pola ruang wilayah, Pembangunan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Pengolahan Hasil Produksi Berorientasi Peningkatan Nilai Ekonomi dan Ekspor dengan program utama Pengembangan Kawasan Agropolitan Jagung di wilayah Pelaihari, Batu Ampar dan Panyipatan. Sedangkan pengembangan Pertanian Lahan Basah di Bumi Makmur, Kurau, dan Panyipatan. Untuk pengembangan Perikanan di Kintap, Swarangan, dan Tabanio serta Industri Pengolahannya di Bati-Bati, jadi belum semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra wilayah untuk pengembangan wilayah industri pengolahan.

2.3 Ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut

Ekosistem Riset dan Inovasi mencakup serangkaian elemen dan interaksi yang menciptakan lingkungan yang mendukung penelitian dan pengembangan serta merangsang inovasi. Ekosistem ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, industri, lembaga penelitian, dan masyarakat umum. Berikut elemen-elemen utama dalam Ekosistem Riset dan Inovasi:

A. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut

Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung penelitian dan inovasi. Insentif fiskal, subsidi, dan kerangka kerja hukum yang jelas dapat merangsang aktivitas riset dan inovasi.

a. Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi

Pembangunan riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut belum mendapat dukungan regulasi yang cukup, baik untuk mendorong pengembangan inovasi sampai dengan monitoring. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan telah diturunkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah. Kondisi regulasi riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut tidak jauh berbeda dengan kondisi SIDA 2016. Kondisi aktivitas riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut belum didukung oleh regulasi/peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang memadai. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut saat ini untuk kelancaran aktivitas riset dan inovasi, masih terus mengupayakan terbentuknya lembaga kelitbangan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Selatan sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan riset dan inovasi.

b. Penataan Basis Data Riset dan Inovasi

Penataan Basis Data Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sangat penting untuk mendukung perkembangan sektor riset dan inovasi. Basis data ini tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk pengelolaan, analisis, dan pertukaran data yang berkaitan dengan kegiatan riset dan inovasi. Beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan dalam penataan basis data riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut. Salah satu aspek penting di dalam penataan basis data riset dan inovasi adalah diperlukannya analisis yang mendalam untuk mengidentifikasi jenis data yang diperlukan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut. Ini dapat mencakup data populasi, sumber daya alam, industri unggulan, dan proyek riset yang sedang berlangsung. Selain itu, efisiensi dan fleksibel desain basis data harus dipertimbangkan untuk memastikan akses data yang cepat dan efisien.

Berdasarkan data hasil Inovasi dan hasil riset di Kabupaten Tanah Laut ada 63 inovasi dan 107 Riset yang tercatat di Tahun 2023, tetapi dari masing-masing

inovasi dan riset di Tahun 2023 tersebut belum dapat dipastikan bahwa di basis data tersebut mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk lembaga riset, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor industri dan belum dapat dijadikan sebagai gambaran menyeluruh mengenai kegiatan riset dan inovasi serta saling adanya pertukaran data yang efektif antarlembaga dan mendukung kolaborasi lintas sektor SKPD di Kabupaten Tanah Laut.

c. Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi

Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi merupakan suatu upaya untuk membangun dan meningkatkan sarana serta prasarana yang mendukung kegiatan riset dan inovasi di suatu negara atau wilayah. **Infrastruktur** ini mencakup berbagai elemen yang esensial untuk mendukung penelitian dan pengembangan, serta untuk mendorong inovasi di berbagai sektor. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi adalah 1) ketersediaan laboratorium dan fasilitas riset, 2) Teknologi Informasi, pengembangan infrastruktur Teknologi informasi yang mendukung pengolahan data dan analisis data serta ketersediaan pusat data dan penyimpanan data yang aman, 3) Infrastruktur transportasi, aksesibilitas yang memudahkan pergerakan peneliti dan materi riset, serta menunjang keterhubungan yang baik antar pusat riset dan inovasi, 4). Pengembangan Kawasan inovasi, yang mendukung kreativitas dan kolaborasi serta ketersediaan insentif untuk menarik Perusahaan dan peneliti. Di Kabupaten Tanah Laut sudah memiliki UPT Laboratorium di DPRKPLH (Lingkungan), tetapi di SKPD lain juga belum terpenuhi tempat untuk pengembangan tempat riset dan inovasi, belum memiliki tempat pembibitan sapi, dan unggas.

d. Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi

Pentingnya penyediaan anggaran riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut, atau di wilayah manapun, sangat relevan untuk mengakselerasi pembangunan berbasis pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023, sudah menyediakan anggaran untuk pendanaan riset dan inovasi di masing-masing SKPD, dengan jumlah inovasi dan riset yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2023 tercatat ada 63 Inovasi dan 107 riset, jika di rata-rata dengan jumlah SKPD yang berjumlah 18, jadi jumlah riset

6 riset dalam satu tahun di tahun 2023 dan rata-rata 3,5 untuk inovasi per SKPD. Di Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah menganggarkan 3 inovasi dengan nilai kematangan minimal 100 dengan anggaran 259 juta.

e. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak hukum yang diberikan kepada pemegangnya untuk melindungi karya atau inovasi intelektual. Ada beberapa jenis HKI yang melibatkan berbagai jenis karya dan kegiatan intelektual. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) dalam konteks riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi hak-hak penemu, dan mendorong keberlanjutan inovasi. Di Kabupaten Tanah Laut sudah ada beberapa produk yang sudah didaftarkan merek dagang sebanyak 140 UMKM, termasuk pisang khas Kabupaten Tanah Laut, dan Gula aren dari Panyipatan dan 28 IKM di daftarkan.

B. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan Inovasi

a. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan; mitra

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan Riset dan Inovasi telah melibatkan perguruan Tinggi, Industri, Lembaga riset dan Masyarakat. Berdasarkan data jumlah inovasi dan riset di Kabupaten Tanah Laut, ada 63 Inovasi dan 107 Riset. Terdapat 4 Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Selatan yang terlibat dalam kegiatan riset, yaitu Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Lambung Mangkurat, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selain dengan Perguruan Tinggi, riset di Kabupaten Tanah Laut kerjasama dengan Lembaga, dan dengan beberapa Industri yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan Kemampuan Daerah

Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut saat ini sudah memiliki UPT Laboratorium di DPRKPLH (Dinas Penelitian. Pengembangan

Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup), tetapi untuk sektor peternakan sarana pembibitan sapi baik sapi perah maupun sapi potong.

C. Kemitraan riset dan Inovasi

a. Penguatan kemitraan antar kelembagaan;

Penguatan kemitraan antar kelembagaan menciptakan fondasi yang kuat untuk kemitraan riset dan inovasi yang efektif, memastikan bahwa berbagai pihak dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan Bersama di bidang riset dan inovasi. Penguatan kemitraan antar kelembagaan dan kemitraan riset dan inovasi memiliki hubungan yang erat dan keduanya dapat saling memperkuat untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam pengembangan riset dan inovasi. Kabupaten Tanah Laut telah banyak menghasilkan inovasi yang berkaitan dengan layanan di beberapa SKPD dengan nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori “Inovatif” selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu masing-masing 52,42 dari nilai 100 pada tahun 2021 dan 52,12 dari 100 pada tahun 2022 tetapi masih belum banyak melibatkan kemitraan antar Lembaga atau SKPD. Kemitraan Riset yang ada di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi, seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Politeknik Negeri Tanah Laut, STIE Indonesia Banjarmasin, dan Universitas Gadjah Mada. Selain itu, dari SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, juga terlibat dalam pengembangan mitra riset dan inovasi di Tahun 2023, yaitu BPKAD Tanah Laut, Disnakerind, Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan, Deputy Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Nasional, BALITBANGDA Prov. Kalimantan Selatan, BPBD KAB. Tanah Laut. Dari Perusahaan yang ada di sekitar Kabupaten Tanah Laut juga banyak terlibat seperti CV. Waigama Konsultan, PT. Daya Cipta Dianrancana, PT. Andra Cipta Consult, PT. Gumilang Sajati, PT. Winaguna Sarana Teknik, CV. Intishar Karya Engineering Consultant, CV. Ganesha Teknik Consultan-Architect-Engineer, PT. Pasya Mitra Utama, PT Setiatama Mega Konsultan, PT. Daya Cipta Dianrancana, Bupati Tanah Laut, CV. Daya Utama Konsultan, Kantor Kementerian Hukum Dan Ham Kalsel, Musfirotun Harjuniati, Biro Hukum Prov. Kalsel, PT. Kinarya Alam Raya, PT. Andra Cipta Consult, CV. Rekhindo Pratama, CV. Smartdev Tala, PT. Inixindo Jogja, PT. Paduraksa Konsultan, PT. Sentratecs, PT. Hegar Daya,

Consulting Engineerings Koperasi Inti Sejahtera, serta CV. Daya Utama Konsultan, sudah berkontribusi terhadap hasil riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut. Budaya riset di Kabupaten Tanah Laut sudah dimulai dengan adanya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan inovasi dan riset, salah satunya Bappeda menginisiasi inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, di koordinir dan diikutsertakan di dalam kegiatan Innovation Government Award (IGA).

Tabel 2.13 Daftar Inovasi Daerah yang Terkirim Melalui Aplikasi Inovation Government Award (IGA) Tahun 2022

No	SKPD	Nama Inovasi Daerah	Nilai Kematangan	Ket
1	Dinas Kesehatan	Survei Indikator PHBS Online oleh Kader (SIP OK)	97.00	Kesehatan
2	RSUD H. Boejasin	Boejasin Informasi Sistem Aplikasi (BISA)	72.00	Kesehatan
3	Bagian PBJ Sekretariat Daerah	Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut (SOSIALITA)	102.00	Fungsi Penunjang Lainnya
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS)	102.00	Adm. Dukcapil, Kominfo
		Desa Tertib Administrasi Kependudukan (DETAK)	86.00	Adm. Dukcapil
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup melalui Nomor WA Pos Pengaduan DPRKPLH	66.00	Lingkungan Hidup
		Layanan Masyarakat Pengaduan Lampu Penenrangan Jalan Umum (LAMPU PJU)	68.00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Sistem Informasi Layanan Online (SIMFONI)	93.00	Kominfo Kepegawaian

		Sistem Informasi Dokumen Kependidikan (SIDIKA)	97.00	Perpustakaan, Kearsipan, Kependidikan
7	Dinas P2KBP3A	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	57.00	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Peningkatan difusi inovasi;

Peningkatan difusi inovasi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kualitas hidup. Difusi inovasi merujuk pada proses di mana ide, produk, atau praktek baru disebarkan dan diterima oleh masyarakat atau organisasi. Difusi inovasi membantu dalam percepatan penyebaran teknologi baru. Semakin cepat teknologi diadopsi, semakin cepat masyarakat dapat mengakses manfaatnya, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kemajuan dalam berbagai sektor. Inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih terkait dengan sistem informasi yang berkaitan dengan masing-masing SKPD. Berdasarkan daftar 63 inovasi di Tahun 2023, 44 Inovasi yang berupa peningkatan layanan berbasis sistem informasi, dan ada 19 atau 30% inovasi dalam bentuk program-program yang berkaitan dengan 3 (tiga) sektor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, yaitu (1) sektor pertambangan, (2) Pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan (3) Industri Pengolahan. Kabupaten Tanah Laut memiliki indeks inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut masuk kategori “Inovatif” dengan nilai belum memuaskan di Tahun 2023 tetapi sudah menjadi arah kebijakan dan program prioritas di Tahun 2024-2026 untuk peningkatan penelitian dan pengembangan daerah serta penguatan inovasi daerah dengan indikator target 3 (tiga) inovasi daerah yang nilai kematangannya minimal 100 dengan rencana anggaran 259 juta.

c. Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah menerapkan beberapa praktik baik yang berkaitan dengan pengembangan riset dan inovasi, beberapa praktik baik yang sudah diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Di Tahun 2023 pada ajang Kalsel Innovation Award (KIA) 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nominasi pada dua kategori, yaitu Gerakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Hijau sebagai upaya pencegahan stunting dan yang kedua kategori Inovasi Masyarakat Umum serta inovasi Program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi (Kijang Mas Tala) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk kategori Inovasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan penghargaan Juara II (dua) untuk Kategori Inovasi Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kijang Mas Tala dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam ajang Kalsel Innovation Award Tahun 2023.
2. Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2023 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Bappeda Tanah Laut melaksanakan Rapat Koordinasi Monev Inovasi Daerah dan Sosialisasi Perbup 66 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dihadiri Perwakilan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) Prov. Kalsel, Bappeda Kab. Tanah Laut selaku koordinator acara dan seluruh perwakilan SKPD di Kabupaten Tanah Laut, dan Skor Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mendapat nilai 52,62 dan berada pada kategori **INOVATIF**.
3. Dilaksanakannya Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Tanah Laut, berupa kegiatan lomba yang dapat mendorong kematangan inovasi daerah dan menjadi pemicu bagi SKPD untuk memunculkan inovasi-inovasi baru.
4. Berperan aktif dalam Ajang penilaian Innovative Government Award (IGA) untuk memperkuat kesiapan Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan Penilaian Indeks Inovasi Daerah & Pemberian Penghargaan IGA, yang dikoordinir oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan inventarisasi semua inovasi SKPD ke dalam database inovasi kabupaten dan apabila dalam penilaiannya bagus maka

akan di ikut sertakan ke ajang inovasi daerah baik Kalsel Innovation Award (KIA) maupun Innovative Government Award (IGA).

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut meraih Juara terbaik ketiga pada ajang penganugerahan Pemenang Kalsel Innovation Award (KIA) Tahun 2022 dengan aplikasi SILAKAS, yang merupakan inovasi pelayanan masyarakat dalam hal pemenuhan dokumen kependudukan.

D. Budaya Riset dan Inovasi

a. Promosi dan Kampanye Inovasi

Membangun budaya riset dan inovasi sangat penting dalam konteks perkembangan dan kemajuan suatu daerah. membangun budaya riset dan inovasi adalah investasi jangka panjang yang dapat membawa dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Itu bukan hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana ide-ide baru dapat tumbuh dan berkembang.

Kabupaten Tanah Laut terus melakukan upaya untuk melakukan promosi dan kampanye inovasi melalui berbagai kegiatan seperti:

1. Aktif berpartisipasi dalam lomba atau ajang inovasi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Kabupaten Tanah Laut berpartisipasi dalam kegiatan Ajang penilaian Innovative Government Award (IGA) dan Kalsel Innovation award (KIA).
2. Mengadakan lomba inovasi daerah untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dan tahun 2023.
3. Melakukan rekapitulasi inovasi yang dilakukan SKPD pada aplikasi Kemendagri dan melihat kaitannya secara langsung dengan aspek ekonomi. Pada tahun 2023 tercatat ada 63 inovasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terekam di Aplikasi Inovasi Kemendagri.

b. Apresiasi Prestasi Inovasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut selalu aktif dalam setiap kegiatan yang mendorong tumbuhnya budaya inovasi, baik di internal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. Pada Tahun 2023 pada ajang Kalsel Innovation Award (KIA) 2023, Pemerintah Kabupaten Tanah

Laut mendapatkan nominasi pada dua kategori, yaitu Gerakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Hijau sebagai upaya pencegahan stunting dan yang kedua kategori Inovasi Masyarakat Umum serta inovasi Program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi (Kijang Mas Tala) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk kategori Inovasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan penghargaan Juara II (dua) untuk Kategori Inovasi Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kijang Mas Tala dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam ajang Kalsel Innovation Award Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan lomba inovasi daerah yang mengundang SKPD di lingkungan Pemkab Tanah Laut untuk mengirimkan inovasi yang diunggulkan untuk mengikuti lomba. Pada lomba inovasi daerah akan dinilai kematangan dan kebermanfaat inovasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan apresiasi dalam bentuk uang pembinaan kepada pemenang lomba dalam rangka memberikan motivasi dan membangun budaya riset dan inovasi di daerah.

c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset

Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset juga dapat dilakukan untuk menguatkan budaya riset dan inovasi di daerah. Pengembangan perusahaan pemula (startup) berbasis riset di daerah sangat penting dalam mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan solusi terhadap tantangan atau masalah khusus yang dihadapi oleh daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum secara khusus melakukan kegiatan yang mengarah pada pengembangan perusahaan pemula berbasis riset ini. Padahal tujuan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di daerah ini sangat penting, di antaranya:

1. Penciptaan Lapangan Kerja Lokal: Perusahaan pemula berbasis riset cenderung mempekerjakan individu dengan latar belakang pendidikan tinggi dan keterampilan khusus. Dengan membuka startup di daerah, tercipta peluang kerja baru dan meningkatkan keterlibatan sumber daya manusia lokal.

2. **Inovasi dan Pengembangan Produk:** Perusahaan pemula berbasis riset seringkali menghasilkan produk atau layanan yang inovatif. Tujuan utama adalah memberikan solusi baru atau meningkatkan cara tradisional melakukan sesuatu. Inovasi ini dapat berasal dari penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi di tingkat lokal.
3. **Pengembangan Ekosistem Startup:** Dengan mendukung perusahaan pemula, daerah dapat membangun ekosistem startup yang kuat. Ini mencakup ketersediaan dana riset, fasilitas inkubator bisnis, akses ke mentor dan ahli industri, serta hubungan yang erat antara perusahaan pemula, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah.
4. **Mendorong Investasi:** Keberhasilan perusahaan pemula seringkali menarik minat investor. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di daerah dapat menjadi faktor daya tarik bagi investor lokal maupun nasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
5. **Penyelesaian Tantangan Lokal:** Perusahaan pemula berbasis riset dapat fokus pada pengembangan solusi untuk masalah atau tantangan yang spesifik bagi daerah tersebut. Ini dapat mencakup solusi untuk masalah lingkungan, kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur yang unik untuk daerah tersebut.
6. **Peningkatan Daya Saing:** Dengan mendorong inovasi melalui perusahaan pemula berbasis riset, daerah dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional. Produk atau layanan yang unggul secara teknologi dapat menarik perhatian pasar yang lebih luas.
7. **Pemberdayaan Sumber Daya Lokal:** Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dapat memberdayakan sumber daya lokal, terutama talenta muda dan profesional di daerah tersebut. Ini menciptakan lingkungan di mana orang-orang lokal merasa didorong untuk berkontribusi pada inovasi dan pembangunan daerah mereka sendiri.

d. Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.

Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan teknologi masyarakat merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa

kekayaan intelektual dan inovasi lokal diberdayakan dan dijaga. Metode dan pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Inventarisasi Pengetahuan Lokal melalui Studi Etnografi dan Antropologi untuk mengidentifikasi dan mencatat pengetahuan tradisional, praktik lokal, dan inovasi yang ada.
2. Pengembangan Pengetahuan Lokal melalui pelatihan dan pendidikan. Membangun kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendidikan terkait dengan pengetahuan lokal dan teknologi yang dimiliki oleh mereka.
3. Perlindungan Pengetahuan Tradisional melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil riset dan inovasi masyarakat.

E. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut

Keterpaduan riset dan inovasi di daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang memiliki keunggulan dalam pertanian dan perikanan. Beberapa produk dan komoditas unggulan tersebut antara lain padi, jagung, sapi potong, ayam pedaging, ayam petelur, perikanan laut dan perikanan tambak. Selain itu produk olahan pertanian dan perikanan juga menjadi produk unggulan Tanah Laut yang dikembangkan sebagai produk turunan pertanian dan perikanan. Pengembangan riset dan inovasi diharapkan dapat mendukung promosi produk unggulan daerah tersebut dalam kerangka pemenuhan ketahanan pangan daerah dan ketahanan pangan nasional. Promosi produk unggulan dilakukan melalui pameran produk lokal, pasar rakyat, pekan nasional pertanian (PENAS TANI), dan kegiatan lainnya. Kabupaten Tanah Laut juga memiliki wadah promosi produk unggulan daerah yang bertempat di Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Jl. A. Yani, Pelaihari, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Gambar 2.13)



Gambar 2.12 Gedung Dekranasda Kabupaten Tanah Laut

Terobosan inovasi untuk mempromosikan produk juga dapat dikembangkan melalui kanal online seperti website, youtube, media sosial dan optimalisasi pemanfaatan marketplace bagi pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut.

a. Kluster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah

Pengembangan riset dan inovasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah. Kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah akan mampu mengoptimalkan sumber daya untuk penguatan riset dan inovasi yang tepat sasaran mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan untuk mengembangkan produk unggulan lokal. Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa produk unggulan daerah tanah laut yang akan dikembangkan adalah pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dan perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya). Daerah Pesisir dapat diarahkan untuk pengembangan perikanan, sedangkan daerah daratan dan pegunungan diperuntukkan untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

b. Kesesuaian Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pengembangan riset dan inovasi di daerah harus selaras dan saling menguatkan dengan prioritas utama riset nasional 2017-2045. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung program daerah dan program nasional. Salah

satu kebijakan nasional yang berdampak signifikan bagi Kabupaten Tanah Laut adalah pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kebijakan pemindahan Ibu kota Negara yang tengah direncanakan oleh pemerintah memberikan dampak ekonomi yang besar pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru ke Kalimantan diharapkan dapat memberikan efek positif karena adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum termanfaatkan serta diprediksi akan meningkatkan perekonomian daerah di wilayah Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur ini membutuhkan dukungan logistik kepada IKN dari wilayah sekitarnya termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga memerlukan persiapan penyangga pangan baru. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan juga diharapkan akan berperan sebagai *hinterland* pemasok kebutuhan logistik pangan kepada IKN di Kalimantan Timur, salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi sentra produksi pangan adalah Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut memiliki produk-produk pertanian yang sangat banyak seperti perkebunan, hortikultura dan peternakan disamping potensi perikanan tangkap. Diharapkan dengan mulai berjalannya roda pemerintahan di IKN baru nantinya, tidak mendatangkan pangan dari wilayah lain di luar Pulau Kalimantan dan kebutuhan pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Selatan sendiri, sehingga, ibu kota negara baru akan menuju kemandirian pangan. Untuk menyediakan kebutuhan logistik kepada IKN diperlukan persiapan penggunaan dan pemanfaatan ruang untuk kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan dengan menggunakan teknologi pertanian modern serta menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul untuk menopang kebutuhan tenaga kerja di IKN.

F. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

a. Isu-isu internasional yang berpengaruh pada Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Pengembangan riset dan inovasi daerah, selain harus relevan dengan permasalahan dan isu yang ada di tingkat daerah dan nasional, juga harus dapat menjawab isu dan permasalahan yang dihadapi dunia. Isu strategis di tingkat di

dunia antara lain dapat dilihat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan global terkait pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *No One Left Behind*. Ada 17 isu strategis (Gambar 2.14) yang masuk dalam SDGs yaitu:

1. Tidak ada Kemiskinan (No Poverty)
2. Tidak ada Kelaparan (Zero Hunger)
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Well-being)
4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
5. Kesetaraan Gender (Gender Equality)
6. Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation)
7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth)
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure)
10. Pengurangan Ketidaksetaraan (Reduced Inequality)
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities)
12. Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production)
13. Tindakan untuk Iklim (Climate Action)
14. Kehidupan di Bawah Air (Life Below Water)
15. Kehidupan di Darat (Life on Land)
16. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (Peace, Justice, and Strong Institutions)
17. Kerjasama Internasional untuk Pencapaian Tujuan (Partnerships for the Goals)



Gambar 2.13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developments Goals

Pemilihan tema prioritas pemajuan IPTEK di bidang Pangan yang mendukung ketercapaian ketahanan pangan (*Food Safety*), sangat relevan dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas riset nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

b. Penguatan Kerjasama Internasional

Kerjasama diperlukan untuk mempercepat pengembangan riset dan inovasi di daerah. Penguatan kerjasama bertujuan untuk mendapatkan ide dan gasaran riset terkait pengembangan daerah, mengisi SDM tenaga ahli riset serta mengatasi keterbatasan infrastruktur riset dan inovasi yang ada di daerah. Pada saat ini, Kabupaten Tanah Laut sudah melakukan berbagai kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat, Polteiknik Negeri Tanah Laut, Universitas Muhammdiyah Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, STIE Indonesia Banjarmasin, Universitas Gadjah Mada serta beberapa Lembaga Riset Swasta. Pada masa depan, perlu dikembangkan juga kerjasama internasional untuk menguatkan jejaring pengembangan riset dan inovasi daerah terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah.

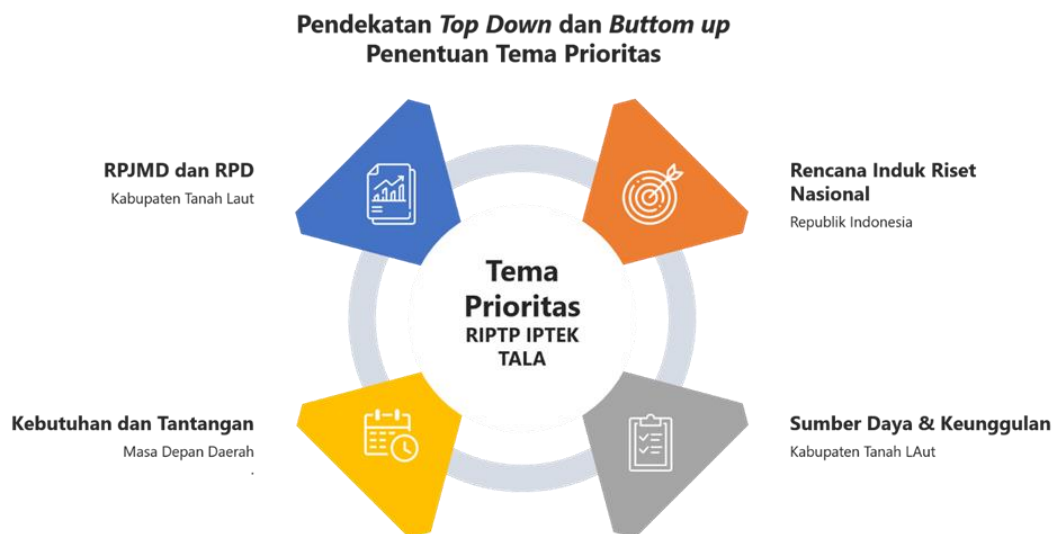
2.4 Penentuan Tema Prioritas Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK

Prioritas dalam pembangunan IPTEK sangat penting karena sumber daya yang terbatas harus dioptimalkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penentuan prioritas dalam pemajuan IPTEK bertujuan untuk mempercepat pencapaian target-target strategis yang ditetapkan, sehingga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Prioritas dalam pembangunan IPTEK dapat diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus mengembangkan potensi dan sumber daya daerah yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Oleh karena itu, pada penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Kabupaten Tanah Laut, ditentukan tema prioritas untuk meningkatkan efektivitas dan kemanfaatan program pengembangan IPTEK, riset dan inovasi daerah. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan Kabupaten Tanah Laut dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana induk dan peta jalan ini menjadi penting karena pembangunan di daerah membutuhkan perencanaan sektoral untuk mengintegrasikan langkah-langkah yang terpadu dan terintegrasi, khususnya antar perangkat daerah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.

Penetapan tema prioritas dalam rencana induk dan peta jalan pemajuan IPTEK ini ditentukan dengan pendekatan holistik, lintas institusi, lintas ranah dan berdasarkan fokus riset. Hal ini dilakukan karena tidak semata-mata hanya untuk mengakomodasi semua pihak pelaku riset, tetapi lebih utama lagi adalah untuk mensinergikan seluruh kekuatan yang ada agar mendapatkan hasil yang optimal di tengah keterbatasan sumberdaya.

Penetapan tema prioritas dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Kabupaten Tanah Laut dilakukan melalui dua pendekatan, yakni top-down dan bottom-up. Proses top down dilakukan dengan cara menetapkan prioritas sesuai dengan rencana induk riset nasional 2017-2045. Selain itu pendekatan ini juga dilakukan dengan merujuk pada dokumen RPJMD serta RPD Kabupaten Tanah Laut. Di sisi lain, pendekatan bottom-up dilakukan dengan melihat potensi kekuatan dan sumber daya yang ada mengacu pada data riil sumber daya dan keunggulan daerah sampai dengan tahun 2023. Penetapan tema prioritas ini juga mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah di masa yang akan datang.



Gambar 2.14 Pendekatan Top Down dan Bottom Up Penentuan Tema Prioritas

Pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 disebutkan bahwa ada 9 bidang riset yang menjadi sasaran riset nasional yaitu pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, dan bidang Riset lainnya yang ditetapkan Menteri (Gambar 2.16) Bidang riset ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi Bangsa Indonesia di masa sekarang dan yang akan datang, termasuk di Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 2.15 Tema Prioritas Riset Nasional 2017-2045

Selaras dengan rencana riset nasional di atas, salah satu isu strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Tanah Laut 2018-2023 adalah Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal yang memberi prioritas khusus pada pencapaian ketahanan pangan (*food security*). Komoditas pertanian yang dimaksud merupakan komoditas agrokomplek yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026 juga disebutkan bahwa salah satu program prioritas daerah Kabupaten Tanah Laut adalah meningkatkan laju pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

Di sisi lain, data BPS Kabupaten Tanah Laut menunjukkan sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian wilayah karena mampu memberikan sumbangan pada PDRB sebesar 19,20%. Sektor pertanian juga dipandang memiliki kontribusi yang besar untuk mengatasi problem kemiskinan di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Jika sektor agro dapat dikelola dengan baik dan ditingkatkan dengan riset dan inovasi yang sesuai maka produktivitas dan nilai tambah sektor agro dapat meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer maupun industri olahannya serta jasa-jasa terkait. Peningkatan pendapatan pelaku usaha sektor-sektor terkait dapat dipastikan akan berdampak pada pengurangan status kemiskinan. Kontribusi sektor agro menjadi sangat penting pada pembangunan ekonomi terutama terkait dengan strategi pengurangan kemiskinan karena sektor agro menampung sebagian besar angkatan kerja hingga mencapai 49% dari total jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut (BPS, 2022).

Berdasarkan pertimbangan terhadap prioritas riset nasional tahun 2017-2045 dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdapat di RPJMD dan RPD Kabupaten Tanah Laut yang mencantumkan pangan sebagai prioritas utama, serta melihat potensi sumber daya alam dan keunggulan daerah tanah laut di bidang pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kehutanan) dan perikanan, maka ditetapkan tema prioritas Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan IPTEK Kabupaten Tanah Laut adalah Riset dan Inovasi Bidang Pangan yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan.

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

3.1 Tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang

A. Tantangan

Pemanfaatan Riset dan Inovasi di kabupaten Tanah Laut menghadapi beberapa tantangan, baik berasal dari internal maupun eksternal. Tantangan pemanfaatan tersebut terbagi menjadi beberapa poin berikut:

1. Pengelolaan Inovasi

Perencanaan dan pengembangan inovasi peningkatan komoditas pertanian di Tanah Laut belum berdasarkan perencanaan berjangka. Belum tersedianya dokumen makr yang mengatur pengembangan inovasi menyebabkan belum adanya konektivitas satu inovasi dengan inovasi lainnya. adanya pengelolaan inovasi ini akan berpengaruh pada:

- a. Cita-cita Tanah Laut untuk dapat menjadi Lumbung padi Daerah
- b. Mitigasi resiko gagal panen yang dipengaruhi oleh cuaca, kondisi perairan dan hama
- c. pemanfaatan lahan pertanian rawa dan pasir sebagai area pertanian
- d. pengelolaan hasil ikan tangkap
- e. pengendalian inflasi

2. Pemetaan dan Desain berbasis Teknologi Informasi

Potensi duplikasi inovasi sangat mungkin terjadi akibat belum adanya sistem satu pintu yang memonitor perencanaan dan pengembangan inovasi di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Belum terbentuknya aplikasi yang memonitor mulai dari perencanaan, penyelenggaraan hingga evaluasi inovasi menyebabkan inovasi sangat mungkin terduplikasi yang menyebabkan inovasi berbiaya tinggi. Langkah kecil dalam pemetaan riset dan inovasi adalah pada sisi:

- a. Update data komoditas unggulan Tanah Laut
- b. Integrasi hasil pertanian dan perikanan serta peternakan

3. Dukungan dan Promosi

Budaya berinovasi belum terbentuk dan tersebar secara luas di Tanah Laut. adanya asumsi pada masyarakat bahwa produk yang dihasilkan tanpa inovasi telah memiliki nilai jual telah menjadi penghambat dalam pengembangan produk. Oleh karena itu pengembangan inovasi dalam bidang pertanian harus senantiasa dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai jual produk. Tantangan pada Dukungan dan promosi di antaranya:

- a. Pengolahan produk dengan edukasi teknologi pasca panen
- b. Edukasi dan optimasi pemanfaatan pakan ternak hasil fermentasi
- c. Ketersediaan mitra kerjasama pemasaran produk
- d. Upaya peningkatan peternakan produktif

4. Kompetensi inovasi yang rendah

Kompetensi sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kompetensi seorang inovator atau pengelola inovasi. Pengembangan SDM masih minim mengarah terhadap peningkatan kompetensi inovasi. Tantangan peningkatan kompetensi inovasi meliputi:

- a. Optimasi pemanfaatan pakan ternak hasil fermentasi
- b. Peningkatan kualitas dan keterampilan UMKM
- c. Optimalisasi kreasi dan inovasi produk hasil ternak dan hutan

B. Peluang

Pengembangan inovasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menjadi kebutuhan dalam menjawab tantangan pembangunan regional maupun nasional. Target pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs) mensyaratkan pengembangan inovasi untuk menjawab setiap target area SDG. SDGs juga membuka kolaborasi nasional dalam pengembangan inovasi daerah.

Pengembangan inovasi nasional sesuai dengan arah Presiden RI juga mendorong pembangunan inovasi di daerah. Ketertinggalan pembangunan hanya bisa dijawab dengan pembangunan berbasis inovasi. Begitu juga di pemerintah, menjawab permintaan peningkatan komoditas pertanian hanya bisa ditindaklanjuti dengan pengembangan inovasi pertanian. Tata kelola juga harus diperkenalkan inovasi sehingga proses bisnis pemerintah berjalan efektif dan efisien.

Kabupaten Tanah Laut sebagai daerah yang memiliki potensi unggul dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan sebaiknya selalu melakukan riset dan inovasi dalam meningkatkan produktivitas di sektor tersebut. Hal ini tentunya didukung dengan peluang yang sangat menjanjikan dan realistis jika dilakukan dengan serius bersama mitra-mitra baik perguruan tinggi, sekolah, atau mitra swasta (industri) guna mendapatkan hasil kajian dan rancangan inovasi yang bisa menjadi kebijakan berbasis bukti untuk dasar pengembangan daerah di masa akan datang. Berikut ini adalah peluang-peluang yang diperoleh dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi di masa akan datang:

1. Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan produktivitas di sektor unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan).

Sebagai daerah yang memiliki jumlah daratan luas dengan kondisi Tanah yang relatif subur memberikan peluang dalam mengembangkan produktivitas (kualitas dan kuantitas) di bidang pertanian. Peningkatan produktivitas ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan hasil riset dan inovasi di bidang pertanian yang berfokus pada pengembangan teknologi, praktik pertanian yang lebih efisien dan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas berbasis riset:

- a. Menggandeng Perguruan tinggi dalam melakukan riset terhadap varietas tanaman yang unggul, tahan hama, tahan perubahan iklim dan produksi hasil panen yang lebih tinggi. Selain itu perguruan tinggi juga dapat membantu dalam mengembangkan teknologi pertanian terbaru yang berbasis digital (*internet of things*) dalam melakukan pemantauan (*monitoring*), prediksi lingkungan (suhu, cuaca, kelembaban).
- b. Produktivitas juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tanah yang digunakan pada area pertanian. Selain itu juga riset dapat berperan dalam hal mengatur pola tanam, pengomposan dan rotasi tanaman untuk meningkatkan kesuburan.
- c. Perlu adanya riset terkait dengan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan. Seperti halnya riset tentang manajemen air yang lebih efisien, penggunaan pupuk yang tepat, pengelolaan tanah yang berkelanjutan untuk memaksimalkan hasil pertanian.
- d. Riset dan inovasi dalam hal penanggulangan hama penyakit juga menjadi peluang yang sangat besar. Sebagian besar kegagalan panen di kabupaten Tanah Laut disebabkan oleh kegagalan dalam menanggulangi hama/organisme yang merugikan. Selain hal

tersebut perlunya juga riset yang dapat menemukan inovasi dalam mengembangkan pestisida organik untuk mendukung keberagaman hayati dan kualitas tanah.

Pada sektor perikanan, Tanah Laut memiliki panjang garis pantai sekitar 200 km. Hal ini menjadikan Tanah Laut Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki area lautan yang luas di Kalimantan Selatan. Selain itu di Tanah Laut juga terdapat banyak daerah muara sungai merupakan pertemuan antara air laut dan air tawar yang cocok untuk habitat produktif dan penting untuk mendukung biota air. Jika dilihat dari produksi hasil tangkapan ikan maka Tanah Laut menyumbang produksi tangkap baik di laut atau air tawar yang selalu meningkat setiap tahunnya walaupun masih dibawah daerah Kotabaru.

Pasar domestik yang cukup luas terhadap permintaan hasil produksi tangkap ikan juga menjadi peluang yang terbuka. Hasil perikanan yang dapat diolah menjadi produk yang bernilai tinggi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini perlu adanya kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi terhadap hasil produksi ikan di Tanah Laut yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas, menaikkan nilai tambah hasil produksi ikan, diversifikasi hasil perikanan menarik, dan menemukan ciri khas produk perikanan dari daerah Tanah Laut.

Pada sektor peternakan Tanah Laut memiliki data produksi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari sektor ternak sapi dan kambing, Kabupaten Tanah Laut memiliki keunggulan diantaranya secara geografis cocok untuk ternak sapi yang menyediakan pakan dan lahan hijauan yang luas, banyak peternak sapi dan kambing yang secara mandiri atau tergabung dalam kelompok tani. Jika dilihat dari segi pendukung lain maka adanya Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) sangat membantu dalam penanggulangan penyakit atau permasalahan kesehatan pada hewan ternak, adanya rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi, terdapat lembaga pemerintah seperti BPTU-HPT, SNAKMA, dan perguruan tinggi dalam membantu secara teknis dalam peningkatan produktivitas ternak.

Peluang lain yang dapat menjadi penguat dimasa akan datang dalam menerapkan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas ternak ini yaitu permintaan pasar yang terus meningkat. Melihat dari sisi geografis Tanah Laut berada dekat dengan ibukota provinsi dan kotamadya seperti Banjarmasin yang memiliki populasi yang padat dan memiliki permintaan tinggi terhadap daging sapi, kambing, dan unggas. Hal ini mendorong peternak untuk terus secara berkelanjutan mengembangkan ternak mereka untuk dijual secara berkala untuk memenuhi permintaan pasar seperti daerah-daerah lokal Tanah Laut

Sendiri atau sekitarnya. Selain itu keberadaan Kalimantan Selatan Sebagai daerah yang dekat dengan IKN maka wilayah tersebut bisa dipastikan akan membutuhkan suplai hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan. Hal ini tentunya akan menjadi peluang strategis untuk terus mengoptimalkan produktivitas unggulan yang mampu mensejahterakan masyarakat.

2. Peluang investasi industri berbahan baku lokal di Tanah Laut terus berkembang.

Melimpahnya bahan baku seperti jagung, singkong, dan tanaman-tanaman hortikultura lain memberikan dampak kepada investor untuk melakukan investasi di Tanah Laut. Hal ini menjadi nilai positif bagi kesejahteraan masyarakat dan sektor-sektor primer yang berkaitan dengan bidang industri tersebut. Hal ini bisa terlihat dengan keberadaan perusahaan seperti Cheil Jedang Indonesia dan JAPFA Comfeed yang bergerak dalam pembuatan pakan ternak untuk mensuplai ternak-ternak khususnya unggas di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Ada juga perusahaan PT. Cahaya Borneo Sukses Agrosindo (CBSA) yang mengolah singkong menjadi tepung tapioka. Dalam hal ini peluang riset dan inovasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam membangaun dan mengelola usahanya di wilayah Tanah Laut.

3. Adanya lembaga Mitra Riset Bersama

Kementerian seperti Balai Pembibitan Ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT), dan lembaga pendidikan Politeknik Negeri Tanah Laut, SNAKMA, ULM dan perguruan tinggi lain di Kalimantan Selatan yang dapat dijadikan mitra kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut. Ini merupakan peluang dalam mengembangkan produk unggulan dengan kolaborasi SDM, laboratorium dan hilirisasi produk kepada masyarakat.

4. Adanya kebijakan pusat yang mengamanatkan daerah untuk menerapkan budaya riset dan inovasi di lingkungan pemerintahan.

Melalui Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional no 5 tahun 2023 pasal 24. Kebijakan ini menjadikan Tanah Laut secara bertahap akan menerapkan budaya riset di lingkungannya. Budaya riset ini merupakan struktur yang memberikan signifikansi terhadap perilaku penelitian, dan yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengevaluasi kegiatan penelitian. Sehingga budaya tersebut tidak hanya akan berefek pada

institusi yang terbatas, tidak hanya sekelompok komunitas maupun unsur unsur lainnya yang melihat pentingnya penelitian bagi masyarakat khususnya di Tanah Laut. Budaya riset ini lah yang mampu memberikan lingkungan sebuah dukungan terhadap manfaat dari produk penelitian tersebut (hilirisasi), baik perencanaannya, produknya maupun penghargaan.

Dalam pelaksanaannya budaya riset ini membutuhkan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah Tanah Laut agar dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dari *Hanover Research* setidaknya ada 3 hal yang diperlukan di antaranya yaitu:

- a. Pertama. Budaya riset membutuhkan baik pemimpin kelembagaan maupun unit unit yang berada di bawahnya untuk dapat menetapkan sejelas-jelasnya tujuan penelitian, yang selanjutnya dapat dikomunikasikan secara efektif (*a culture of research requires both institutional and unit-based leaders to set clear research goals and communicate them effectively*). Tujuan tersebut harus disertai dengan rencana yang didefinisikan dengan baik evaluasi dari keberhasilan penelitian tersebut, serta kompensasi perubahan yang menyertainya.
- b. Kedua. Budaya riset membutuhkan waktu bertahun tahun untuk dapat berkembang dengan baik, ketika sudah terbentuk, membutuhkan pemeliharaan rutin (*a culture of research may take years to develop and, once established, requires regular maintenance*). Kebijakan baru yang berkaitan dengan penelitian harus selalu ditegakkan dengan teratur dari waktu ke waktu, sebelum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ketika kebijakan tersebut relevan dan diterima, maka pemerintah daerah harus siap dengan segala tantangan yang akan dihadapi dari implementasi kebijakan tersebut, seperti memelihara dana penelitian dengan baik, mengembangkan kemitraan dengan lembaga terkait untuk memperluas kesempatan penelitian, serta menghadapi perubahan politik dari kelembagaan.
- c. Ketiga. Dalam merencanakan budaya harus mencakup pertimbangan bagaimana proaktif untuk selalu melibatkan para pelajar (mahasiswa, siswa) (*Plans for a culture of research should include consideration of student involvement*)

3.2 Kondisi Ekosistem Riset yang Diharapkan

Tabel 3.1 Kondisi dan Ekosistem Riset yang Diharapkan

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
1	Evidence-based policy	Kebijakan infrastruktur riset dan inovasi daerah: Kebijakan riset masih tertuju pada sistem inovasi daerah dan masih tertuju pada bidang pariwisata yang terdapat pada dokumen sistem inovasi daerah (SIDA).	Adanya kebijakan terkait riset dan inovasi di pusat yang dapat menjadi acuan dalam menyusun peta jalan riset dan inovasi di daerah Kebijakan pemerintah dalam memberikan fasilitas pendaftaran HKI untuk hasil penelitian dan inovasi menjadi peluang untuk terus melindungi hak intelektual para inventor.	Kebijakan seharusnya mencakup juga untuk kegiatan riset dan inovasi yang terintegrasi, yang diikuti oleh kebijakan penyediaan infrastruktur riset dan inovasi. Penyediaan kebijakan yang terintegrasi akan membuat penelitian akan lebih terarah sesuai dengan peta jalan riset nasional, peta jalan Kalimantan selatan dan peta jalan Tanah Laut. Kegiatan riset dan inovasi ini perlu juga dilindungi terkait dengan paten, Hak cipta dan juga merek agar kekayaan intelektualnya diakui dan menjadi ciri khas Kabupaten Tanah Laut
		Kebijakan kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi daerah : Kebijakan kelembagaan riset masih belum fokus untuk	Kebijakan pemerintah daerah Tanah Laut terbuka dalam bekerjasama dengan pihak manapun baik dalam kajian atau penyusunan kebijakan-kebijakan	Perlu adanya kebijakan yang mengatur terkait kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan mitra di berbagai kepentingan seperti Perguruan Tinggi, Balai kementerian dan sektor industri.

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
		kegiatan pengembangan riset dan inovasi bidang unggulan daerah. Daya dukung riset dan inovasi belum bekerja dengan optimal, karena belum didukung sumberdaya manusia sebagai pelaksana riset yang berhubungan dengan keunggulan daerah.		Kebijakan ini juga terkait dengan standar pemenuhan infrastruktur riset dan inovasi sesuai kemampuan daerah. Pemenuhan ini bisa dilakukan secara bertahap dan melakukan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi dengan saling menguntungkan.
		Kebijakan kemitraan riset dan inovasi: Kebijakan terkait kompetensi SDM pemerintah daerah yang berhubungan dengan penelitian produk unggulan masih belum disebutkan. Kebijakan untuk proses hilirisasi hasil penelitian dan inovasi dalam menunjang keunggulan produk daerah masih belum dijelaskan.	Pemerintah daerah memiliki rencana kerja dalam melakukan diseminasi produk hasil riset melalui dinas PMD setiap tahunnya.	Perlunya kebijakan yang mengatur terkait dengan penguatan kemitraan antar kelembagaan; peningkatan difusi inovasi (hilirisasi produk); dan peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
		Kebijakan budaya riset dan inovasi : Belum adanya kebijakan yang mengatur terkait hilirisasi	Adanya program kerja pemerintah dalam melakukan promosi inovasi ke beberapa kecamatan melalui program Lomba Teknologi Tepat Guna setiap tahunnya.	Perlunya kebijakan promosi dan kampanye inovasi; apresiasi prestasi inovasi; pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan inventarisasi, pengembangan, dan

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
		produk dari inventor untuk menjadi startup baik dari produk unggulan atau diluar dari itu.	Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran untuk reward bagi inventor terbaik.	perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
		Kebijakan keterpaduan dan koherensi riset dan inovasi di daerah: Belum ada kebijakan daerah Kabupaten Tanah Laut yang mengatur terkait dengan keterpaduan dan koherensi. Belum adanya kebijakan yang mengatur terkait dengan klusterisasi yang berfokus pada sektor produk-produk unggulan daerah	Adanya panduan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peta jalan riset dan inovasi di daerah yaitu dengan adanya Rencana Induk Riset Nasional, PerBRIN no 5 tahun 2023, RPJMD dan RPD Kalsel, dan RPJMD dan RPD Tanah Laut. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjadi dasar untuk memadukan antara riset nasional dan riset daerah.	Perlunya kebijakan pemerintah kabupaten tanah Laut dalam mengatur prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah; penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
		Kebijakan keselarasan dan perkembangan global : Kebijakan kerjasama terkait dengan mitra Internasional belum ada dikarenakan belum dengan proses evaluasi dan anggaran. Kerjasama internasional belum menjadi prioritas dikarenakan anggaran yang besar dalam proses pelaksanaanya	Pelaksanaan kerjasama dengan Internasional sudah pernah terjalin, sehingga akan mudah untuk menindaklanjuti	Perlunya kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mengatur terkait dengan peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah; dan penguatan kerjasama internasional.

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
2	Tema prioritas yang dipilih daerah : Pangan (<i>Foods</i>)			
Kondisi ekosistem riset dan inovasi yang mendukung penguatan tema prioritas				
A	Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah	Sudah adanya kebijakan/regulasi terkait riset di kabupaten Tanah Laut hasil turunan Peraturan Presiden dan Peraturan Badan Riset Inovasi Nasional tetapi belum menyebutkan secara khusus untuk pemajuan produk unggulan	Kebijakan yang berbasis pada riset dan inovasi telah memiliki payung hukum oleh pemerintah pusat melalui perpres no 38 tahun 2018 dan Peraturan BRIN no 5 tahun 2023,	Adanya kebijakan terkait dengan riset dan inovasi berbasis bukti (<i>Evidence-based policy</i>) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut untuk menentukan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah
		Inventarisasi terhadap hasil riset dan inovasi daerah dalam bentuk database masih belum terintegrasi.	Keberadaan dinas kominfo dan bappeda dapat berperan dalam melakukan pengelolaan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan inventarisasi terkait dengan produk-produk hasil riset dan inovasi sesuai dengan tempat dan prioritas daerah	Perlunya membangun dan menjaga database yang komprehensif, terorganisir dan terintegrasi akan sangat membantu dalam mengelola, mengakses, dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi secara lebih efektif dalam mendukung pengembangan daerah dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.
		Belum tercukupinya terkait Infrastruktur dasar dalam mendukung riset dan inovasi (laboratorium) di beberapa SKPD lain guna mendukung penelitian dan pengembangan serta mendorong inovasi di masing-masing bidang.	Adanya peluang prioritas pengembangan produk unggulan yang akan menjadi leading sector di Kabupaten Tanah Laut, seperti Peternakan (sapi dan kambing), Pertanian (jagung) dan perikanan	Penting adanya laboratorium dasar untuk sektor unggulan di Tanah Laut yang akan menjadi pusat riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor unggulan atau yang lainnya misal pembibitan sapi unggul

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
		Ada beberapa SKPD di kabupaten Tanah Laut belum menganggarkan terkait riset dan inovasi	Keberadaan institusi pendidikan seperti Politeknik Negeri Tanah Laut, SPP (Snakma), ULM dan perguruan tinggi lain di Kalsel dapat menjadi mitra kerjasama dalam melakukan riset dan inovasi dengan memanfaatkan lab/infrastruktur dasar yang ada disana. Sudah menjadi prioritas dalam RPD terkait peningkatan dana riset di masing-masing SKPD dengan rata-rata hasil riset 3,5/SKPD pada tahun 2023. Selain itu adanya peluang untuk kegiatan inovasi dengan nilai matang 100 yang tertuang dalam RPD 2024-2026 sebesar 259 juta sebanyak 3 inovasi.	Adanya kinerja efektif dan efisien yaitu dengan kolaborasi (lab dan SDM) antara perguruan tinggi, sekolah atau industri dengan peneliti yang ada di SKPD-SKPD dalam melakukan peneliti dan pengembangan produk unggulan di Kabupaten Tanah Laut. Adanya tambahan dana riset dan inovasi di berbagai sektor unggulan untuk melakukan penemuan dan inovasi produk dengan kerja-kerja/output yang terukur jelas.
B	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset inovasi	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi bersama mitra memiliki tantangan tersendiri seperti mencari mitra yang tepat, keterbatasan sumberdaya dan finansial, keterbatasan infrastruktur dan sumberdaya manusia (SDM). Kekurangan SDM juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan riset dan inovasi, sehingga perlu adanya kolaborasi.	- Adanya perguruan tinggi yang ada di Kalimantan selatan atau khususnya di Tanah Laut seperti Politeknik Negeri Tanah Laut yang dapat berkolaborasi dalam menyusun perencanaan riset dan inovasi bersama. Kedekatan perguruan tinggi ini dilihat dari geografisnya maka akan memudahkan dalam komunikasi dan menghemat biaya operasional riset. - Adanya dana pusat baik di kementerian maupun lembaga penelitian seperti BRIN yang dapat dikompetisikan dengan melakukan	Terbentuknya sistem kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan produk unggulan (inovasi) antara Perguruan tinggi, sekolah dan industri dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menanggulangi masalah infrastruktur, kompetensi dan kurangnya SDM/peneliti yang di pemerintah daerah. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan melakukan MoU dan dilanjutkan dengan penyusunan proyek/program kerja bersama dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ketercapaian

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
			kolaborasi antara Pemerintah daerah tanah Laut dan perguruan tinggi di sekitarnya	yang akan dimasukkan dalam rencana kerja anggaran di pemerintah daerah.
C	Kemitraan riset dan inovasi	Belum terukurnya dampak dan keberhasilan terkait dengan Kemitraan antar lembaga dalam peningkatan difusi inovasi, praktik baik dan diseminasi hasil riset serta inovasi kepada pelaku inovasi	- Adanya lembaga yang dapat dijadikan mitra untuk kolaborasi di wilayah Tanah Laut dan sekitarnya dalam pelaksanaan riset dan pengukuran dampak riset yang dilakukan. - Adanya panggung kolaborasi untuk melakukan diseminasi hasil riset dan penelitian di masing-masing perguruan tinggi dan disebarkan melalui program Tri Dharma yang ada di perguruan tinggi sehingga efektif dalam distribusi informasinya.	- Kemitraan ini menjadi sangat penting dalam menyelaraskan ekosistem riset dan inovasi di daerah Kabupaten Tanah Laut. Melalui kemitraan ini makan akan disusun secara bersama terkait dengan rencana penelitian bersama dengan prinsip keterbukaan dan komunikasi yang aktif, kesesuaian tujuan dan visis misi bersama, adanya timbal balik yang saling menguntungkan, dan adanya pengukuran evaluasi dan dampak bersama. - Adanya reward dan penghargaan rutin bagi para pelaku riset dan inovasi yang memiliki dampak terhadap masyarakat terutama pada peningkatan produktivitas sektor unggulan yang ada di Tanah Laut
D	Budaya riset dan inovasi	Pemahaman dan penerimaan publik terhadap riset dan inovasi yang akan menjadi dasar	Adanya peraturan Peraturan pemerintah melalui peraturan BRIN no 5 tahun 2023 pasal 24 terkait kebijakan berbasis riset.	Perlunya pemerintah daerah Tanah Laut membuat turunan kebijakan dan mensosialisasikan kepada seluruh

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
		kebijakan masih belum menjadi budaya hampir di seluruh pemerintah daerah, sehingga perlunya melakukan promosi dan mengatur kebijakan terkait dengan hal ini	Oleh karena itu ini menjadi peluang budaya riset akan masuk secara perlahan di lingkungan pemerintah daerah	SKPD terkait dengan keharusan kebijakan yang akan diambil dan prioritas yang dilakukan berdasarkan kebijakan berbasis bukti.
		Penganggaran insentif terhadap pelaku riset dan inovasi yang memiliki dampak terhadap keunggulan daerah pemerintah kabupaten Tanah Laut akan mengurangi alokasi anggaran pada sektor lain	Adanya peluang insentif yang diberikan pemerintah daerah untuk 3 inovasi dengan anggaran 259 juta rupiah	Mengalokasikan penganggaran yang lebih besar untuk merangsang inovasi yang dampak ke masyarakat dapat diukur pada sektor-sektor yang diunggulkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut
		Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk perlindungan jika dibandingkan dengan jumlah hasil riset dan inovasi yang dihasilkan	Terdapat alokasi dana yang diberikan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dalam melakukan perlindungan terhadap pengetahuan teknologi masyarakat melalui perlindungan kekayaan intelektual dan perlindungan merek.	Alokasi pendanaan terkait inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat perlu terus dianggarkan dengan mengutamakan produk yang memiliki dampak ke masyarakat
E	Keterpaduan riset dan inovasi daerah	Adanya dorongan untuk melakukan percepatan oleh pemerintah daerah untuk segera menyusun payung hukum terkait dengan riset dan inovasi daerah dengan menyesuaikan peraturan pemerintah pusat dan BRIN terkait kesesuaian peta jalan	Tanah Laut memiliki produk unggulan daerah (pertanian, perikanan dan peternakan) yang dapat dijadikan sebagai ciri khas daerah Tanah Laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk unggulan daerah tersebut sesuai dengan fokus bidang riset nasional	Adanya peta jalan yang selaras antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan prioritas riset nasional yang berkelanjutan

No	Area Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi	Hasil Identifikasi Tantangan yang Dihadapi Daerah	Hasil Identifikasi Peluang yang Dihadapi Daerah	Kondisi yang Diharapkan
		pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Adanya perbedaan seperti kultur dan kepentingan, serta kesulitan dalam hal koordinasi yang terkadang menghambat pengambilan keputusan yang cepat.	Adanya kelompok-kelompok keilmuan dari berbagai sektor yang ada di Kabupaten Tanah Laut seperti pelaku usaha, lembaga riset (Perguruan Tinggi atau Balai riset), pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lain. Dimana semuanya dapat saling bekerjasama/ berkolaborasi dalam melakukan riset dan inovasi yang berkaitan dengan sektor unggulan khas dari daerah Kabupaten Tanah Laut.	Perlunya koordinasi yang intens antara berbagai sektor dalam mengembangkan produk unggulan daerah dengan cacata sering melakukan penyamaan persepsi, memperkuat jaringan dan konsorsium, menerapkan sistem evaluasi dan pemantauan kinerja bersama
F	Penyelarasan dengan perkembangan global	Kurangnya modal dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan yang sejalan dengan isu global	▪ Keberagaman komoditas sumber daya alam daerah, baik dari pertanian, tanaman buah, flora endemik, flora pesisir, hasil peternakan ▪ kerjasama pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan, pertanian dan peternakan dengan korporasi dari Jepang pada tahun 2023	▪ Sumber daya alam yang dimiliki daerah dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah siap pakai yang dapat bersaing nasional ▪ Dimiliki dan di diterapkannya wawasan dan teknologi pertanian terkini dari Jepang

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

4.1 Analisis Kesenjangan *Evidence-Based Policy*

Kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menjadi salah satu langkah terencana dalam pembangunan, yang merupakan suatu pendekatan untuk membantu pengambilan keputusan atas kebijakan melalui informasi yang akurat berbasis bukti-bukti penelitian. Penyusunan kebijakan berbasis bukti digunakan dengan berbagai macam bentuk, dimana salah satunya adalah menggunakan temuan penelitian untuk merumuskan kebijakan baru, meningkatkan efektivitas program yang telah ada, dan mengembangkan kebijakan dengan bukti yang akurat.

Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dilakukan dengan membandingkan antara kondisi saat ini sampai tahun 2023 dan kondisi ideal yang diharapkan untuk ekosistem riset dan inovasi daerah kabupaten Tanah Laut (Tabel 4.1). Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan sasaran strategis kebijakan berbasis bukti yang tepat dalam pengambilan keputusan pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026. Kondisi ideal yang diharapkan dengan membandingkan daerah-daerah yang lebih maju maupun referensi lainnya dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti. Indikator yang digunakan dalam analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti adalah kebijakan infrastruktur riset dan inovasi daerah, kebijakan kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi daerah, kebijakan kemitraan riset dan inovasi, kebijakan budaya riset dan inovasi, kebijakan keterpaduan riset dan inovasi daerah, dan kebijakan penyelarasan dengan perkembangan global.

Tabel 4.1 Analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti

Jenis kebijakan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal yang Diinginkan
Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi tertuang pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 212 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan di Kabupaten Tanah Laut. Kebijakan inovasi daerah juga tertuang pada Peraturan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Peraturan Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah. Kebijakan infrastruktur sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Pasal 16 Ayat 1 dan 2 berada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, salah satu fungsinya koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.	Kebijakan seharusnya mencakup juga untuk kegiatan riset dan inovasi yang terintegrasi, yang diikuti oleh kebijakan penyediaan infrastruktur riset dan inovasi. Penyediaan kebijakan yang terintegrasi akan membuat penelitian akan lebih terarah sesuai dengan peta jalan riset nasional, peta jalan Kalimantan Selatan dan peta jalan kabupaten Tanah Laut. Kegiatan riset dan inovasi ini perlu juga dilindungi terkait dengan paten, Hak cipta dan juga merek agar kekayaan intelektualnya diakui dan menjadi ciri khas Kabupaten Tanah Laut

Jenis kebijakan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal yang Diinginkan
Kebijakan kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi di daerah	Kebijakan kelembagaan dan daya dukung dengan dibentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan, sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.	Perlu adanya kebijakan yang mengatur terkait kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan mitra di berbagai kepentingan seperti Perguruan Tinggi, Balai kementerian dan sektor industri. Kebijakan ini juga terkait dengan standar pemenuhan infrastruktur riset dan inovasi sesuai kemampuan daerah. Pemenuhan ini bisa dilakukan secara bertahap dan melakukan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi dengan azas saling menguntungkan.
Kebijakan kemitraan riset dan inovasi	Kebijakan kemitraan /kerjasama daerah tertuang pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Kerjasama riset dan inovasi daerah bidang pengembangan pemerintahan telah dilakukan bermitra dengan beberapa perguruan tinggi. Kemitraan dilakukan berdasarkan MoU dengan beberapa perguruan tinggi.	Perlunya kebijakan yang mengatur terkait dengan penguatan kemitraan antar kelembagaan; peningkatan difusi inovasi (hilirisasi produk); dan peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
Kebijakan budaya riset dan inovasi	Kebijakan budaya riset dan inovasi tertuang pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah Pasal 24 untuk pelaksanaan Lomba inovasi tingkat daerah	Perlunya kebijakan promosi dan kampanye inovasi; apresiasi prestasi inovasi; pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
Kebijakan keterpaduan	Belum adanya kebijakan yang mengatur keterpaduan riset dan inovasi daerah	Perlunya kebijakan pemerintah kabupaten Tanah Laut dalam mengatur prakarsa pengembangan Riset

Jenis kebijakan	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal yang Diinginkan
riset dan inovasi daerah		dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah; penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kebijakan penyalarsan dengan perkembangan global	Kebijakan penyalarsan dengan perkembangan global belum ada	Perlunya kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mengatur terkait dengan peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah; dan penguatan kerjasama internasional.

Berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti sebagai berikut:

1. Secara umum sudah ada kebijakan riset dan inovasi di kabupaten Tanah Laut. Tetapi untuk kebijakan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan produk unggulan daerah bidang pertanian (pangan) belum ada.
2. Kebijakan inovasi sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Peraturan Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah Pasal 4, dimana inovasi daerah berbentuk: a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; b. inovasi Daerah Pelayanan Publik; dan/atau c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kebijakan inovasi masih tertuju pada sistem inovasi daerah yang tertuju pada bidang pariwisata yang terdapat pada dokumen sistem inovasi daerah (SIDA).

4. Kebijakan infrastruktur belum menyebutkan secara jelas untuk kegiatan riset dan inovasi daerah.
5. Kebijakan kelembagaan masih belum fokus untuk kegiatan pengembangan riset dan inovasi bidang unggulan daerah. Kebijakan daya dukung riset dan inovasi yang ada belum dapat bekerja dengan optimal, karena belum didukung oleh kebijakan daya dukung pemenuhan infrastruktur dan belum didukung kebijakan pemenuhan sumberdaya periset.
6. Kebijakan kerjasama/mitra dengan perguruan tinggi/instansi lainnya tidak hanya tertuju pada riset untuk pengembangan urusan pemerintahan. Belum tersedia kebijakan kemitraan riset dan inovasi untuk pengembangan produk unggulan daerah.
7. Kebijakan budaya riset dan inovasi yang ada belum didukung kebijakan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dan kebijakan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
8. tingkat kesenjangan tinggi, kondisi yang ada belum ada kebijakan yang mengatur keterpaduan riset dan inovasi daerah.
9. Tingkat kesenjangan tinggi, kondisi yang ada belum ada kebijakan. Kebijakan penyelarasan dengan perkembangan global terkait dengan isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah dan penguatan kerjasama internasional belum ada.

4.2 Analisis Kesenjangan Unggulan Daerah

Analisis kesenjangan unggulan daerah dilakukan dengan membandingkan antara kondisi saat ini sampai tahun 2023 dan kondisi ideal yang diharapkan untuk pengembangan produk unggulan daerah kabupaten Tanah Laut. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan sasaran strategis yang tepat untuk unggulan daerah dalam penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah kabupaten Tanah Laut tahun 2024 - 2026.

Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah (Pasal 1 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah). Pada dasarnya, ekosistem riset dan inovasi di daerah menjadi keragaan interaksi antar elemen yang mendukung terciptanya riset dan inovasi di daerah. Melalui BRIN, Pemerintah Indonesia mendorong adanya perbaikan dan penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang mumpuni di daerah. Pemerintah mengharapkan adanya peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik melalui basis riset dan inovasi yang

dimiliki. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat diakselerasi melalui riset dan inovasi terutama dalam implementasi inovasi teknologi. Sebagaimana Pasal 23 Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, ekosistem riset dan inovasi di daerah terbagi menjadi 6 elemen antara lain: (1) kebijakan infrastruktur riset dan inovasi di daerah; (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; (3) kemitraan riset dan inovasi; (4) budaya riset dan inovasi; (5) keterpaduan riset dan inovasi di daerah; dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global. Analisis kesenjangan pada bagian ini dibutuhkan untuk mengkaji standar ekosistem yang disarankan BRIN dengan realitas yang ada saat ini, sehingga pemerintah daerah melalui BAPPERIDA dapat memperbaiki dan mengembangkan ekosistem berdasarkan analisis kesenjangan ini.

A. Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Kebijakan ini merupakan hal mendasar yang berkenaan dengan daya dukung pemerintah daerah untuk memasukkan agenda pengembangan ekosistem riset dan inovasi ke dalam agenda kebijakan. Hal ini juga termasuk ketersediaan infrastruktur dan upaya melengkapinya melalui kebijakan pemerintah daerah. Elemen kebijakan infrastruktur riset dan inovasi di daerah merupakan elemen utama untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi. Di dalamnya, terdapat 6 indikator terkait kebijakan infrastruktur yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan kesenjangan (*gap*) antara standar ekosistem riset dan inovasi dengan realitas yang ada di daerah.

Tabel 4.2 Analisis Kesenjangan Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Laut.

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
1	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan telah diturunkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah. Kondisi regulasi riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut tidak jauh berbeda dengan Roadmap SIDA tahun 2016. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui BAPPEDA sedang berproses membentuk BRIDA di tingkat kabupaten di Kalimantan Selatan sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan riset dan inovasi.	Adanya kebijakan terkait dengan riset dan inovasi berbasis bukti yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut untuk menentukan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2	Penataan basis data riset dan inovasi	Data hasil Inovasi dan riset di Kabupaten Tanah Laut ada 63 inovasi dan 107 Riset yang tercatat di Tahun 2023, tetapi dari masing-masing inovasi dan riset di Tahun 2023 tersebut belum dapat dipastikan bahwa di basis data tersebut mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk lembaga riset, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor industri dan belum dapat dijadikan sebagai gambaran menyeluruh mengenai kegiatan riset dan inovasi serta saling adanya pertukaran data yang efektif antarlembaga dan mendukung kolaborasi lintas sektor SKPD di Kabupaten Tanah Laut.	Perlunya membangun dan menjaga database yang komprehensif, terorganisir dan terintegrasi akan sangat membantu dalam mengelola, mengakses, dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi secara lebih efektif dalam mendukung pengembangan daerah dan pemanfaatan potensi yang dimiliki.

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
3	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Infrastruktur riset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Laut: 1) UPT Laboratorium di DPRKPLH 2) Rumah kemas, tetapi masih belum dioptimalkan 3) Pembangunan rumah produksi bersama untuk tanaman karet 4) Pengembangan dan perluasan jaringan 5) Memiliki UPT Laboratorium di DPRKPLH (Lingkungan), tetapi di SKPD lain juga belum terpenuhi tempat untuk pengembangan tempat riset dan inovasi, belum memiliki tempat pembibitan sapi, dan unggas.	Penting adanya laboratorium dasar untuk sektor unggulan di Tanah Laut yang akan menjadi pusat riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dalam sektor unggulan atau yang lainnya misal pembibitan sapi unggul Adanya kinerja efektif dan efisien yaitu dengan kolaborasi (lab dan SDM) antara perguruan tinggi, sekolah atau industri dengan peneliti yang ada di SKPD-SKPD dalam melakukan peneliti dan pengembangan produk unggulan di Kabupaten Tanah Laut.
5	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023, sudah menyediakan anggaran untuk pendanaan riset dan inovasi di masing-masing SKPD, dengan jumlah inovasi dan riset yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2023 tercatat ada 63 Inovasi dan 107 riset, jika di rata-rata dengan jumlah SKPD yang berjumlah 18, jadi jumlah riset 6 riset dalam satu tahun di tahun 2023 dan rata-rata 3,5 untuk inovasi per SKPD. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, BAPPEDA sudah menganggarkan 3 inovasi dengan nilai kematangan minimal 100 dengan anggaran 259 juta.	Adanya tambahan dana riset dan inovasi di berbagai sektor unggulan untuk melakukan penemuan dan inovasi produk dengan kerja/output yang terukur jelas.
6	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Di Kabupaten Tanah Laut sudah ada beberapa produk yang sudah didaftarkan merek dagang sebanyak 140 UMKM, termasuk pisang Tundang khas Kabupaten Tanah Laut, dan Gula aren dari Panyipatan dan 28 IKM di daftarkan.	Adanya tempat perwakilan (sentra HKI) di daerah yang dapat membantu dalam proses pengurusan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan penjelasan di atas, analisis kesenjangan kebijakan infrastruktur riset dan inovasi daerah di kabupaten Tanah Laut antara lain:

1. Terdapat kesenjangan dalam kebaruan dan detail regulasi riset dan inovasi, yang perlu diperbaharui untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif.
2. Basis data saat ini tidak mencapai tingkat integrasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengelolaan riset dan inovasi secara efektif.
3. Infrastruktur yang ada masih perlu dioptimalkan dan diperluas untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi yang berkembang.
4. Ada potensi peningkatan kolaborasi dan efektivitas kinerja melalui sinergi yang lebih kuat antara berbagai pihak terkait.
5. Anggaran yang ada belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pertumbuhan riset dan inovasi yang diinginkan.
6. Diperlukan perbaikan dalam fasilitas yang mendukung pengurusan hak kekayaan intelektual untuk melindungi dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi.

Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dapat merancang strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi setiap kesenjangan dan meningkatkan pengelolaan riset dan inovasi di daerah tersebut sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan.

B. Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Ekosistem riset dan inovasi di daerah tumbuh berdasarkan kapasitas kelembagaan dan daya dukungnya. Kelembagaan dan daya dukung yang dimaksud adalah sistem dan mekanisme interaksi organisasi dengan lingkungannya yang diatur melalui tata aturan yang mengikat untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan riset dan inovasi di daerah. Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi daerah ditentukan oleh dua indikator antara lain adalah penguatan kolaborasi riset dan inovasi dan penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi.

Tabel 4.3 Analisis Kesenjangan Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Laut

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
1	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terdapat 4 Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Selatan yang terlibat dalam kegiatan riset, yaitu Politeknik Negeri Tanah Laut, Universitas Lambung Mangkurat, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selain dengan Perguruan Tinggi, riset di Kabupaten Tanah Laut kerjasama dengan Lembaga, dan dengan beberapa Industri yang ada di Kabupaten Tanah Laut.	Terbentuknya sistem kerjasama dalam bidang penelitian dan pengembangan produk unggulan (inovasi) antara Perguruan tinggi, sekolah dan industri dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menanggulangi masalah infrastruktur, kompetensi dan kurangnya SDM/peneliti yang di pemerintah daerah. Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan melakukan MoU dan dilanjutkan dengan penyusunan proyek/program kerja bersama dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ketercapaian yang akan dimasukkan dalam rencana kerja anggaran di pemerintah daerah.
2	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut saat ini sudah memiliki UPT Laboratorium di DPRKPLH (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup), tetapi untuk sektor peternakan sarana pembibitan sapi baik sapi perah maupun sapi potong belum tersedia.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di sektor peternakan, khususnya sarana pembibitan sapi, mencakup beberapa aspek. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi acuan untuk menciptakan kondisi ideal tersebut: UPT Laboratorium Peternakan: Diperlukan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Peternakan yang khusus menangani riset dan inovasi di sektor peternakan. Laboratorium tersebut harus dilengkapi dengan peralatan modern untuk mendukung riset dan pengembangan di bidang peternakan. Fasilitas Pembibitan Sapi: Pembangunan fasilitas khusus untuk pembibitan sapi baik untuk sapi perah maupun sapi potong. Fasilitas ini harus memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan hewan.

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
			Sarana pembibitan melibatkan kandang yang sesuai, area bermain, dan fasilitas kesehatan untuk sapi. Program Riset dan Inovasi: Perlu adanya program riset dan inovasi yang difokuskan pada peningkatan kualitas sapi, efisiensi produksi, dan pemenuhan kebutuhan pasar. Kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku industri peternakan untuk mengoptimalkan hasil riset dan inovasi. Pelatihan dan Pendidikan: Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi peternak setempat agar dapat mengimplementasikan praktik-praktik terbaik yang dihasilkan dari riset dan inovasi. Peningkatan keterampilan peternak dalam manajemen peternakan, pemeliharaan kesehatan sapi, dan strategi pemuliaan. Pembiayaan dan Dukungan Keuangan: Mendorong investasi dan dukungan keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pembibitan sapi. Pemberian insentif atau bantuan keuangan kepada peternak yang berpartisipasi aktif dalam program riset dan inovasi. Pengembangan Pasar: Membangun hubungan yang baik antara peternak dengan pelaku industri, distributor, dan konsumen. Mendorong pemasaran produk-produk peternakan hasil inovasi melalui strategi pemasaran yang efektif. Monitoring dan Evaluasi: Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak dari program riset dan inovasi yang diimplementasikan.

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
			Melakukan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program.

Analisis kesenjangan kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi daerah di kabupaten Tanah Laut:

1. Terdapat kesenjangan dalam struktur dan formalitas kolaborasi. Diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembentukan MoU dan proyek bersama untuk meningkatkan keterlibatan dan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat.
2. Fasilitas pembibitan sapi menjadi kebutuhan utama yang belum terpenuhi. Perlu adanya pembangunan sarana tersebut dan pengembangan program riset serta inovasi yang fokus pada sektor peternakan.

Aspek-aspek yang Diperlukan untuk Mencapai Kondisi Ideal pada Sarana Pendukung:

1. UPT Laboratorium Peternakan: Perlu dibentuk UPT Laboratorium Peternakan dengan peralatan modern.
2. Fasilitas Pembibitan Sapi: Pembangunan fasilitas pembibitan sapi yang mencakup kandang, area bermain, dan fasilitas kesehatan.

3. Program Riset dan Inovasi: Perlu pengembangan program riset dan inovasi yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri peternakan.
4. Pelatihan dan Pendidikan: Sediakan pelatihan dan pendidikan untuk peternak guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
5. Pembiayaan dan Dukungan Keuangan: Dukung pembangunan infrastruktur dengan mendorong investasi dan dukungan keuangan serta memberikan insentif kepada peternak yang berpartisipasi.
6. Pengembangan Pasar: Fokus pada pengembangan pasar melalui kerjasama antara peternak, industri, distributor, dan konsumen.
7. Monitoring dan Evaluasi: Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai dampak program riset dan inovasi. Lakukan penyesuaian berkelanjutan.

Pentingnya memperkuat kolaborasi dan menyediakan sarana pendukung yang sesuai standar untuk riset dan inovasi di sektor peternakan di Kabupaten Tanah Laut. Dengan mengatasi kesenjangan ini, dapat diharapkan peningkatan kualitas riset dan inovasi serta kontribusi positif terhadap perkembangan sektor peternakan dan kesejahteraan peternak.

C. Kemitraan Riset Dan Inovasi

Ekosistem riset dan inovasi di daerah didukung oleh adanya kemitraan antar perangkat daerah yang solid dan harmonis. BAPPERIDA sebagai penyelenggara pusat riset dan inovasi di daerah butuh bermitra dengan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan publik sekaligus pengguna hasil riset dan inovasi. Dalam elemen kemitraan ini, ada 3 indikator kunci dalam menciptakan kemitraan riset dan inovasi daerah yang solid dan harmonis, yaitu kemitraan antar kelembagaan, difusi inovasi, dan praktik dan diseminasi hasil riset dan inovasi.

Tabel 4.4 Analisis Kesenjangan Kemitraan Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
1	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kabupaten Tanah Laut telah banyak menghasilkan inovasi yang berkaitan dengan layanan di beberapa SKPD dengan nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut masuk dalam kategori “Inovatif” selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu masing-masing 52,42 dari nilai 100 pada tahun 2021 dan 52,12 dari 100 pada tahun 2022 tetapi masih belum banyak melibatkan kemitraan antar Lembaga atau SKPD.	Adanya reward dan penghargaan rutin bagi para pelaku riset dan inovasi yang memiliki dampak terhadap masyarakat terutama pada peningkatan produktivitas sektor unggulan yang ada di Tanah Laut
2	Peningkatan difusi inovasi	Inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih terkait dengan sistem informasi yang berkaitan dengan masing-masing SKPD. Berdasarkan daftar 63 inovasi di Tahun 2023, 44 Inovasi yang berupa peningkatan layanan berbasis sistem informasi, dan ada 19 atau 30% inovasi dalam bentuk program-program yang berkaitan dengan 3 (tiga) sektor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut, yaitu (1) sektor pertambangan, (2) Pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan (3) Industri Pengolahan. Kabupaten Tanah Laut memiliki indeks inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut masuk kategori “Inovatif” dengan nilai belum memuaskan di Tahun 2023 tetapi sudah menjadi arah kebijakan dan program prioritas di Tahun 2024-2026 untuk peningkatan penelitian dan pengembangan daerah serta penguatan inovasi daerah dengan indikator target 3 (tiga) inovasi daerah yang nilai kematangannya minimal 100.	Pengembangan inovasi di Kabupaten Tanah Laut, beberapa langkah strategis dapat diambil antara lain: Diversifikasi Inovasi: Mendorong diversifikasi inovasi di luar sistem informasi SKPD dengan fokus pada berbagai sektor, termasuk pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan. Merangsang kolaborasi antar SKPD dan sektor-sektor terkait untuk memastikan beragamnya jenis inovasi yang dikembangkan. Kolaborasi antara Sektor: Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk meningkatkan potensi inovasi. Menyelenggarakan forum atau pertemuan rutin untuk mendiskusikan peluang inovasi lintas sektor. Penguatan Infrastruktur Riset: Melakukan investasi dalam infrastruktur riset dan laboratorium yang mendukung kegiatan penelitian dan

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
			pengembangan di berbagai sektor. Memastikan ketersediaan peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan inovasi. Program Pendidikan dan Pelatihan: Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam bidang inovasi. Memfasilitasi akses masyarakat terhadap pendidikan teknologi dan kewirausahaan untuk mengembangkan ide-ide inovatif. Pemberdayaan Komunitas Lokal: Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses inovasi, khususnya melalui program partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi masalah lokal dan mengembangkan solusi inovatif. Pengukuran dan Evaluasi Inovasi: Mengukur dan mengevaluasi dampak dari setiap inovasi yang diimplementasikan, termasuk indikator kematangan inovasi. Melibatkan ahli evaluasi independen untuk menilai efektivitas program inovasi. Sumber Daya Manusia: Memastikan ketersediaan SDM yang berkualitas dan terlatih dalam bidang inovasi. Mendorong pertukaran pengetahuan dan keterampilan antara peneliti, praktisi, dan

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
			pemerintah untuk meningkatkan kapasitas inovatif. Pengembangan Ekosistem Inovasi: Membangun ekosistem inovasi yang mendukung pertumbuhan bisnis dan perekonomian lokal. Menyediakan dukungan keuangan dan perizinan yang memudahkan pengembangan dan implementasi inovasi.
3	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Beberapa praktik baik yang sudah diterapkan adalah sebagai berikut: Telah diterbitkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2023 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Bappeda Tanah Laut melaksanakan Rapat Koordinasi Monev Inovasi Daerah dan Sosialisasi Perbup 66 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dihadiri Perwakilan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) Prov. Kalsel, Bappeda Kab. Tanah Laut selaku koordinator acara dan seluruh perwakilan SKPD di Kabupaten Tanah Laut, dan Skor Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 mendapat nilai 52,62 dan berada pada kategori INOVATIF. Dilaksanakannya Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kabupaten Tanah Laut, berupa kegiatan lomba yang dapat mendorong kematangan inovasi daerah dan menjadi pemicu bagi SKPD untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Berperan aktif dalam Ajang penilaian Innovative Government Award (IGA) untuk memperkuat kesiapan	Pengembangan inovasi di Kabupaten Tanah Laut, dengan mempertimbangkan praktik baik yang sudah diterapkan: Stabilitas dan Peningkatan Kategori Inovasi: Mempertahankan dan meningkatkan kategori "Inovatif" pada penilaian Indeks Inovasi Daerah. Langkah ini dapat dicapai dengan terus mendorong pengembangan dan implementasi inovasi di berbagai sektor. Penguatan Kerjasama dan Koordinasi: Memperkuat kerjasama antara Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel, Bappeda Kabupaten Tanah Laut, SKPD, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung sinergi dalam pengembangan inovasi. Sosialisasi dan Pendidikan Inovasi: Melanjutkan kegiatan sosialisasi inovasi secara rutin kepada seluruh SKPD dan masyarakat, serta mengadakan pelatihan inovasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait inovasi. Peningkatan Peran SKPD:

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
		Kabupaten Tanah Laut dalam rangka peningkatan Penilaian Indeks Inovasi Daerah & Pemberian Penghargaan IGA, yang dikoordinir oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut melakukan inventarisasi semua inovasi SKPD ke dalam database inovasi kabupaten dan apabila dalam penilaiannya bagus maka akan di ikut sertakan ke ajang inovasi daerah baik Kalsel <i>Innovation Award</i> (KIA) maupun <i>Innovative Government Award</i> (IGA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut meraih Juara terbaik ketiga pada ajang penganugerahan Pemenang Kalsel <i>Innovation Award</i> (KIA) Tahun 2022 dengan aplikasi SILAKAS, yang merupakan inovasi pelayanan masyarakat dalam hal pemenuhan dokumen kependudukan.	Mendorong SKPD untuk terlibat lebih aktif dalam proses inovasi, termasuk melalui partisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah dan penilaian <i>Innovative Government Award</i> (IGA). Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Merancang dan mengimplementasikan sistem yang memudahkan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi inovasi daerah, termasuk pembuatan database inovasi yang terintegrasi. Penilaian Kualitas Inovasi: Meningkatkan kriteria penilaian inovasi dengan fokus pada dampak nyata terhadap masyarakat dan peningkatan kualitas layanan pemerintah. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses inovasi, mendengarkan aspirasi mereka, dan mendorong partisipasi dalam ajang Lomba Inovasi Daerah. Penghargaan dan Pengakuan: Memberikan penghargaan dan pengakuan secara lebih luas kepada SKPD dan individu yang berkontribusi signifikan dalam mengembangkan inovasi yang berhasil. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan implementasi inovasi memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Diversifikasi Inovasi Sektor: Mendorong diversifikasi inovasi agar mencakup sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan,

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
			kehutanan, dan industri pengolahan.

Analisis kesenjangan kemitraan riset dan inovasi di kabupaten Tanah Laut antara lain:

1. Kesenjangan terletak pada kurangnya insentif yang cukup untuk mendorong kemitraan. Kondisi ideal melibatkan pemberian reward dan penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi pelaku riset dan inovasi serta memperkuat kemitraan.
2. Terdapat kesenjangan dalam fokus inovasi yang masih terkait dengan sistem informasi. Langkah-langkah strategis yang diusulkan, seperti diversifikasi inovasi dan kolaborasi lintas sektor, diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini.
3. Sementara beberapa praktik baik sudah ada, kesenjangan terletak pada perluasan dan peningkatan kualitas inovasi. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi aktif SKPD, meningkatkan sistem evaluasi inovasi, dan memperluas dampak inovasi pada masyarakat.

D. Budaya Riset Dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi di daerah memegang peran penting untuk menciptakan keberlanjutan riset dan inovasi di daerah. Budaya ini memastikan pola perilaku dan nilai yang dianut dalam konteks ekosistem riset dan inovasi di daerah terus berlanjutan dan berkembang. Sebagaimana definisi budaya sebagai nilai yang dilimpahkan turun temurun, budaya riset dan inovasi di daerah juga diharapkan mampu membangun nilai ekosistem riset dan inovasi di daerah yang tersebar di masyarakat dan dilimpahkan turun temurun. Oleh karena itu, indikator dari elemen ini antara lain promosi dan kampanye inovasi, apresiasi prestasi inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset, dan inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi di masyarakat.

Pembentukan budaya riset dan inovasi di daerah dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme. Salah satunya dengan promosi dan kampanye riset dan inovasi di daerah.

Promosi dan kampanye ini bertujuan untuk menciptakan partisipasi dan perilaku untuk mengembangkan riset dan inovasi di daerah. BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut telah melakukan promosi dan kampanye melalui program kompetisi TTG, pameran inovasi, dan diseminasi hasil riset dan inovasi. Ini pun dilakukan meluas bagi perangkat daerah dan masyarakat umum, dan berjenjang dari masyarakat umum dan pelajar di tingkat sekolah menengah Atas (SMA). Ini diharapkan mampu mendorong budaya riset dan inovasi di daerah yang terus tumbuh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, apresiasi terhadap prestasi para inovator juga dilakukan sesuai dengan kebijakan dan kapasitas anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.

Tabel 4.5 Analisis Kesenjangan Budaya Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
1	Promosi dan kampanye inovasi	Kabupaten Tanah Laut terus melakukan upaya untuk melakukan promosi dan kampanye inovasi melalui berbagai kegiatan seperti: 1) Kabupaten Tanah Laut berpartisipasi dalam kegiatan Ajang penilaian Innovative Government Award (IGA) dan Kalsel Innovation award (KIA). 2) Mengadakan lomba inovasi daerah untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 dan tahun 2023. 3) Melakukan rekapitulasi inovasi yang dilakukan SKPD pada aplikasi Kemendagri dan melihat kaitannya secara langsung dengan aspek ekonomi. Pada tahun 2023 tercatat ada 63 inovasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang terekam di Aplikasi Inovasi Kemendagri.	Perlunya pemerintah daerah Tanah Laut membuat turunan kebijakan dan mensosialisasikan kepada seluruh SKPD terkait dengan keharusan kebijakan yang akan diambil dan prioritas yang dilakukan berdasarkan kebijakan berbasis bukti. Mengalokasikan penganggaran yang lebih besar untuk merangsang inovasi yang dampak ke masyarakat dapat diukur pada sektor-sektor yang diunggulkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut Alokasi pendanaan terkait inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan hasil pengetahuan dan teknologi masyarakat perlu terus dianggarkan dengan mengutamakan produk yang memiliki dampak ke masyarakat

2	Apresiasi prestasi inovasi;	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan nominasi pada dua kategori, yaitu Gerakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Hijau sebagai upaya pencegahan stunting dan yang kedua kategori Inovasi Masyarakat Umum serta inovasi Program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Eks Transmigrasi (Kijang Mas Tala) oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut untuk kategori Inovasi Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan penghargaan Juara II (dua) untuk Kategori Inovasi Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu Kijang Mas Tala dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dalam ajang Kalsel Innovation Award Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga melaksanakan lomba inovasi daerah yang mengundang SKPD di lingkungan Pemkab Tanah Laut untuk mengirimkan inovasi yang diunggulkan untuk mengikuti lomba. Pada lomba inovasi daerah akan dinilai kematangan dan kebermanfaat inovasi yang dibuat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberikan apresiasi dalam bentuk uang pembinaan kepada pemenang lomba dalam rangka memberikan	Apresiasi prestasi di bidang inovasi dapat mencakup beberapa aspek yang mendukung pengembangan dan pemeliharaan budaya riset dan inovasi di daerah. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi acuan: Pengakuan yang Berkelanjutan: Memastikan bahwa penghargaan tidak hanya bersifat satu kali, tetapi berkelanjutan untuk memberikan dorongan berkelanjutan kepada inovator dan SKPD yang berprestasi. Diversifikasi Penghargaan: Mendorong variasi dalam penghargaan, termasuk pengakuan untuk inovasi dengan dampak besar, inovasi yang melibatkan masyarakat, dan kolaborasi antar SKPD atau dengan pihak eksternal. Transparansi dan Keterbukaan: Menyediakan informasi yang transparan mengenai kriteria penilaian dan proses seleksi penghargaan, sehingga peserta dan masyarakat dapat memahami dan menghargai proses tersebut. Insentif Finansial dan Non-Finansial: Selain apresiasi dalam bentuk uang pembinaan, pemerintah dapat memberikan insentif finansial tambahan sebagai pengakuan atas prestasi inovatif. Insentif non-finansial seperti pelatihan, peluang networking, dan akses ke sumber daya tambahan juga dapat menjadi motivator.
---	-----------------------------	--	--

		motivasi dan membangun budaya riset dan inovasi di daerah.	Promosi dan Publikasi: Memastikan bahwa inovasi yang diakui mendapatkan promosi yang memadai melalui media lokal, nasional, dan platform daring. Ini dapat meningkatkan visibilitas inovasi dan mendorong penyebaran praktik baik. Kolaborasi antar Pemerintah dan Swasta: Mendorong partisipasi sektor swasta dalam memberikan penghargaan atau menambah nilai pada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Ini dapat memperkuat keterlibatan seluruh ekosistem inovasi di daerah. Budaya Peer Recognition: Membangun budaya pengakuan antar rekan kerja dan antar SKPD, di mana inovasi dan prestasi diakui oleh mereka yang bekerja dalam lingkup yang sama. Hal ini dapat meningkatkan semangat kompetisi positif dan kolaborasi. Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses apresiasi dan memberikan mereka kesempatan untuk memberikan masukan atau memilih inovasi yang memiliki dampak signifikan dalam layanan publik. Peningkatan Jaringan dan Konektivitas: Membangun platform atau forum yang memungkinkan para pemenang penghargaan untuk berbagi pengalaman, belajar satu sama lain, dan membangun jaringan yang mendukung. Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan:
--	--	---	---

			Menggunakan penghargaan sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan, dengan mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan untuk memajukan inovasi lebih lanjut di masa depan.
--	--	--	--

3	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut belum secara khusus melakukan kegiatan yang mengarah pada pengembangan perusahaan pemula berbasis riset.	Pengembangan perusahaan pemula (startup) berbasis riset di Kabupaten Tanah Laut, beberapa langkah strategis dapat diambil: Pemahaman Kebutuhan dan Potensi Lokal: Lakukan studi dan identifikasi kebutuhan serta potensi riset di Kabupaten Tanah Laut. Pahami tren industri lokal dan peluang inovasi yang dapat dijadikan dasar bagi perusahaan pemula. Kolaborasi dengan Lembaga Riset dan Perguruan Tinggi: Bangun kemitraan erat dengan lembaga riset dan perguruan tinggi di wilayah tersebut untuk mendukung transfer pengetahuan dan teknologi. Kolaborasi ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan riset dan inovasi. Insentif dan Dukungan Keuangan: Sediakan insentif dan dukungan keuangan bagi perusahaan pemula berbasis riset, seperti hibah riset, pinjaman dengan bunga rendah, atau pajak insentif. Ini dapat memberikan dorongan ekonomi bagi startup untuk berkembang. Infrastruktur Inovasi: Bangun infrastruktur yang mendukung kegiatan riset dan pengembangan, termasuk laboratorium, ruang kolaborasi, dan fasilitas pengujian. Memastikan ketersediaan fasilitas ini dapat memudahkan startup dalam menjalankan kegiatannya. Pendidikan dan Pelatihan:
---	---	--	---

			Sediakan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu para pebisnis muda memahami proses riset, pengembangan produk, manajemen bisnis, dan keterampilan lain yang diperlukan untuk mengelola perusahaan pemula. Mentorship dan Pendampingan: Sediakan program mentorship yang melibatkan para ahli industri, pengusaha sukses, dan profesional berpengalaman. Mentorship dapat membantu membimbing perusahaan pemula dalam mengatasi tantangan dan merencanakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Akses ke Sumber Daya: Fasilitasi akses perusahaan pemula ke sumber daya, termasuk jaringan bisnis, penasihat industri, dan sumber daya manusia berkualitas. Pemahaman yang baik tentang ekosistem bisnis lokal dapat membantu startup dalam berintegrasi dengan baik. Inkubator dan Akselerator: Sediakan inkubator dan akselerator bisnis yang memberikan ruang kerja bersama, bimbingan, dan sumber daya lainnya kepada perusahaan pemula. Ini dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Pengembangan Pasar dan Jaringan: Bantu perusahaan pemula dalam mengembangkan pasar dan menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan bisnis lokal. Membuka akses ke pasar
--	--	--	---

			lokal dapat membantu startup dalam memvalidasi produk dan memperluas basis pelanggan. Evaluasi dan Penilaian Kinerja: Lakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan perusahaan pemula di wilayah tersebut. Penilaian kinerja dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan, serta area yang perlu diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
--	--	--	--

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
4	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melakukan pengembangan pengetahuan Lokal melalui pelatihan dan pendidikan, membangun kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan dan pendidikan terkait dengan pengetahuan lokal dan teknologi yang dimiliki. Perlindungan pengetahuan tradisional melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil riset dan inovasi masyarakat.	inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat, beberapa langkah dapat diambil: Inventarisasi Pengetahuan Lokal: Lakukan survei dan inventarisasi secara menyeluruh terhadap pengetahuan lokal dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Identifikasi praktik-praktik tradisional, kearifan lokal, dan pengetahuan yang dapat menjadi dasar riset dan inovasi. Partisipasi Masyarakat: Involvemen aktif masyarakat dalam proses inventarisasi, dengan membangun mekanisme partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan lokal. Melibatkan masyarakat akan meningkatkan akurasi dan keberlanjutan hasil inventarisasi. Pengembangan Pengetahuan Lokal: Sediakan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan lokal mereka. Dukung riset partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam mengembangkan dan menguji pengetahuan mereka. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sediakan dukungan untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
			pengetahuan lokal dan teknologi masyarakat yang telah diidentifikasi. Ini dapat termasuk hak cipta, merek dagang, dan perlindungan hukum lainnya sesuai dengan karakteristik pengetahuan tersebut. Pemberdayaan Masyarakat: Libatkan masyarakat dalam pemahaman tentang nilai dan manfaat perlindungan HKI. Sosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan lokal mereka untuk mencegah pengakuan tanpa izin atau penggunaan yang tidak etis oleh pihak eksternal. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Bangun kemitraan dengan lembaga riset, universitas, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung pengembangan pengetahuan lokal. Kolaborasi ini dapat memperkaya pengetahuan masyarakat dan meningkatkan akses mereka ke sumber daya dan teknologi baru. Pengembangan Database Pengetahuan Lokal: Bangun database yang mencatat dan mengelola pengetahuan lokal yang teridentifikasi. Database ini dapat digunakan sebagai referensi untuk keperluan penelitian lebih lanjut, pengembangan produk, dan pemantauan HKI. Pembinaan Hak Milik Bersama: Fasilitasi pembentukan hak milik bersama atau mekanisme kepemilikan kolektif atas pengetahuan

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
			lokal. Ini dapat menguatkan posisi masyarakat dalam merawat dan memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka. Pembinaan Etika Penelitian: Berikan pembinaan terkait etika penelitian kepada peneliti atau pihak yang terlibat dalam pengembangan pengetahuan lokal. Pastikan bahwa penelitian dilakukan dengan rasa hormat dan kehati-hatian terhadap nilai dan norma masyarakat lokal. Sistem Hukum dan Kebijakan yang Mendukung: Sediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan dan perlindungan pengetahuan lokal. Pastikan bahwa sistem hukum memfasilitasi pendaftaran HKI dan memberikan keadilan kepada masyarakat.

Analisis kesenjangan budaya riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut:

1. Terdapat kesenjangan dalam perlunya kebijakan yang lebih kuat dan alokasi dana yang lebih besar untuk merangsang inovasi dengan dampak yang dapat diukur pada sektor-sektor yang diunggulkan oleh pemerintah.
2. Kesenjangan terletak pada perlunya pendekatan berkelanjutan dalam memberikan pengakuan, diversifikasi penghargaan, dan peningkatan transparansi dalam proses seleksi penghargaan.
3. Terdapat kesenjangan dalam kurangnya kegiatan khusus untuk mendukung pengembangan perusahaan pemula berbasis riset. Perlunya langkah-langkah strategis untuk mendorong ekosistem startup di daerah.
4. Meskipun sudah ada langkah-langkah positif, terdapat kesenjangan dalam perluasan partisipasi masyarakat, kolaborasi eksternal, dan pembinaan etika penelitian untuk memastikan pengembangan dan perlindungan pengetahuan lokal yang lebih holistik.

E. Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah

Riset dan inovasi terbaik adalah keselarasan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah, produk unggulan yang menjadi target sasaran, dan solutif terhadap permasalahan di daerah. Elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah menjadi elemen yang penting untuk diukur. Elemen ini merupakan ukuran kegiatan riset dan inovasi di daerah telah selaras dengan kondisi di daerah. Sumber daya berupa infrastruktur dan sarana penunjang akan efektif dan efisien jika peruntukannya sejalan dengan kebutuhan, permasalahan, dan produk unggulan daerah. Ekosistem riset dan inovasi bukan sekedar menciptakan kondisi dan kondimen di dalamnya, akan tetapi lebih dari itu, ekosistem riset dan inovasi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah melalui penciptaan solusi atas berbagai masalah di daerah.

BAPPERIDA Kabupaten Tanah Laut telah memprakarsai berbagai program kediatan riset dan inovasi daerah, antara lain program kajian dan riset, dan inovasi melalui usulan perangkat daerah dan target sasaran pemerintah daerah. Perbaikan perlu dilakukan pada program kompetisi TTG yang terlihat memiliki lingkup yang sama dari beberapa tahun terakhir. Artinya, penyelarasan dan keterpaduan program kompetisi TTG dengan kebutuhan dan permasalahan di daerah belum optimal dilakukan. Penyelarasan dan keterpaduan ini dapat meningkatkan serapan hasil riset dan inovasi untuk diimplementasikan oleh perangkat daerah sehingga hasil riset dan inovasi lebih implementatif dan berdampak bagi penyelesaian masalah di daerah.

Tabel 4. 6 Analisis Kesenjangan Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Tanah Laut

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
1	Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kabupaten Tanah Laut merupakan daerah yang memiliki keunggulan dalam pertanian dan perikanan. Beberapa produk dan komoditas unggulan tersebut antara lain padi, jagung, sapi potong, ayam pedaging, ayam petelur, perikanan laut dan perikanan tambak. Selain itu produk olahan pertanian dan perikanan juga menjadi produk unggulan Tanah Laut yang dikembangkan sebagai produk turunan pertanian dan perikanan. Promosi produk unggulan dilakukan melalui pameran produk lokal, pasar rakyat, pekan nasional pertanian (PENAS TANI), dan kegiatan lainnya. Kabupaten Tanah Laut juga memiliki wadah promosi produk unggulan daerah yang bertempat di Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dan juga memiliki marketplace dengan nama SOSIALITA (Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut).	Adanya peta jalan yang selaras antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait dengan prioritas riset nasional yang berkelanjutan Perlunya koordinasi yang intens antara berbagai sektor dalam mengembangkan produk unggulan daerah dengan cacata sering melakukan penyamaan persepsi, memperkuat jaringan dan konsorsium, menerapkan sistem evaluasi dan pemantauan kinerja bersama

2	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Produk unggulan daerah Tanah Laut yang akan dikembangkan adalah pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dan perikanan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya). Daerah Pesisir dapat diarahkan untuk pengembangan perikanan, sedangkan daerah daratan dan pegunungan diperuntukkan untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah di Tanah Laut, beberapa langkah strategis dapat diambil: Identifikasi dan Seleksi Klaster Inovasi: Lakukan penelitian menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah. Pilih klaster yang memiliki daya saing dan potensi pertumbuhan yang tinggi. Pembentukan Kelompok Kerja Inovasi: Bentuk kelompok kerja inovasi yang melibatkan pemangku kepentingan kunci, seperti petani, peternak, nelayan, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah daerah. Kelompok ini dapat menjadi motor penggerak dalam pengembangan klaster inovasi. Fasilitasi Kolaborasi dan Kemitraan: Fasilitasi kolaborasi dan kemitraan antara pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pemerintah. Kolaborasi ini dapat meningkatkan sumber daya, pengetahuan, dan akses ke teknologi baru untuk pengembangan klaster. Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha: Sediakan pelatihan, workshop, dan program pengembangan kapasitas untuk pelaku usaha di klaster inovasi. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Infrastruktur dan Teknologi: Pastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan klaster, seperti fasilitas pertanian, peternakan, perikanan, dan infrastruktur
---	---	---	--

			terkait lainnya. Integrasikan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pendampingan dan Bimbingan: Sediakan program pendampingan dan bimbingan oleh ahli atau mentor di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan manajemen usaha. Bimbingan ini dapat membantu pelaku usaha mengatasi tantangan dan meningkatkan keterampilan mereka. Akses ke Pasar: Bantu klaster inovasi untuk mengembangkan strategi pemasaran dan mendapatkan akses ke pasar lokal, regional, dan bahkan internasional. Dukungan ini dapat mencakup promosi produk dan fasilitasi akses ke rantai pasok global. Inovasi Teknologi dan Praktek Pertanian Berkelanjutan: Dorong penggunaan inovasi teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan kualitas produk. Pendanaan dan Investasi: Sediakan sumber pendanaan dan investasi yang memadai untuk pengembangan klaster inovasi. Ini dapat melibatkan kerja sama dengan sektor swasta, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja: Lakukan evaluasi teratur terhadap kinerja klaster inovasi, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penyesuaian strategi dan program pengembangan klaster.
--	--	--	--

3	Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Pengembangan riset dan inovasi di daerah harus selaras dan saling menguatkan dengan prioritas utama riset nasional 2017-2045. Salah satu kebijakan nasional yang berdampak signifikan nantinya bagi Kabupaten Tanah Laut adalah Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur yang dapat memberikan efek positif karena adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan serta diprediksi akan meningkatkan perekonomian daerah di wilayah Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur ini membutuhkan dukungan logistik kepada IKN dari wilayah sekitarnya termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi sentra produksi pangan dan produk-produk pertanian yang sangat banyak seperti perkebunan, hortikultura dan peternakan disamping potensi perikanan tangkap.	Mencapai kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut, dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, beberapa langkah dapat diambil: Koordinasi dan Komunikasi yang Efektif: Membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antara berbagai tingkatan pemerintahan daerah di wilayah yang terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh kebijakan nasional. Penyelarasan Prioritas Pembangunan: Menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk fokus pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya yang dapat mendukung pemindahan Ibu Kota Negara. Pemberdayaan Daerah dalam Riset dan Inovasi: Memberdayakan daerah untuk mengembangkan riset dan inovasi yang mendukung kebijakan nasional, khususnya yang terkait dengan potensi sumber daya dan keunggulan kompetitif daerah. Dukungan Logistik dan Infrastruktur: Menjamin adanya dukungan logistik dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pemindahan Ibu Kota Negara, termasuk melibatkan daerah sekitarnya, seperti Provinsi Kalimantan Selatan, dalam pengembangan infrastruktur logistik yang dibutuhkan.
---	--	--	--

			Penyelarasan Kebijakan Pertanian dan Pangan: Menyelaraskan kebijakan pertanian dan pangan nasional dengan potensi daerah setempat, seperti Kabupaten Tanah Laut yang merupakan sentra produksi pangan dan produk pertanian. Memastikan bahwa kebijakan nasional mendukung dan memanfaatkan potensi tersebut. Partisipasi Pemangku Kepentingan Lokal: Melibatkan secara aktif pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku bisnis lokal, dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Memastikan bahwa kebijakan nasional dan lokal mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mengingat Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi sumber daya alam yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah: Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan arah pembangunan nasional. Ini melibatkan pelatihan, pendampingan, dan transfer pengetahuan dari tingkat nasional. Penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Dialog: Menyelenggarakan forum konsultasi dan dialog antara pemerintah pusat dan daerah,
--	--	--	--

			serta dengan pemangku kepentingan lokal. Meningkatkan dialog ini dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan solusi bersama. Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan: Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, dan memperbaiki kebijakan yang tidak sesuai atau tidak memberikan dampak positif sesuai yang diharapkan.
--	--	--	--

Analisis kesenjangan keterpaduan riset dan inovasi daerah di kabupaten Tanah Laut antara lain:

1. Terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal terutama dalam koordinasi yang lebih intens, penyamaan persepsi, dan penguatan jaringan untuk mengembangkan produk unggulan daerah.
2. Kesenjangan terletak pada kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah strategis guna mengimplementasikan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah secara lebih menyeluruh dan efektif.
3. Kesenjangan terdapat pada perluasan koordinasi dan penyelarasan prioritas yang lebih baik, khususnya terkait dengan pengembangan riset dan inovasi yang mendukung kebijakan nasional.

Langkah-langkah untuk Mengatasi Kesenjangan:

1. Meningkatkan koordinasi antara sektor-sektor terkait untuk menyamakan persepsi.
2. Membentuk konsorsium dan jaringan untuk memperkuat prakarsa pengembangan riset dan inovasi.
3. Menerapkan sistem evaluasi dan pemantauan kinerja bersama.
4. Melakukan penelitian mendalam untuk identifikasi potensi klaster inovasi.
5. Membentuk kelompok kerja inovasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
6. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pengembangan.
7. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
8. Menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebijakan nasional, khususnya terkait pemindahan IKN.
9. Memberdayakan daerah untuk mengembangkan riset dan inovasi yang mendukung kebijakan nasional.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Kabupaten Tanah Laut dapat mengurangi kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan riset, inovasi, dan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah.

F. Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Ekosistem riset dan inovasi daerah butuh mengakomodir isu internasional yang dapat mempengaruhi kondisi di daerah. Keterkaitan dengan dunia internasional cukup

penting untuk dilakukan bukan hanya mengantisipasi kemungkinan krisis dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kerangka pikir riset dan inovasi, ketekaitan dengan isu internasional termasuk mengakomodir metode riset dan inovasi terbaru, seperti perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah lainnya. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global perlu dipertimbangkan untuk memberikan perspektif yang beragam dalam melaksanakan riset dan inovasi di daerah.

Tabel 4. 7 Analisis Kesenjangan Penyelarasan dengan Perkembangan Global di Kabupaten Tanah Laut

No	Elemen	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal
----	--------	------------------	---------------

1	Peningkatan kepedulian isu-isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi di daerah	Isu strategis di tingkat di dunia antara lain dapat dilihat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/<i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs). TPB/SDGs adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. TPB/SDGs berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif. SDGs antara lain: 1) Tidak ada Kemiskinan (<i>No Poverty</i>) 2) Tidak ada Kelaparan (<i>Zero Hunger</i>) 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (<i>Good Health and Well-being</i>) 4) Pendidikan Berkualitas (<i>Quality Education</i>) 5) Kesetaraan Gender (<i>Gender Equality</i>) 6) Air Bersih dan Sanitasi (<i>Clean Water and Sanitation</i>) 7) Energi Bersih dan Terjangkau (<i>Affordable and Clean Energy</i>) 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Decent Work and Economic Growth</i>) 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (<i>Industry, Innovation, and Infrastructure</i>) 10) Pengurangan Ketidaksetaraan (<i>Reduced Inequality</i>) 11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan (<i>Sustainable Cities and Communities</i>) 12) Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible Consumption and Production</i>) 13) Tindakan untuk Iklim (<i>Climate Action</i>) 14) Kehidupan di Bawah Air (<i>Life Below Water</i>) 15) Kehidupan di Darat (<i>Life on Land</i>) 16) Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (<i>Peace, Justice, and Strong Institutions</i>)	Sumber daya alam yang dimiliki daerah dapat dikembangkan menjadi produk unggulan daerah siap pakai yang dapat bersaing nasional Dimiliki dan diterapkannya wawasan dan teknologi pertanian terkini
---	--	---	---

		17) Kerjasama Internasional untuk Pencapaian Tujuan (<i>Partnerships for the Goals</i>) Pemilihan tema prioritas pemajuan IPTEK di bidang Pangan yang mendukung Ketercapaian ketahanan pangan (<i>Food Safety</i>), sangat relevan dengan prioritas pembangunan daerah, prioritas riset nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).	
--	--	---	--

2	Penguatan kerjasama internasional.	Penguatan kerjasama international hanya di bidang pendidikan dalam mengirimkan santri untuk sekolah di Yaman dan tenaga bidang ketenagakerjaan dalam mengirimkan TKI asal kabupaten Tanah Laut yang bekerja di luar negeri.	Penguatan kerjasama internasional, terutama untuk Kabupaten Tanah Laut, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil: Diversifikasi Kerjasama Sektoral: Mendorong diversifikasi kerjasama internasional tidak hanya dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, tetapi juga di sektor lain seperti perdagangan, investasi, pariwisata, dan teknologi. Identifikasi potensi sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah. Pengembangan Kemitraan Multilateral: Menjalin kemitraan dengan lebih banyak negara dan lembaga internasional untuk memperluas jangkauan kerjasama. Hal ini dapat mencakup kolaborasi dengan organisasi internasional, badan donor, dan mitra dagang potensial. Promosi dan Pemasaran Daerah: Melakukan promosi aktif terkait potensi dan peluang investasi, pariwisata, dan perdagangan di Kabupaten Tanah
---	------------------------------------	---	---

			Laut. Membangun citra positif dan menarik perhatian dari mitra internasional. Forum Bisnis dan Investasi: Menyelenggarakan forum bisnis dan investasi untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha lokal dengan investor dan mitra bisnis potensial dari luar negeri. Ini dapat menciptakan peluang investasi dan kolaborasi bisnis. Pendidikan dan Pertukaran Pelajar: Melakukan program pertukaran pelajar atau peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan internasional untuk memperluas peluang pendidikan bagi warga Kabupaten Tanah Laut. Ini dapat mencakup program pertukaran pengetahuan dan keterampilan. Pengembangan Kerjasama Kesehatan: Menggali potensi kerjasama di bidang kesehatan, termasuk kolaborasi dalam penelitian medis, pertukaran tenaga medis, dan penguatan infrastruktur kesehatan daerah. Kerjasama Lingkungan dan Keberlanjutan:
--	--	--	---

			Mendorong kerjasama dalam bidang lingkungan dan keberlanjutan, termasuk pertukaran pengalaman dalam pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Pertukaran Budaya dan Pariwisata: Mengembangkan program pertukaran budaya dan pariwisata untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi pariwisata di Kabupaten Tanah Laut kepada dunia internasional. Penyelenggaraan Event Internasional: Menyenggarakan acara atau kegiatan internasional di Kabupaten Tanah Laut, seperti seminar, konferensi, atau pameran, untuk meningkatkan visibilitas dan menarik perhatian dari komunitas internasional. Diplomasi Ekonomi dan Perdagangan: Mengembangkan strategi diplomasi ekonomi dan perdagangan yang proaktif untuk memfasilitasi perundingan dan perjanjian bisnis yang saling menguntungkan antara Kabupaten
--	--	--	---

			Tanah Laut dan mitra internasional. Partisipasi dalam Jaringan Regional: Bergabung dengan jaringan regional atau organisasi internasional yang relevan untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama di tingkat yang lebih luas. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan: Meningkatkan infrastruktur dan layanan yang mendukung penguatan kerjasama internasional, seperti bandara, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya.
--	--	--	--

Analisis kesenjangan penyelarasan dengan perkembangan global di kabupaten Tanah Laut:

1. Terdapat kesenjangan dalam penerapan pemahaman isu-isu internasional ke dalam strategi konkrit pengembangan riset dan inovasi di daerah. Lebih banyak integrasi diperlukan.
2. Kesenjangan utama terletak pada kebutuhan untuk diversifikasi dan memperluas kerjasama internasional ke sektor-sektor lain yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan daerah.

BAB V

STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

5.1 Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

A. Strategi Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

1. Mengadakan studi kelayakan untuk mengevaluasi kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi yang belum terpenuhi.
2. Menggali pendapat ahli dan pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pengembangan infrastruktur.
3. Menerapkan sistem pemantauan kinerja untuk menilai efektivitas infrastruktur yang diperbarui atau baru.

B. Strategi Kebijakan Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah

1. Mengevaluasi struktur kelembagaan yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan atau peningkatan.
2. Menyusun rencana pengembangan kapasitas bagi personel terkait riset dan inovasi.
3. Membentuk kelompok kerja atau tim tugas yang fokus pada peningkatan daya dukung riset dan inovasi.

C. Strategi Kebijakan Kemitraan Riset dan Inovasi

1. Menganalisis mekanisme insentif untuk mendorong kemitraan riset dan inovasi.
2. Membentuk forum dialog antara pemerintah, sektor swasta, lembaga riset, dan akademisi untuk membahas potensi kemitraan.
3. Menilai dampak kebijakan kemitraan yang telah ada dan mengidentifikasi peluang untuk peningkatan.

D. Strategi Kebijakan Budaya Riset dan Inovasi

1. Mengadakan kampanye penyadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya riset dan inovasi.
2. Mendorong pengakuan dan penghargaan untuk prestasi dalam riset dan inovasi.
3. Menyusun kebijakan yang mendorong keberlanjutan dan etika dalam pelaksanaan riset dan inovasi.

E. Strategi Kebijakan Keterpaduan Riset dan inovasi di Daerah

1. Membentuk tim lintas sektor untuk merancang dan melaksanakan program riset dan inovasi terintegrasi.

2. Membuat kebijakan yang mendorong koordinasi antar-sektor dan memastikan penyelarasan prioritas pembangunan.

F. Strategi Kebijakan Penyelarasan dengan Perkembangan Global

1. Membuat roadmap untuk menyelaraskan strategi pengembangan riset dan inovasi dengan agenda global, termasuk SDGs.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan pada tingkat global.
3. Membuat kebijakan untuk mendorong partisipasi aktif dalam forum internasional dan proyek kolaboratif.

Tambahan langkah-langkah strategis lain yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di Kabupaten Tanah Laut antara lain:

1. Strategi Kebijakan Pendanaan

- a. Mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk riset dan inovasi, serta mengidentifikasi potensi peningkatan pendanaan.
- b. Mendorong kerja sama dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan investor untuk mendukung proyek riset dan inovasi.
- c. Mengembangkan mekanisme insentif fiskal untuk mendorong investasi swasta dalam riset dan inovasi.

2. Strategi Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. Memperbarui regulasi yang berkaitan dengan HKI untuk melindungi hasil riset dan inovasi.
- b. Memberikan pelatihan kepada para peneliti dan inovator tentang pentingnya pengelolaan dan perlindungan HKI.
- c. Membentuk unit atau lembaga khusus yang fokus pada manajemen HKI dan pemberdayaan pemegang hak.

3. Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan

- a. Meningkatkan kurikulum pendidikan untuk mencakup elemen riset dan inovasi di tingkat sekolah dan perguruan tinggi.
- b. Menyelenggarakan program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan riset dan inovasi di kalangan masyarakat.
- c. Membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyediakan program yang responsif terhadap kebutuhan riset dan inovasi.

4. Strategi Kebijakan Evaluasi dan Monitoring

- a. Menirikan sistem evaluasi dan pemantauan yang kuat untuk mengukur dampak kebijakan riset dan inovasi.
- b. Mengintegrasikan indikator kinerja dan hasil riset ke dalam mekanisme evaluasi pemerintah.
- c. Melibatkan pihak eksternal, termasuk lembaga riset independen, dalam proses evaluasi untuk memastikan objektivitas.

5. Strategi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Menggagas program partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses riset dan inovasi.
- b. Memberikan dukungan kepada inisiatif masyarakat dalam bidang riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan lokal.
- c. Membangun kapasitas masyarakat untuk dapat berkontribusi secara aktif dalam pengembangan dan implementasi solusi inovatif.

6. Strategi Kebijakan Pengelolaan Data

- a. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang jelas terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data riset.
- b. Mendorong kolaborasi antara lembaga riset, pemerintah, dan sektor swasta untuk berbagi data secara efektif.
- c. Mengembangkan standar keamanan dan privasi data untuk melindungi informasi yang sensitif.

5.2 Strategi pengembangan produk unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah dalam kurun waktu 2024-2026

A. Strategi Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

- a. Perbaruan Regulasi
 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi riset dan inovasi yang ada.
 2. Membentuk tim khusus untuk meninjau dan memperbarui peraturan yang berkaitan dengan riset dan inovasi, melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan. Memastikan regulasi yang baru mencakup aspek-aspek terkini dan mendukung perkembangan teknologi.
- b. Pengembangan Basis Data Terintegrasi
 1. Meningkatkan integrasi basis data untuk mendukung pengelolaan riset dan inovasi.

2. Mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem basis data terintegrasi. Memastikan bahwa data yang relevan mudah diakses dan dapat digunakan oleh peneliti dan inovator.
- c. Optimalisasi dan Pengembangan Infrastruktur
 1. Memperbaiki dan memperluas infrastruktur riset dan inovasi.
 2. Merancang rencana pengembangan jangka panjang untuk optimalisasi sumber daya yang ada dan penambahan fasilitas baru sesuai kebutuhan. Melibatkan ahli infrastruktur untuk memastikan keefektifan dan keberlanjutan proyek.
- d. Evaluasi dan Peningkatan Anggaran
 1. Meninjau dan meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan inovasi.
 2. Melakukan audit anggaran dan mengidentifikasi area dimana peningkatan diperlukan. Memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran dan mencari sumber dana tambahan melalui kemitraan dengan sektor swasta atau lembaga donor.
- e. Fasilitasi Pengurusan HKI
 1. Meningkatkan fasilitas yang mendukung pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
 2. Memperbarui prosedur dan infrastruktur untuk pengurusan HKI, menyediakan pelatihan kepada peneliti, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi.

B. Strategi Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

- a. Pembentukan Badan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)
 1. Melakukan studi kelayakan untuk menilai kebutuhan dan potensi pembentukan Badan Penelitian Riset dan Inovasi.
 2. Menyusun rencana strategis yang mencakup tujuan, visi, misi, dan langkah-langkah implementasi jangka panjang.
 3. Melibatkan para pemangku kepentingan utama dalam proses perencanaan dan pembentukan.
 4. Mengadakan forum konsultasi publik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan representasi yang adil dari berbagai sektor.
- b. Pembangunan Fasilitas Riset dan Inovasi Bidang Pertanian/Perkebunan/ Peternakan/Perikanan
 1. Fokus pada pemenuhan kebutuhan utama dengan membangun fasilitas riset dan inovasi.
 2. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas riset dan inovasi.
 3. Melibatkan Pelaku usaha lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

- c. Pengembangan Program Riset dan Inovasi:
 - 1. Mendorong pengembangan program riset dan inovasi melibatkan berbagai pihak.
 - 2. Mengadakan forum atau lokakarya untuk mengidentifikasi kebutuhan riset yang mendesak. Membentuk tim gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dan industri peternakan untuk merancang program riset yang relevan.
- d. Pelatihan dan Pendidikan
 - 1. Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak.
 - 2. Menyusun program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peternak, melibatkan ahli industri dan akademisi. Memfasilitasi akses peternak ke program pendidikan formal dan informal.
- e. Dukungan Keuangan dan Pembiayaan
 - 1. Memberikan dukungan keuangan dan mendorong investasi.
 - 2. Membuat kebijakan yang mendukung pembiayaan proyek-proyek riset dan inovasi. Membentuk mekanisme insentif, seperti pengurangan pajak atau bantuan keuangan, untuk mendorong partisipasi peternak.
- f. Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - 1. Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai dampak program riset dan inovasi.
 - 2. Membentuk tim evaluasi independen untuk memantau dan mengevaluasi implementasi program riset dan inovasi. Menyesuaikan program berdasarkan hasil evaluasi.

C. Strategi Kemitraan Riset Dan Inovasi

- a. Kebijakan Formal untuk Mendorong Kemitraan
 - 1. Membuat kebijakan formal untuk mendorong kemitraan antar lembaga dengan insentif yang jelas.
 - 2. Mengimplementasikan kebijakan yang memberikan insentif bagi lembaga atau individu yang aktif berkolaborasi dalam riset dan inovasi. Membentuk tim khusus untuk merancang dan memantau kebijakan tersebut.
- b. Diversifikasi Inovasi dan Kolaborasi Lintas Sektor
 - 1. Melakukan diversifikasi inovasi ke sektor-sektor strategis.
 - 2. Mendorong penelitian dan inovasi di sektor-sektor yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan daerah. Memfasilitasi pertemuan lintas sektor untuk merangsang kolaborasi dan pertukaran ide.

- c. Kolaborasi Antar SKPD dan Sektor Terkait
 - 1. Membangun kolaborasi antar SKPD dan sektor terkait untuk memastikan inovasi mencakup berbagai bidang.
 - 2. Mengorganisir pertemuan rutin antar SKPD dan sektor terkait untuk membahas peluang kolaborasi dalam riset dan inovasi. Membentuk tim lintas sektor untuk proyek-proyek inovatif.
- d. Kolaborasi Antar SKPD dan Sektor Terkait
 - 1. Mengadakan forum atau pertemuan rutin untuk mendiskusikan peluang inovasi lintas sektor.
 - 2. Menyelenggarakan acara berkala yang memfasilitasi pertukaran ide antara peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Membuat platform daring atau fisik untuk mempromosikan kolaborasi.

D. Strategi Budaya Riset dan Inovasi

- a. Meningkatkan Alokasi Dana untuk Riset dan Inovasi
 - 1. Meningkatkan alokasi dana untuk merangsang inovasi, terutama pada sektor-sektor yang diunggulkan.
 - 2. Menyusun anggaran yang khusus untuk mendukung proyek riset dan inovasi di sektor-sektor yang dianggap strategis. Memberikan insentif keuangan bagi peneliti dan inovator yang berhasil menghasilkan dampak positif.
- b. Pendekatan Berkelanjutan dalam Pengakuan:
 - 1. Mengimplementasikan pendekatan berkelanjutan dalam memberikan pengakuan.
 - 2. Merancang sistem pengakuan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari inovasi, termasuk mempertimbangkan keberlanjutan, dampak ekonomi, dan manfaat sosial. Memberikan penghargaan dan pengakuan secara berkala.
- c. Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah
 - 1. Mendorong diversifikasi dalam penghargaan, termasuk pengakuan untuk kolaborasi dan dampak besar.
 - 2. Menyusun kriteria penghargaan yang mencakup berbagai aspek inovasi, seperti kolaborasi lintas sektor, dampak sosial, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan transparansi dalam proses seleksi penghargaan.
- d. Studi Kebutuhan Lokal dan Pengembangan Startup
 - 1. Melakukan studi kebutuhan lokal dan potensi riset untuk membimbing pengembangan startup.

2. Mengadakan penelitian pasar untuk mengidentifikasi peluang pengembangan startup yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Memberikan dukungan dan fasilitasi untuk pendirian dan pengembangan startup.
- e. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Inventarisasi
 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses inventarisasi.
 2. Mengadakan pertemuan atau forum partisipatif dengan masyarakat untuk mendiskusikan kebutuhan lokal, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi inovatif. Membuat proses inventarisasi lebih terbuka dan inklusif.

E. Strategi Keterpaduan Riset Dan Inovasi Di Daerah

- a. Meningkatkan Koordinasi Antar Sektor
 1. Meningkatkan koordinasi antara sektor-sektor terkait untuk menyamakan persepsi.
 2. Mengadakan pertemuan rutin antara perwakilan sektor-sektor terkait, termasuk pemerintah, industri, dan lembaga riset. Membuat platform komunikasi untuk berbagi informasi dan memastikan pemahaman yang seragam mengenai prioritas riset dan inovasi.
- b. Membentuk Konsorsium dan Jaringan
 1. Membentuk konsorsium dan jaringan untuk memperkuat prakarsa pengembangan riset dan inovasi.
 2. Mengundang pemangku kepentingan utama untuk bergabung dalam konsorsium atau jaringan inovasi. Merancang struktur yang jelas dan mengidentifikasi peran masing-masing anggota dalam mendukung pengembangan riset dan inovasi.
- c. Sistem Evaluasi dan Pemantauan Bersama
 1. Menerapkan sistem evaluasi dan pemantauan kinerja bersama.
 2. Merancang indikator kinerja bersama yang dapat diukur untuk mengukur kemajuan dalam pengembangan riset dan inovasi. Mengadakan pertemuan rutin untuk membahas hasil evaluasi dan mencari solusi terkait kendala yang muncul.
- d. Membentuk Kelompok Kerja Inovasi
 1. Membentuk kelompok kerja inovasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
 2. Membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah, industri, lembaga riset, dan masyarakat lokal. Tim ini bertugas merancang dan melaksanakan program inovasi yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

- e. Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha
 - 1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pengembangan.
 - 2. Menyelenggarakan program pelatihan untuk membantu pelaku usaha lokal mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam konteks riset dan inovasi. Memfasilitasi akses mereka ke sumber daya pendidikan dan pelatihan.
- f. Membangun Mekanisme Koordinasi Efektif
 - 1. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
 - 2. Mengadakan pertemuan reguler antara perwakilan pemerintah daerah dan pusat untuk membahas dan menyelaraskan prioritas pengembangan riset dan inovasi. Memastikan adanya saling informasi dan kolaborasi antara tingkatan pemerintahan.
- g. Menyelaraskan Prioritas Pembangunan dengan Kebijakan Nasional
 - 1. Menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebijakan nasional, khususnya terkait pemindahan IKN.
 - 2. Memastikan bahwa rencana pengembangan riset dan inovasi lokal sejalan dengan kebijakan nasional, terutama yang terkait dengan Inovasi Kemandirian Nasional (IKN). Mengidentifikasi area-area di mana Kabupaten Tanah Laut dapat memberikan kontribusi yang signifikan.
- h. Memberdayakan Daerah untuk Pengembangan Riset dan Inovasi:
 - 1. Memberdayakan daerah untuk mengembangkan riset dan inovasi yang mendukung kebijakan nasional.
 - 2. Mendorong partisipasi aktif daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program riset dan inovasi yang mendukung kebijakan nasional. Memberikan dukungan teknis dan finansial kepada daerah untuk mengembangkan potensi lokal.

F. Strategi Penyelarasan Dengan Perkembangan Global

- a. Meningkatkan Pemahaman dan Keterlibatan Aktif dalam Isu-isu Internasional
 - 1. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan aktif dalam isu-isu internasional, khususnya terkait dengan SDGs.
 - 2. Mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman pejabat pemerintah, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai isu-isu global dan SDGs. Mendorong partisipasi aktif dalam konferensi internasional dan forum diskusi global.
- b. Integrasi Prinsip-prinsip SDGs ke dalam Strategi Pengembangan Riset dan Inovasi

1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs ke dalam strategi dan rencana pengembangan riset dan inovasi di daerah.
 2. Menyusun atau memperbarui rencana pengembangan riset dan inovasi dengan memasukkan target SDGs yang relevan. Memastikan bahwa setiap inisiatif riset dan inovasi diarahkan untuk mendukung pencapaian SDGs.
- c. Melibatkan Pemangku Kepentingan Lokal dalam Pencapaian SDGs
1. Melibatkan para pemangku kepentingan lokal dalam diskusi dan perencanaan yang berfokus pada pencapaian SDGs.
 2. Mengadakan pertemuan konsultasi dan forum partisipatif dengan masyarakat lokal, perwakilan bisnis, dan organisasi non-pemerintah untuk mendiskusikan prioritas pembangunan yang relevan dengan SDGs.

BAB VI

PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

6.1 Sasaran Strategis dan Fokus Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-based Policy*)

Peta jalan riset dan inovasi di Kabupaten Tanah Laut merupakan perencanaan strategis yang dapat membantu pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan pelaku bisnis lokal untuk mengarahkan upaya mereka dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi. Berdasarkan hasil analisis gambaran riset dan inovasi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, berfokus pada sektor pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.



Gambar 6. 1 Sasaran Strategis Riset dan Inovasi Kabupaten Tanah Laut 2024-2026

Penentuan bidang prioritas arah riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut sudah dimulai pada tahun 2023 yang menetapkan target di Tahun 2026 di bidang pertanian tercapainya ketahanan pangan di Kabupaten Tanah Laut, di bidang peternakan tercapainya kemandirian pemenuhan pakan unggas dan ruminansia, di bidang perikanan adanya standarisasi harga komoditas hasil perikanan dan kelautan serta adanya produk unggulan olahan hasil perikanan dan kelautan. Pertanian menjadi salah satu fokus yang penting bagi Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai Petani. Dalam hal ini

maka diperlukan penyelenggaraan khusus oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut bidang pertanian, karena selain menjadi ikon, pertanian juga memberikan kontribusi yang besar terhadap ketersediaan sandang dan pangan. Selain sektor pertanian dan sektor perkebunan, dimana sektor perikanan Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu unggulan daerah untuk memenuhi permintaan ikan dalam lokal maupun di luar daerah. Perikanan di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jenis jenis kegiatan terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap (ikan laut).

6.2 Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Kabupaten Tanah Laut

Pengembangan riset dan inovasi di sektor pertanian dan perkebunan, peternakan serta perikanan di Kabupaten Tanah Laut sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan juga diharapkan akan berperan sebagai hinterland pemasok kebutuhan logistik pangan kepada IKN di Kalimantan Timur, salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi sentra produksi pangan adalah Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut memiliki produk-produk pertanian yang sangat banyak seperti perkebunan, hortikultura dan peternakan disamping potensi perikanan tangkap. Diharapkan dengan mulai berjalannya roda pemerintahan di IKN baru nantinya, tidak mendatangkan pangan dari wilayah lain di luar Pulau Kalimantan dan kebutuhan pangan dapat diproduksi masyarakat Kalimantan Selatan sendiri, sehingga, ibu kota negara baru akan menuju kemandirian pangan. Untuk menyediakan kebutuhan logistik kepada IKN diperlukan persiapan penggunaan dan pemanfaatan ruang untuk kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan dengan menggunakan teknologi pertanian modern serta menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul untuk menopang kebutuhan tenaga kerja di IKN. Peta jalan ini haruslah menjadi dokumen dinamis yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan pasar, dan dinamika kondisi daerah kabupaten Tanah Laut. Kolaborasi yang erat antara semua pihak terlibat sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam mengimplementasikan peta jalan riset dan inovasi ini. Implementasi sasaran strategis pada bidang pertanian dan perkebunan, peternakan serta perikanan kabupaten Tanah Laut di setiap tahun tertuang pada Tabel 6.1; 6.2 dan 6.3.

Tabel 6.1 Sasaran Strategis Bidang Pertanian dan Perkebunan pada 2024-2026

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	2024	2025	2026
Kebijakan dan Infrastruktur pertanian	Pembuatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah	Implementasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi di bidang pertanian dan perkebunan serta pengembangan produk unggulan daerah	Inisiasi pengusulan HKI produk unggulan daerah
Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah	Terbentuknya Badan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi melalui peningkatan SDM	Pengelolaan efisiensi anggaran dan pengembangan proyek pertanian dan perkebunan
Kemitraan Riset dan Inovasi	Membangun kemitraan riset dan inovasi yang mencakup pengembangan padi varietas unggul, Basis data riset pertanian, dan ketahanan pangan	Pengembangan jaringan kemitraan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan.	1. Membangun sistem informasi yang memungkinkan pertukaran data dan informasi antara lembaga riset, petani, dan pemangku kepentingan terkait. 2. membangun sistem <i>smart farming</i> dan integrasi pertanian dan perikanan
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan kesadaran petani terkait dengan praktik pertanian berkelanjutan dan inovasi yang	Percepatan teknologi dan inovasi kepada petani melalui pelatihan,	Adanya program penghargaan dan pengakuan terhadap kelompok tani/individu yang telah

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	2024	2025	2026
	dapat meningkatkan produktivitas pertanian	demonstrasi lapangan, dan penyuluhan.	melakukan riset dan inovasi pertanian
Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	Pengembangan sistem informasi antara lembaga riset	Manfaatkan teknologi informasi untuk mendukung manajemen pengetahuan dan pengambilan keputusan.	Pengembangan kawasan Agroindustri terpadu
Penyelarasan perkembangan global	Pembentukan unit pemantauan trend global dalam bidang pertanian khususnya dalam bidang <i>2. Zero Hunger</i> terutama pada <i>sustainable agriculture</i> (SDGs no. 2.4)	Tersedianya model riset dan inovasi daerah yang mendukung tujuan <i>Zero Hunger</i> (SDGs no. 2)	1. Membangun kemitraan dan jaringan internasional dengan lembaga riset/universitas, dan organisasi pertanian global 2. Melakukan adaptasi teknologi terkini dalam rangka peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan

Tabel 6.2 Sasaran Strategis Bidang Peternakan kabupaten Tanah Laut pada 2024-2026

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	2024	2025	2026
Kebijakan dan Infrastruktur peternakan	Pembuatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah bidang peternakan	1. Implementasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi di bidang peternakan yang berfokus pada pengembangan pakan ternak unggas dan ruminansia. 2. Membangun infrastruktur sumber daya air dan sistem pengelolaan lahan yang mendukung produksi pakan ternak.	Memastikan kebijakan mendukung insentif dan regulasi yang memfasilitasi pengembangan dan adopsi inovasi di tingkat daerah.
Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah	Terbentuknya Badan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)	Penguatan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi melalui peningkatan SDM dalam pengelolaan tanaman pakan yang efektif	Mendorong peternak untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ternak.
Kemitraan Riset dan Inovasi	Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan balai riset/pusat studi peternakan untuk mendukung pengembangan dan distribusi pakan ternak yang inovatif dengan pemanfaatan pasokan hijauan dan jerami	Memfasilitasi pertukaran informasi dan teknologi antara lembaga riset dan industri pakan dalam pelaksanaan integrasi pertanian-peternakan	Optimalisasi Riset dan pengembangan formula pakan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak unggas dan ruminansia

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	2024	2025	2026
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	Peningkatan kesadaran peternak terkait dengan praktik pertanian berkelanjutan dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas ternak	1. Melakukan Uji coba formula pakan secara lapangan dan mengamati dampaknya pada produksi ternak. 2. Melakukan riset pada pengembangan varietas tanaman pakan yang tahan terhadap kondisi lokal dan memiliki nilai gizi tinggi	Memfokuskan pada praktik-praktik inovatif dalam penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi pakan
Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	Menyediakan program pendidikan dan pelatihan kepada peternak tentang manajemen pakan yang baik	Pengembangan varietas tanaman pakan tahan kekeringan	Adanya implementasi praktik pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ternak
Penyelarasan perkembangan global	Pembentukan unit pemantauan <i>trend global</i> dalam bidang peternakan dalam penanganan <i>Resolution Consumption and Production</i> khususnya pada bidang <i>sustainable use of natural resources</i>	Membangun kemitraan dengan lembaga riset, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan dan penerapan inovasi pakan	Melakukan adaptasi teknologi terkini dalam rangka peningkatan produktivitas dan ketahanan pakan ternak

Tabel 6.3 Sasaran Strategis Bidang Perikanan kabupaten Tanah Laut pada 2024-2026

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	2024	2025	2026
Kebijakan dan Infrastruktur perikanan	1. Pembuatan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Kabupaten Tanah Laut 2. Menyusun peraturan daerah tentang standarisasi harga komoditas perikanan dan kelautan. 3. Pengelolaan dan peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, dan perikanan budidaya	1. Implementasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi di bidang Perikanan dan 2. Implementasi peraturan daerah tentang standarisasi harga komoditas perikanan dan kelautan.	1. Evaluasi kebijakan pengembangan riset dan inovasi perikanan dan evaluasi peraturan daerah tentang standarisasi harga komoditas perikanan dan kelautan. 2. Pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor serta pembangunan kampung-kampung-kampung perikanan air tawar, air payau dan air laut berbasis kearifan lokal.
Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah	1. Terbentuknya Badan Penelitian Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) 2. Dukungan pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan ikan dan sistem logistik yang terintegrasi	Rencana pembangunan sistem logistik pengelolaan produksi ikan, pemasaran dan jasa logistik	Pengembangan sistem logistik ikan, mulai dari penanggung jawab, transparansi, standarisasi, sertifikasi, stabilisasi, dan inovasi.
Kemitraan Riset dan Inovasi	Kerjasama Riset dan Inovasi dengan PT dan Badan/Lembaga/	Kerjasama Riset dan Inovasi dengan PT dan Badan/Lembaga/	Kerjasama Riset dan Inovasi dengan PT dan Badan/Lembaga/

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	2024	2025	2026
	Laboratorium Riset dan Pengujian yang Berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah di bidang perikanan dan kelautan	Laboratorium Riset dan Pengujian yang Berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah di bidang perikanan dan kelautan	Laboratorium Riset dan Pengujian yang Berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah di bidang perikanan dan kelautan
Budaya Riset dan Inovasi Daerah	1. Promosi dan pameran inovasi di bidang perikanan 2. Pelatihan budidaya perikanan dengan menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	1. Promosi dan pameran inovasi di bidang perikanan 2. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Pelatihan inovasi pengolahan dan pemasaran hasil ikan 4. Pembuatan Basis Data Riset dan Inovasi Bidang Perikanan	1. Promosi dan pameran inovasi di bidang perikanan 2. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam bentuk hasil olahan perikanan mencapai 2,5%
Keterpaduan Riset dan Inovasi Daerah	1. Pembangunan kawasan pelabuhan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI) 2. Pengembangan budidaya ikan tangkap dan ikan budidaya. 3. Pengembangan inovasi teknologi perikanan budidaya untuk menghasilkan produk benih dan induk yang berkualitas dan unggul	1. Pengembangan kawasan pelabuhan ikan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI) di 2. Pelelangan Ikan (PP-TPI) di 3. Optimalisasi usaha pengolahan sumber daya perikanan melalui peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu, keamanan pangan teknologi, kebersihan, dan pengendalian limbah sehingga menghasilkan	1. Pemanfaatan dan optimalisasi Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP-TPI) 2. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 3. Pengembangan pengemasan produk unggulan bidang perikanan 4. Pengembangan budidaya ikan air tawar dengan metode RAS (Recirculating

Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Unggulan Daerah	2024	2025	2026
		produk yang terjamin, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.	Aquaculture System) yang merupakan rangkaian teknologi yang diterapkan dalam sistem budidaya intensif dengan menggunakan infrastruktur yang memungkinkan pemanfaatan air secara terus menerus (resirkulasi air).
Penyelarasan perkembangan global	Pembentukan unit pemantauan tren global dalam bidang perikanan khususnya dalam bidang menghapus kemiskinan dan mengakhiri kelaparan (SDGs no. 1a <i>resources for poverty programs</i> dan 2.4 yaitu <i>sustainable agriculture</i>).	Membangun kemitraan dengan lembaga riset, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk mendukung pengembangan dan penerapan inovasi di bidang perikanan.	Melakukan adaptasi teknologi terkini dalam rangka peningkatan produktivitas dan ketahanan di bidang perikanan.

BAB VII

RENCANA AKSI TAHUNAN

RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Rencana Aksi Tahunan Riset dan Inovasi di Daerah disusun berdasarkan strategi dan peta jalan yang telah dipaparkan pada Bab V dan Bab VI. Rencana aksi tahunan riset dan inovasi di daerah disusun untuk periode waktu 3 tahun selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu tahun 2024-2026 . Rencana aksi yang disusun ini dibagi dalam 4 (empat) bagian utama yaitu ekosistem riset dan inovasi daerah; pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan. Selanjutnya program dan kegiatan disusun mengacu pada poin-poin ekosistem riset dan faktor pendukung lainnya. Secara lebih rinci Rencana Aksi Tahunan Riset dan Inovasi di Daerah dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Rencana Aksi Tahunan Riset dan Inovasi di Daerah

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DAERAH	A. Penyusunan Kebijakan yang Mendukung Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah						
	- Penyusunan Peraturan Bupati tentang RIPJP IPTEK Daerah	Tersedianya Peraturan Bupati tentang RIPJP IPTEK Kabupaten Tala Laut	√			Dokumen RIPJP IPTEK Kabupaten Tala Laut	BAPPERIDA
	- Kebijakan Pengembangan Ekosistem Riset dan Invoasi Daerah yang mencakup: Kebijakan dan infrasturktur; Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; Kemitraan Riset dan Inovasi; Budaya Riset dan Inovasi; Keterpaduan Riset dan Invoasi Daerah; dan Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Tersedianya kebijakan tentang penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah	√			Kebijakan penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah	BAPPERIDA
	- Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Bidang Pangan	Tersedianya kebijakan tentang pengembangan produk unggulan daerah		√		Kebijakan tentang pengembangan produk unggulan daerah	BAPPERIDA, Distanhorbun, Disnakeswan, DKPP, Disnakerin, Diskopdag, Diskominfo, Dinas PUPR
	- Inisiasi Pengusulan HKI Produk Unggulan Daerah	Registrasi HKI produk unggulan lokal bidang	√	√	√	HKI produk unggulan lokal	BAPPERIDA, Distanhorbun,

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
		pertanian/perkebunan/p eternakan/perikanan					Disnakeswan, DKPP, Disnakerin, Diskopdag
	B. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan daya dukung riset inovasi daerah						
	- Terbentuknya BAPPERIDA sebagai <i>leading sector</i> Riset dan Inovasi Daerah	Terbentuknya BAPPERIDA sebagai <i>leading sector</i> Riset dan Inovasi Daerah	√			Terbentuknya BAPPERIDA	BAPPERIDA
	C. Kerjasama Riset dan Inovasi dengan PT dan Badan/Lembaga/ Laboratorium Riset dan Pengujian yang Berkaitan dengan Produk Unggulan Daerah	Terjalinnnya kerjasama dengan PT/Badan/Lembaga /Laboratorium yang mendukung kegiatan riset dan inovasi daerah	√	√	√	Kerjasama dengan PT/Badan/Lembaga/ Laboratorium yang mendukung kegiatan riset dan inovasi daerah	BAPPERIDA, Distanhorbun, Disnakeswan, DKPP, Disnakerin, Diskopdag, Diskominfo, Dinas PUPR
	D. Peningaktan Budaya Riset dan Inovasi di Daerah						
	- Promosi dan Pameran Inovasi Daerah	Tersebar nya informasi tentang informasi daerah	√	√	√	Tersebar nya informasi tentang informasi daerah	BAPPERIDA
	- Lomba Inovasi Daerah	Meningkatnya semangat dalam mengembangkan inovasi daerah	√	√	√	Inovasi daerah	BAPPERIDA
	- Penguatan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)	Berkembangnya POSYANTEK di tiap kecamatan	√	√	√	POSYANTEK tiap Kecamatan	DPMD

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
	- Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG)	Terlaksananya lomba TTG	√	√	√	Lomba TTG Tingkat Kabupaten	DPMD
	E. Penyelarasan dengan Perkembangan Global						
	- Model Riset dan Inovasi yang mengacu pada tujuan 2 SDGs (<i>Zero Hunger</i>)	Tersedianya model riset dan inovasi daerah yang mendukung tujuan 2 SDGs (<i>Zero Hunger</i>)		√		Model riset dan inovasi daerah yang mendukung tujuan 1 SDGs (<i>Zero Hunger</i>)	BAPPERIDA
	- Kemitraan Internasional	Terjalinnnya kemitraan dari mitra yang bereputasi internasional			√	Kemitraan dari mitra yang bereputasi internasional	BAPPERIDA
	F. Riset dan Inovasi Daerah						
	- Pengembangan Basis Data Riset dan Inovasi Daerah	Tersedianya basis data untuk pengembangan riset dan inovasi daerah	√	√	√	Basis data untuk pengembangan riset dan inovasi daerah	BAPPERIDA, Kominfo
	- Pengembangan basis data terpadu bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Tersedianya basis data terpadu bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	√	√	√	basis data terpadu bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	BAPPERIDA, Distanhorbun, Disnakeswan, DKPP, Disnakerin, Diskopdag, Kominfo
	- Pengembangan perusahaan pemula (<i>Start Up</i>) berbasis riset	Berdirinya perusahaan pemula (<i>Start Up</i>) berbasis riset			√	Perusahaan pemula (<i>Start Up</i>) berbasis riset	BAPPERIDA, Disnakerin
	- Riset Pengembangan Kawasan Agropolitan	Terlaksananya riset tentang kawasan agropolitan	√	√		Tersedianya data penelitian yang mendukung	BAPPERIDA, Distanhorbun, PUPR

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
						pendirian dan pengembangan kawasan agropolitan	
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	A. Penyediaan Infrastruktur dan Sarpras Riset dan Inovasi Bidang Pertanian						
	- Pengembangan Pusat Inovasi Pembuatan Pupuk Organik	Tersedianya Pusat Inovasi Pembuatan Pupuk Organik		√		Pusat Inovasi Pembuatan Pupuk Organik	Distanhorbun
	- Pengembangan Inovasi Sistem Irigasi	Tersedianya model irigasi di wilayah kabupaten Tanah Laut			√	Model irigasi di wilayah kabupaten Tanah Laut	Distanhorbun, PUPR
	- Pengembangan Inovasi Pompa Hemat Energi untuk Sumur Air Tanah	Tersedianya infrastruktur pompa hemat energi untuk sumur air tanah		√	√	Pompa hemat energi untuk sumur air tanah	Distanhorbun, PUPR, DPRKPLH
	- Pengembangan rintisan sistem pertanian organik	Tersedianya rintisan sistem pertanian organik		√	√	Rintisan sistem pertanian organik	Distanhorbun
	- Pengembangan Kawasan Agropolitan	Tersedianya kawasan agropolitan		√	√	Kawasan Agropolitan	Distanhorbun, Disnakerin, PUPR
	B. Peningkatan SDM						
	- Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya ilmu dan keterampilan petani dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura	√	√	√	Peningkatan kompetensi petani dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Distanhorbun
	- Pelatihan Budidaya Sawit Berkelanjutan	Meningkatnya ilmu dan keterampilan petani	√	√	√	Peningkatan kompetensi petani	Distanhorbun

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
		dalam Bidadaya Sawit Berkelanjutan				dalam Bidadaya Sawit Berkelanjutan	
	- Pelatihan Pengolahan hasil pertanian	Meningkatnya ilmu dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian	√	√	√	Peningkatan kompetensi masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian	Distanhorbun, Diskopdag, Disnakerin
	- Pelatihan Teknis Pertanian Berkelanjutan	Meningkatnya ilmu dan keterampilan petani dalam mengimplementasikan pertanian berkelanjutan	√	√	√	Peningkatan kompetensi petani dalam mengimplementasikan pertanian berkelanjutan	Distanhorbun
	- Pelatihan Manajemen Usaha Tani	Meningkatnya kemampuan manajemen usaha tani		√	√	Peningkatan kemampuan manajemen usaha tani	Distanhorbun
	- Program Peningkatan minat generasi muda pada sektor pertanian	Meningkatnya minat pemuda pada sektor pertanian	√	√	√	Peningkatan minat pemuda pada sektor pertanian	Distanhorbun
	- Penguatan Kelembagaan Pertanian	Meningkatnya kemampuan teknis dan manajemen kelompok tani	√	√	√	Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen kelompok tani	Distanhorbun
	- Pelatihan Penanganan OPT	Meningkatnya ilmu dan keterampilan petani dalam penanganan OPT	√	√	√	Peningkatan kompetensi petani dalam penanganan OPT	Distanhorbun

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
	- Pelatihan Penanganan OPT menggunakan agen hayati	Meningkatnya ilmu dan keterampilan petani dalam penanganan OPT menggunakan agen hayati		√	√	Peningkatan kompetensi petani dalam penanganan OPT menggunakan agen hayati	Distanhorbun
	- Pelatihan penanganan dampak perubahan iklim	Meningkatnya ilmu dan keterampilan petani dalam menangani dampak perubahan iklim	√	√	√	Peningkatan kompetensi petani dalam menangani dampak perubahan iklim	Distanhorbun
	- Bimbingan dan Pelatihan Penerapan Sistem Pertanian Organik	Terlaksananya bimtek penerapan sistem pertanian organik		√	√	Peningkatan kemampuan penerapan sistem pertanian organik	Distanhorbun
	- Pelatihan Operator dan Perbengkelan Alsintan bagi Petani	Terselenggaranya pelatihan operator dan perbengkelan Alsintan		√	√	Peningkatan kemampuan operator dan perbengkelan Alsintan	Distanhorbun
	- Pelatihan manajemen pengelolaan lumbung pangan	Terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan lumbung pangan		√		Meningkatnya kompetensi dalam pengelolaan lumbung pangan	Distanhobun, DKPP
	C. Riset bidang Pertanian						
	- Pemetaan potensi Agroindustri di Kabupaten Tanah Laut	Tersedianya peta potensi agroindustri Kabupaten Tanah Laut		√		Peta potensi agroindustri Kabupaten Tanah Laut	Distanhorbun, Disnakerin

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
	- Riset Pengembangan Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Tersedianya hasil riset tentang pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan		√		Riset tentang pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan	DKPP
	- Pengembangan padi varietas unggul untuk mendukung pelestarian Sumber Daya Genetik (SDG) lokal	Tersedianya hasil penelitian tentang padi varietas unggul di Kabupaten Tanah Laut		√		Penelitian tentang varietas padi unggul di Kabupaten Tanah Laut	Distanhorbun, BAPPERIDA
	- Pengembangan Percontohan Pertanian Cerdas (<i>Smart Agriculture</i>)	Tersedianya percontohan pertanian cerdas (<i>smart farming</i>)		√	√	Pertanian cerdas (<i>smart farming</i>)	Distanhobun, Kominfo
	- Pengembangan Sistem Minapadi Intensif	Tersedianya percontohan sistem minapadi di Kabupaten Tanah Laut		√	√	Sistem Minapadi	Distanhobun, DKPP, PUPR
	- Riset pengembangan agen hayati untuk penanganan OPT berkelanjutan	Terlaksananya riset tentang pengembangan agen hayati dalam penanganan OPT berkelanjutan		√	√	Agen hayati dalam penanganan OPT Berkelanjutan	Distanhobun
PETERNAKAN	A. Penyediaan Infrastruktur dan Sarpras yang mendukung Bidang Peternakan						
	- Pengembangan Kawasan Hijauan Ternak	Meningkatnya luasan lahan hijauan yang digunakan untuk pakan ternakan		√	√	Tercukupinya lahan hijauan sebagai cadangan pakan ternak	Disnakeswan

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
	- Pengembangan pola integrasi sapi kelapa sawit (SISKA)	Meningkatnya jumlah masyarakat yang menerapkan metode tersebut dengan ditandainya efisiensi penggunaan sumber daya (lahan, proses pemupukan alami, produktivitas tanaman dan produktivitas ternak)		√	√	Peningkatan produktivitas hasil peternakan dan pertanian melalui teknik integrasi sapi dan sawit	Disnakeswan, Distanhorbun
	- Pembangunan Sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB)	Adanya laboratorium inseminasi buatan (IB) untuk meningkatkan jumlah bibit unggul			√	Meningkatnya jumlah ternak yang mempunyai bibit unggul	Disnakeswan
	- Penguatan sarana dan prasarana pusat kesehatan hewan	Meningkatnya pelayanan Kesehatan hewan		√	√	Peningkatan pelayanan kesehatan hewan	Disnakeswan
	- Revitalisasi rumah potong hewan	Adanya rumah potong hewan yang terstandarisasi		√	√	Rumah potong hewan terstandarisasi	Disnakeswan
	- Pengembangan sarana dan prasarana teknologi pengolahan pakan ternak dan pengawasan mutu pakan ternak	Tersedianya sarpras untuk pengolahan dan pengawasan mutu pakan ternak		√	√	Meningkatnya produksi ternak dengan mahalnya harga pakan ternak buatan yang tersedia	Disnakeswan
	B. Peningkatan SDM						

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
	- Pelatihan Inovasi Pembuatan Pakan Mandiri	Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan mandiri	√	√	√	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam menyediakan pakan ternak	Disnaskeswan
	- Pelatihan Inseminasi Buatan (IB)	Terlaksananya pelatihan Inseminasi Buatan (IB)		√	√	Meningkatnya jumlah inseminator untuk mendukung produksi dan produktivitas ternak unggul	Disnaskeswan
	- Pelatihan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (Good Farming Practice)	Terlaksananya pelatihan penerapan teknik budidaya ternak yang baik (<i>Good Farming Practice</i>)		√	√	Meningkatkan peternak yang menerapkan budaya ternak yang baik.	Disnaskeswan
	- Pelatihan pemeliharaan kesehatan hewan kepada masyarakat	Terlaksananya pelatihan kesehatan hewan kepada masyarakat	√	√	√	Meningkatnya kesiapan masyarakat untuk melakukan mitigasi dan penanganan terkait dengan kesehatan ternak	Disnaskeswan
	C. Riset bidang peternakan						
	- Riset potensi Peternakan di Kabupaten Tanah Laut	Adanya kajian terkait dengan sumberdaya, peternakan potensial,		√	√	Terbangunnya potensi peternakan yang dapat dijadikan sebagai dasar	Disnaskeswan

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
		kebutuhan pasar, dan analisa infrastruktur				pengembangan infrastruktur, prediksi kebutuhan pasar dan penyediaan sumber daya kedepannya	
	- Riset Potensi Hijauan dan Pakan Ternak alternatif	Adanya hasil kajian terkait dengan potensi hijauan dan pakan ternak alternatif terbaru		√	√	Mendukung tersedianya pakan ternak di berbagai kondisi/musim	Disnaskeswan
	- Riset pengembangan bibit unggul ternak	Adanya program riset bersama terkait pengembangan bibit unggul ternak		√	√	Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil ternak	Disnaskeswan
	- Kajian terkait hilirisasi hasil peternakan	Adanya kajian kajian peternakan terkait dengan hilirisasi produk peternakan		√	√	Terbentuknya dokumen hasil kajian peternakan terkait dengan hilirisasi produk peternakan	Disnaskeswan
	- Pengembangan riset rintisan peternakan berbasis digital	Terlaksananya riset berbasis digital untuk Meningkatkan efisiensi, kesehatan, dan produktivitas ternak melalui penggunaan teknologi		√	√	Terbentuknya sistem Peternakan berbasis pada teknologi informasi (Internet Of Things) dalam melakukan pengawasan terhadap ternak	Disnaskeswan

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
PERIKANAN	A. Penyediaan Infrastruktur dan Sarpras yang mendukung Bidang Perikanan						
	- Penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan	Meningkatnya unit prasarana pembudidayaan ikan di Tanah Laut		√	√	Meningkatnya jumlah atau volume produksi ikan setelah penyediaan prasarana	DKPP
	- Penyediaan sistem yang memuat data dan informasi terkait dengan sumberdaya ikan, informasi usaha pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan	Tersedianya data sumber daya ikan yang ada di Kalimantan Selatan berbasis sistem informasi	√	√	√	Kelengkapan data terkait dengan Sumberdaya Ikan akan mendukung sebagai dasar pengambil keputusan dalam pengelolaan hasil perikanan dan pemasaran	DKPP, Diskominfo
	- Penyediaan rumah belajar dan peralatan kemas (packaging) untuk produk olahan hasil perikanan	Adanya unit layanan dan peralatan yang mendukung proses kemas untuk setiap kelompok usaha hasil perikanan yang sesuai standar	√	√	√	Meningkatkan daya jual produk masyarakat yang dihasilkan	DKPP
	B. Peningkatan SDM						
	- Pelatihan budidaya perikanan dengan menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)	Meningkatnya jumlah petani ikan yang memiliki inovasi dan berbasis teknologi	√	√	√	Meningkatkan volume dan jumlah produksi ikan	DKPP

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
	- Pelatihan inovasi pengolahan dan pemasaran hasil ikan	Meningkatnya produk olahan berbahan dasar ikan dan meningkatnya penjualan produk		√	√	Meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat	DKPP
	- Pelatihan peningkatan kapasitas nelayan kecil	Meningkatnya jumlah nelayan kecil	√	√	√	Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi nelayan dan menaikkan jumlah nelayan	DKPP
	- Pelatihan dan pendampingan pembentukan kelembagaan nelayan kecil	Meningkatnya jumlah kelembagaan bagi nelayan kecil sehingga terdaftar dan memudahkan dalam pemberian bantuan	√	√	√	Menguatkan kapasitas nelayan kecil dalam sebuah lembaga yang dapat meningkatkan keterlibatan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi	DKPP, PTSP
	- Pembinaan mutu dan keamanan pangan produk perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil	√	√	√	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil produk perikanan	DKPP

Prioritas Permasalahan Daerah	Program dan Kegiatan	Indikator Utama	Target			Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			2024	2025	2026		
		Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko					
	C. Riset Bidang Perikanan						
	- Riset pembuatan pakan ikan yang bernutrisi dan murah	Adanya hasil riset terkait dengan alternatif pakan ikan yang dapat membantu petani perikanan		√	√	Tersedianya pakan alternatif untuk para petani ikan	DKPP BAPPERIDA
	- Kajian rantai pasok dan perkembangan harga ikan	Adanya kajian terkait dengan rantai pasok perikanan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi perkembangan harga ikan		√		Mengetahui rantai pasok terkait dengan perikanan dan harga ikan	DKPP BAPPERIDA
	- Kajian optimalisasi lokasi pelelangan ikan	Adanya penelitian lokasi pelelangan ikan		√	√	Mengetahui permasalahan dan solusi terkait dengan lokasi potensi pelelangan ikan	DKPP
	- Kajian pengembangan inovasi pemasaran hasil perikanan berbasis teknologi informasi	Adanya hasil penelitian/kajian inovasi terkait dengan media informasi untuk melakukan pemasaran		√	√	Meningkatkan akses pasar terhadap produk perikanan dan menyederhanakan rantai pasok	DKPP BAPPERIDA

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJP IPTEK) Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan RIPJP IPTEK merupakan amanat Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. RIPJP IPTEK Kabupaten Tanah Laut disusun berdasarkan untuk jangka waktu 3 (tahun) yaitu tahun 2024 - 2026 sesuai program prioritas pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RIPJP IPTEK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD. RIPJP IPTEK kabupaten Tanah Laut dengan tema prioritas pembangunan daerah bidang pangan meliputi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan merupakan unggulan daerah.

RIPJP IPTEK ini merumuskan kebutuhan riset dan inovasi untuk mendukung capaian target program prioritas daerah. RIPJP IPTEK ini menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi pada prioritas utama bidang pangan. RIPJP IPTEK berfungsi sebagai pedoman dalam kebijakan rencana anggaran daerah tahun 2024-2026. Program dan kegiatan riset dan inovasi yang telah dimuat secara komprehensif dalam rencana anggaran daerah selanjutnya akan dilaksanakan di wilayah pemerintahan kabupaten Tanah Laut. Pelaksana kegiatan bukan hanya berasal dari Pemerintah kabupaten Tanah Laut, tetapi dapat juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi/lembaga pemerintah/instansi terkait maupun lembaga yang relevan dengan kegiatan riset dan inovasi, sehingga dimungkinkan penganggaran bukan hanya berasal dari pemerintah kabupaten Tanah Laut saja.

Riset dan Inovasi sebagaimana tercantum dalam RIPJP IPTEK dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, landasan pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah, naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah dan/atau solusi permasalahan pembangunan. Program dan kegiatan yang termuat

dalam dokumen RIPJP IPTEK merupakan program riset dan inovasi yang memiliki keterkaitan lintas sektor, sehingga memerlukan dukungan koordinasi lintas pelaku yang lebih luas. Program dan kegiatan riset dan inovasi yang dilaksanakan mulai tahun 2024-2026 dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis diharapkan akan membawa dampak yang nyata pada bidang pangan, antara lain peningkatan indeks ketahanan pangan, kemandirian pakan unggas dan ruminansia, dan standarisasi harga komoditas hasil perikanan dan kelautan.

